

**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil
Dan Menengah Untuk Menghadapi
ASEAN - China Free Trade Agreement
(Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)**

TESIS

**Juraoda Yunaini Dulman
0906655534**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

**DEPOK
DESEMBER 2011**

Universitas Indonesia

**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil
Dan Menengah Untuk Menghadapi
ASEAN - China Free Trade Agreement
(Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

**Juraoda Yunaini Dulman
NPM. 0906655534**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINSTASI KEBIJAKAN PUBLIK**


**DEPOK
DESEMBER 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Juraoda Yunaini Dulman
NPM. : 0906655534
Tanda Tangan : 
Tanggal : 30 Desember 2011

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Juraoda Yunaini Dulman
NPM : 0906655534
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi ASEAN – China Free Trade Agreement (Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, Msi

Penguji : Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu

Penguji : Drs. Achmad Lutfi, Msi



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberkati penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Tesis berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi ASEAN – China Free Trade Agreement (Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)”, dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mendalami seluk beluk perkembangan usaha kecil menengah yang belum mempunyai daya saing terutama dalam menghadapi ASEAN – China Free Trade Agreement.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Roy. V. Solomo, M.Soc.Sc selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
2. Prof.Dr. Azhar Kasim, MPA selaku dosen pembimbing.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, Msi; Prof.Dr. Masliana Bangun Sitepu; Drs Achmad Lutfi, Msi; Dr. Haula L.R, Msi selaku dosen penguji.
4. Segenap dosen dan staf Program Pascasarjana Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi Publik FISIP UI yang memberikan bekal ilmu.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta serta staf, Kepala Pengelola Kawasan PIK Pulogadung serta staf atas bantuan dan informasi yang diberikan kepada penulis.
6. Pengusaha UKM PIK Pulogadung atas menjadi responden dan informasi yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Mama serta saudara-saudaraku tercinta atas dukungannya serta doanya
8. Abang O yang selalu menemani dan selalu siap sedia membantu dalam penulisan Tesis ini dan selalu jadi abangku yang siap sedia buat adiknya.

9. Abang Zaki yang selalu sabar dan selalu mau mendengarkan keluh kesah dalam proses penulisan Tesis ini.
10. Enya dan Abeh serta kakak-kakak atas doanya
11. Rekan – rekan Adm Publik angkatan 19, Intan, mba Lisa, mas Arman, mas Hisyam, mas Anton, Mba Vina, Devi, Mba Icut, Pa'de Rahmat dan Seno buat dukungan dan doanya serta 2 tahun kebersamaan yang menyenangkan.

Harapan penulis semoga tulisan yang belum sempurna ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait, terutama pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan usaha kecil menengah di DKI Jakarta khususnya kawasan PIK Pulogadung.

Jakarta, 27 Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSERTUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juraoda Yunaini Dulman
NPM : 0906655534
Program Studi : Ilmu Administrasi
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi ASEAN – China Free Trade Agreement. (Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 27 Desember 2011

Yang menyatakan



Juraoda Yunaini Dulman

ABSTRAKSI

NAMA : JURAODA YUNAINI DULMAN
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI
JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UNTUK MENGHADAPI ASEAN - CHINA FREE
TRADE AGREEMENT (STUDI KASUS PADA
KAWASAN PIK PULOGADUNG)

Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menengah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung.

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan “Tidak baik”. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria “Tidak baik”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden

mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

Kata Kunci :

Kebijakan Pembinaan, Usaha Kecil Menengah, Analisis Rentang Waktu



ABSTRACT

NAME : JURAODA YUNAINI DULMAN
STUDY PROGRAM : ADMINISTRATIVE SCIENCE
TITLE : ANALYZING THE GOVERNMENT POLICY IN
THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN FACING THE ASEAN-CHINA
FREE TRADE AGREEMENT (CASE STUDY ON
AREA PIK PULOGADUNG)

This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung.

Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs.

The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time. .

The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good".

Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers.

Key Words :

Development Policy, Small Medium Enterprises, Criteria Range Analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTAKSI	vii
ABSTACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Signifikansi Masalah.....	19
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	19
1.3.2 Signifikansi Penelitian.....	19
1.4 Sistematika Penulisan.....	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
2.1.1 Pengembangan Klaster Untuk Daya Saing UKM Menghadapi ACFTA.....	22
2.1.2 Kebijakan Pemerintah Untuk Mendukung UKM dan Koperasi dalam Menghadapi ACFTA.....	23
2.2 Kebijakan Publik.....	24
2.3 Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2.4.1 Model Implementasi Kebijakan.....	29
2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	30
2.5 Usaha Kecil Menengah.....	35
2.6 Kebijakan Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM)...	38
2.6.1 Pola Pembinaan UKM dalam Rangka Otonomi Daerah.....	39
2.7 Membangun Keunggulan Daya Saing Nasional.....	41
2.8 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah.....	44
2.8.1 Pemahaman Klaster.....	47
2.8.2 Jenis Klaster.....	48
2.8.3 Contoh Kawasan Industri atau Klaster.....	52
2.9 Kerangka Pemikiran.....	54

III.	METODE PENELITIAN.....	57
	3.1 Pendekatan Penelitian.....	57
	3.2 Jenis Penelitian	57
	3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	57
	3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	58
	3.5 Tehnik Pengambilan Sampel.....	59
	3.5.1 Kriteria Sentra Bisnis sebagai Unit Penarikan Sampel.....	59
	3.6 Sumber dan Jenis Data.....	59
	3.6.1 Data Primer.....	59
	3.6.2 Data Sukender.....	60
	3.7 Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	60
	3.7.1 Tehnik Pengolahan Data.....	60
	3.7.2 Tehnik Analisis Data.....	62
IV.	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH.....	65
	4.1 Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah Nasional.....	65
	4.1.1 Pendahuluan.....	65
	4.1.2 Kebijakan Pengembangan.....	66
	4.1.3 Strategi Pengembangan.....	68
	4.1.3.1 Pendekatan Pengembangan.....	68
	4.1.3.2 Perlakuan dan Mekanisme Koordinasi Pengembangan.....	68
	4.2 Kebijakan Pengembangan Klaster Bisnis UKM.....	69
	4.3 Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan UKM di Kawasan PIK Pulogadung.....	73
	4.3.1 Maksud Dan Tujuan Pembangunan PIK Pulo Gadung.....	73
V.	ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN.....	75
	5.1 Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan UKM Untuk Menghadapi ACFTA di Kawasan PIK Pulogadung.....	75
	5.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	75
	5.1.2 Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM dalam menghadapi ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA) di kawasan PIK Pulogadung .	78
	5.1.2.1 Evaluasi Terhadap Indikator Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	78
	5.1.2.2 Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKM dalam menghadapi ACFTA.....	93
	5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM Dalam Menghadapi ACFTA di Kawasan PIK Pulogadung.....	109

VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
6.1	Kesimpulan	125
6.2	Saran.....	130

DAFTAR REFERENSI
DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Neraca Perdagangan Indonesia Cina.....	11
Tabel 1.2	Perbandingan Sejumlah Indikator Indonesia China.....	13
Tabel 1.3	Daya Saing Indonesia.....	14
Tabel 2.1	Tahap-Tahap dari Pembangunan kompetitif Nasional.....	42
Tabel 3.1	Pengolahan Data dengan Menggunakan Skala untuk Variabel Implementasi Kebijakan.....	61
Tabel 3.2	Pengolahan Data dengan Menggunakan Skala Likert untuk Variabel kateristik dari masalah (2) karateristik kebijakan/undang (3) variabel lingkungan.....	61
Tabel 3.3	Rentang Skala.....	63
Tabel 5.1	Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 5.2	Ketepatan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM	78
Tabel 5.3	Rentang Skala Ketepatan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	79
Tabel 5.4	Kecukupan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM	82
Tabel 5.5	Rentang Skala Kecukupan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM	82
Tabel 5.6	Efisiensi Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	84
Tabel 5.7	Rentang Skala Efisiensi Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	85
Tabel 5.8	Keadilan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	86
Tabel 5.9	Rentang Skala Keadilan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM	87
Tabel 5.10	Responsivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM...	88
Tabel. 5.11	Rentang Skala Responsivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	88
Table 5.12	Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM.....	91
Tabel 5.13	Rentang Skala Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM	91
Tabel 5.14	Distribusi Frekuensi Variabel Sumberdaya.....	93
Tabel 5.15	Rentang Kriteria Untuk Variabel Sumberdaya.....	96
Tabel 5.16	Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi.....	100
Tabel 5.17	Rentang Kriteria Untuk Variabel Komunikasi.....	102
Tabel 5.18	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan.....	106
Tabel 5.19	Rentang Kriteria Untuk Variabel Kepatuhan.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Model-model Implementasi Kebijakan Atas	29
Gambar 2.2	Model Ketertarikan Industri Lima Kekuatan Porter.....	45
Gambar 2.3	Konsep Pengembangan UKM.....	51
Gambar 2.4	Peta Potensi Klaster Industri.....	52
Gambar 2.5	Peta Pengembangan Ekonomi Daerah.....	53
Gambar 2.6	Kluster Anggur California.....	54
Gambar 2.7	Kerangka Pemikiran Penelitian Analisa Kebijakan Pengembangan UKM dalam Menghadapi ACFTA dengan studi kasus Kawasan PIK Pulogadung.....	56



ABSTRAKSI

NAMA : JURAODA YUNAINI DULMAN
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI
 JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 UNTUK MENGHADAPI ASEAN - CHINA FREE
 TRADE AGREEMENT (STUDI KASUS PADA
 KAWASAN PIK PULOGADUNG)

Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menengah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung.

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan “Tidak baik”. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria “Tidak baik”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden

mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

Kata Kunci :

Kebijakan Pembinaan, Usaha Kecil Menengah, Analisis Rentang Waktu



ABSTRACT

NAME : JURAODA YUNAINI DULMAN
 STUDY PROGRAM : ADMINISTRATIVE SCIENCE
 TITLE : ANALYZING THE GOVERNMENT POLICY IN
 THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
 ENTERPRISES IN FACING THE ASEAN-CHINA
 FREE TRADE AGREEMENT (CASE STUDY ON
 AREA PIK PULOGADUNG)

This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung.

Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs.

The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time. .

The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good".

Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers.

Key Words :

Development Policy, Small Medium Enterprises, Criteria Range Analysis

Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya liberalisasi perdagangan dan perekonomian negara-negara ASEAN akan membawa kesempatan dan tantangan bagi dunia usaha Indonesia. Sejatinya, liberalisasi ekonomi sudah memporak-porandakan perekonomian nasional. Sebabnya, kesepakatan perdagangan bebas yang diperluas yang berimplikasi terbukanya pasar dalam negeri sudah merontokkan industri nasional. Akibatnya, puluhan juta orang menganggur atau menjadi pekerja informal. Saat ini, produk impor menguasai pasar dalam negeri dibandingkan produk-produk lokal. Di lain pihak, usaha skala kecil, menengah, (UKM), dan besar tidak diberi dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sehingga harus bertarung dengan pelaku industri negara lain yang lebih dulu maju atau lepas landas.

Akibatnya, puluhan juta orang menganggur atau menjadi pekerja informal. Saat ini, produk impor menguasai pasar dalam negeri dibandingkan produk-produk lokal. Di lain pihak, usaha skala kecil, menengah, (UKM), dan besar tidak diberi dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sehingga harus bertarung dengan pelaku industri negara lain yang lebih dulu maju atau lepas landas.

Sementara itu, program-program pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menjadi penyelamat perekonomian dan penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Akibatnya, upaya menciptakan lapangan kerja terkendala sehingga banyak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) mempertaruhkan nasibnya di luar negeri. Namun ini pun dibuat susah oleh pemerintah, karena membebani calon TKI dengan biaya dan proses perizinan. Oleh sebab itu, banyak rakyat mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang program pembebanan dan perizinan tersebut.

Selain itu, Permendag tentang izin untuk industri (produsen) pengimpor barang jadi secara tidak langsung berdampak pada nasib para karyawan/buruh/pekerja di sektor industri. Padahal, sebelum diterbitkannya kebijakan ini, ekspansi barang-barang impor kian merajalela dan menggerus produk-produk

dalam negeri. Artinya, pemerintah tidak berpihak ke nasib buruh/pekerja pabrik. Oleh sebab itu, harus dipertanyakan bagaimana nasib mereka. Sebabnya selama ini, impor yang dilakukan importir saja sudah merontokkan banyak industri dan UKM nasional, apalagi sekarang, ada kecenderungan banyak produsen (industri) untuk menjadi pedagang.

Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong beralihnya produsen menjadi importir, sehingga pada akhirnya deindustrialisasi tidak bisa lagi dibendung. Untuk itu, Kemendag harus mengantisipasi kecenderungan ini. Apalagi selama ini Menperin terlihat serius memperjuangkan perkembangan industri nasional sehingga langkah pemerintah harus sangat hati-hati. Sebabnya, jika kebijakan baru ini dimanfaatkan oleh produsen menjadi insentif dan stimulus untuk menjadi pedagang, maka bukannya meningkatkan kinerja industri nasional, kebijakan ini justru akan mematikan industri nasional.

Banyak Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya pemberdayaan UKM seperti UU No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun UKM hingga sekarang masih belum banyak berubah. Begitu pula dengan Usaha Menengah yang aset bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari aset bersih usaha kecil. Pemberdayaan UKM di sini adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuh kembangkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kemudian, dikeluarkan PP No 44 tahun 1997 tentang kemitraan di mana PP ini menjelaskan bahwa kemitraan dilakukan untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atau asas kekeluargaan sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim usaha yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sesudah itu, dikeluarkan pula Keppres dan Peraturan Menteri seperti Keppres No 127 tahun 2001 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk

usaha kecil dan terbuka pula bagi usaha menengah dan/atau usaha besar dengan syarat kemitraan. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/jenis usaha yang ditetapkan untuk usaha kecil yang perlu dilindungi, diberdayakan, dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan. Lalu, dikeluarkan Keppres No 56 tahun 2002 tentang restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah di mana dalam Keppres ini, bidang/jenis usaha yang mencakup 9 sektor, yaitu j. Sektor Pertanian yang terdiri dari peternakan ayam buras; k. Sektor Kelautan; l. Sektor Kehutanan; m Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; n Sektor Industri dan Perdagangan di mana sektor UKM meliputi i. industri makanan dan minuman olahan; ii. Industri penyempurnaan benang dan serat; iii. Industri tekstil dan produk tekstil; iv, pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non-pangan; o Sektor Perhubungan; p. Sektor Telekomunikasi; dan q Sektor Kesehatan, seperti jasa profesi kesehatan/pelayanan medik/ pelayanan kefarmasian. Pada sektor industri dan perdagangan ini, produk-produk PIK mengacu sehingga dalam mendapatkan kredit dari pemerintah/ bank, namun pada kenyataannya mereka sulit memperolehnya.

Lalu, Keppres No 56 tahun 2002 tentang restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di mana restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit UKM agar debitor UKM dapat memenuhi kewajibannya. Terakhir, adalah Permeneg BUMN per05/Mbu/ 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (BL) di mana usaha ini adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL BUMN Pembina adalah program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan. Sedangkan Program BL BUMN Peduli adalah program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanakannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Meneg KUKM.

Berbagai jenis kebijakan dalam upaya pemberdayaan UKM sebetulnya telah ada sejak awal tahun 2000an. Misalnya, peningkatan akses UKM pada sumber pembiayaan, khususnya kapasitas kelembagaan dan akses UKM pada

sumber-sumber pembiayaan; namun pada prakteknya sulit diperoleh. UKM dapat memperoleh kredit, jika mereka sudah memperlihatkan hasil yang menguntungkan, sementara bagi mereka yang akan berusaha, sulit mendapatkan kredit dari pemerintah tersebut.

Kemudian, dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di mana Pembinaan dan Pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM dan teknologi. Pembinaan dan Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan dilaksanakan dengan j meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan; l memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; serta m menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa berbagai kebijakan untuk pemberdayaan UKM yang berupa a) kebijakan peningkatan akses UKM pada sumber pembiayaan, b) kebijakan untuk memperkuat sistem kredit bagi UKM; c) kebijakan optimalisasi pemanfaatan dana perbankan untuk pemberdayaan UKM serta kebijakan pengembangan kewirausahaan dan SDM yang berupa meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM; mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi; serta kebijakan guna meningkatkan Peluang Pasar Produk UKM yang berisi a) mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UKM; b) mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar berbasiskan kemitraan; c) mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UKM; dan Reformasi Regulasi yang mampu menyediakan insentif perpajakan bagi UKM dan menyusun kebijakan di bidang UKM dengan menata kembali kebijakan di bidang UKM, termasuk meredefinisi UKM dan/atau IKM. Salah satu ketidakterhasilan pemberdayaan UKM adalah koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan penanganan UKM agar dapat memanfaatkan potensinya secara optimal seperti aspek regulasinya. Begitu pula, kegagalan pemberdayaan PIK dibidang pemasaran adalah

ketergantungannya pada kedatangan konsumen yang datang seolah dijamin oleh pemerintah.

Reformasi Pemerintahan melahirkan perubahan terus menerus dengan dinamika yang bersifat permanen dan sesaat. Meskipun pada saat krisis memuncak pada tahun 1998 ekonomi rakyat dihadirkan sebagai penyelamat dan ditugasi terlalu banyak hal, tetapi akibat negative dari penggelontoran fasilitas menimbulkan kekhawatiran baru, di samping perubahan fundamental reformasi politik di bidang perbankan mengharuskan perubahan. Sementara dampak krisis masih membebani masyarakat dan menyisakan kemunduran kelompok usaha menengah yang mempunyai kedudukan penting dalam menghela ekonomi akar rumput (grass root economy). Masih dalam suasana semacam itu lembaga yang bertugas untuk mengkordinasikan pengembangan UKM dipersempit statusnya menjadi Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada akhir tahun 1999. Oleh karena itu dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) untuk mengemban tugas operasional Departemen Koperasi dan PKM [Dirjen Koperasi (Bina Usaha) dan Dirjen PKM]. Badan baru ini dilengkapi dengan tiga pilar fungsi yaitu: Pengembangan Usaha (pengembangan bisnis dan pasar, Business Development); Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi (pembiayaan dan investasi termasuk restrukturisasi kredit, Financial and Investment Facilitation), dan Sumber Daya Manusia (pendidikan pelatihan, teknologi dan penelitian, dan penyuluhan dan peran serta masyarakat, Technology and Trainings Supports). Dalam forum kordinasi donor pembangunan Koperasi dan UKM BPS-KPKM dikenal sebagai SMECDA (Small Medium Enterprise and Cooperative Development Agency).

Badan ini didirikan dan dalam waktu tiga tahun akan dievaluasi sesuai dengan arah reformasi yang masih akan berlanjut. Menghadapi tantangan ini maka harus ada scenario untuk mentransformasikan menjadi lembaga partnership antara pemerintah dan pelaku yang lebih ramah pasar. Paradigma pembinaan dan dukungan langsung harus ditransformasikan menjadi industri pemberdayaan yang secara perlahan menjadi bagian dari industri jasa perusahaan yang berdampingan dengan jasa keuangan dan jasa persewaan yang menjadi nyawa dari pengembangan usaha. Inilah paling tidak renungan kami ketika itu dalam

menerima tugas transisional tapi harus melahirkan perubahan mendasar. Kesulitan Direktorat Jenderal Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Departemen Koperasi ketika itu adalah mengenali obyek binaan dan mencari entry yang berbeda dari Dirjen IK Departemen Perindustrian dan Dirjen Koperasi. Pembina koperasi meskipun dibatasi oleh wilayah dan pengelompokan kegiatan ekonomi tetapi mereka mempunyai identitas kelembagaan universal, yaitu Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, tetapi tidak demikian halnya dengan industri kecil, usaha kecil, dagang kecil dan sektor informal.

Menjawab kebutuhan tantangan kelembagaan dan program pengembangan yang berdampak jangka panjang dan perlu kecepatan pelaksanaan, maka pikiran yang dikembangkan ketika itu bahwa program itu harus memenuhi syarat: (1). melahirkan entry baru yang jelas, (2). mempunyai karakter unity, (3). ada kekuatan market driven, dan (4). melahirkan self governing (rolling) mechanism. Pendekatan yang mempunyai kemampuan memenuhi syarat ini tiada lain adalah pendekatan klaster dengan entri sentra yang sudah hadir di masyarakat. Dan sejak itu pendekatan klaster yang biasa digunakan dalam pendekatan manajemen industri diadopsi ke dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, karena pada dasarnya aglomerasi yang biasa dilakukan industri juga pada akhirnya tumbuh menjadi kesatuan dengan usaha pendukungnya, seperti sejarah klaster industri perkapalan di Norwegia lebih seabad yang lalu. Pengalaman ini memang dianjurkan oleh UNCTAD sebagai model tahapan pengembangan, meskipun kawasan itu kini sudah menjadi kawasan pelabuhan untuk rekreasi dan pusat perbankan.

Secara sepintas pendekatan klaster dalam pengembangan UKM, apapun basis kegiatannya, pivotnya adalah menjadikan total omzet dari hasil pengelompokan yang disertai dukungan ini harus tumbuh menjadi sebuah ekonomi yang kesemuanya dapat hidup dengan kekuatan pasar. Biasanya yang paling mudah adalah melihat kehadiran lembaga keuangan karena dia tidak akan hadir kalau tidak layak. Dalam mengembangkan tiga pilar penguatan diatas maka program pokoknya adalah memasukkan komponen jasa pengembangan usaha yang disebut Business Development Services (BDS) ke dalam klaster/sentra UKM dan memperkuat Lembaga Keuangan Mikro untuk melayani usaha mikro

non formal dan tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan dan ditopang oleh pendidikan, pelatihan dan pengenalan telematika-informatika melalui BDS. Ke depan menjadikan mereka mitra Bank adalah keharusan oleh karena itu instrument penjaminan, asuransi dan instrument keuangan lainnya, termasuk restrukturisasi dikembangkan dan dikaitkan dengan fungsi BDS.

BPS-KPKM sendiri umurnya tidak sampai tiga tahun karena pada akhir tahun 2001 dihapuskan, tetapi pendekatan klaster dengan instrument BDS dan MAP-LKM sudah menjadi dokumen UU-PROPENAS (UU 25/2001) sebagai pengganti GBHN maka perjalanan program ini selamat sampai akhir sasaran pengembangan selama 4 tahun 2001-2004, dengan jumlah seribu entri (sentra) untuk dikembangkan menjadi klaster UKM. Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, terutama setelah tahun 2005 nyanyian tentang klaster, BDS dan lainnya memang redup dalam pendekatan pengembangan UKM. Tetapi juga belum ada konsep pengganti atau alternative strategi yang ditawarkan Kementerian Koperasi dan UKM yang menyangkut pengembangan UKM. Saksi hidup dari hasil pendekatan BPS-KPKM adalah masih adanya pegiat BDS dan hadirnya Asosiasi BDS, serta digunakannya komunikasi jalur maya SMECDA untuk komunikasi UKM. Evolusi BDS lebih jelas karena selain dikembangkan menjadi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), Lembaga Pendamping dalam program pemberdayaan pada program daerah dan kemudian PNPM, sampai pada pengenalan BDS secara eksplisit dalam pembangunan sektor, CSR Perusahaan Besar dan BUMN. Industri jasa perusahaan dalam perekonomian kita juga tumbuh pesat. Sementara pendekatan klaster secara eksplisit juga telah digunakan dalam pembinaan usaha kelautan dan perikanan, program pembangunan daerah dan industri sendiri.

Pada masa berakhirnya program pengembangan Sentra/Klaster UKM tahun 2004 untuk mencapai sasaran 1000 sentra kegiatan UKM, Badan Pusat Statistik BPS diminta melakukan evaluasi dampak pemberian dukungan financial (LKM/MAP) dan dukungan non financial (BDS/Jasa Pengembangan Usaha) dan hasilnya melaporkan bahwa keduanya mendorong volume penjualan (25% mengalami peningkatan dan 33 persen bertahan dalam krisis/tetap), sementara keuntungan juga meningkat dengan kinerja yang hampir sama (BPS, 2004). Jika

dilihat rata-rata masa implementasi pendekatan ini dalam praktek masih kurang dari dua tahun, tetapi separuh dari UKM mendapati layanan pasar yang tepat dapat membantu mereka mencari pemecahan pengembangan usaha mereka. Akan lebih menarik lagi seandainya potret 2009 ditampilkan, karena akan menguji setelah pendekatan dimaksud dilepas selama lima tahun apakah telah menumbuhkan industri jasa perusahaan bagi UKM. Karena kinerja makro yang tumbuh pesat sangat boleh jadi karena permintaan jasa perusahaan dari usaha besar yang tumbuh pesat. Ingat jumlah unit usaha besar bertambah pesat, pangsa usaha besar juga menggeser usaha menengah, sehingga pada saat ini sedang terjadi kembali gejala konsentrasi usaha.

Pengembangan kawasan ini salah satunya tampak di wilayah DKI Jakarta, ada sekitar 1,08 juta pekerja yang bergerak dalam sektor UKM salah satu pusatnya ada di kawasan PIK Polugadung yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1981. Maksud dibangunnya kawasan seluas 44 hektar ini adalah sebagai tempat pembinaan dan pengembangan industri kecil sehingga lebih mandiri dan berdaya saing. Seperti halnya sentra UKM di daerah lain kawasan PIK juga mengalami berbagai permasalahan, seperti keterbatasan SDM, masuknya produk impor dengan harga yang sangat murah, dan belum adanya data ataupun informasi yang tajam tentang produk UKM yang siap dipasarkan menjadi faktor utama sulitnya pengembangan usaha kecil.

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, di wilayah DKI Jakarta, pembinaan pengusaha industri kecil untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas telah dilakukan pemerintah melalui pembangunan suatu tempat usaha industri kecil yang menyediakan sarana usaha, tempat tinggal serta prasarana penunjang yang memadai dan ramah lingkungan. Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur meliputi areal seluas +44 ha, dibawah pengelolaan Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) Pulogadung. Pengembangan PIK Pulogadung diarahkan menjadi suatu lingkungan serba lengkap yang mendukung kegiatan industri, niaga dan pemukiman bagi para pengusaha industri kecil.

Sesuai dengan perkembangan kompetisi bisnis global, BPLIP Pulogadung telah memiliki masterplan pengembangan PIK Pulogadung dari sebuah kawasan

industri dan pemukiman menjadi sebuah kawasan yang terpadu yang di dalamnya terdapat 49 Areal Wisata Belanja dan Industri. Pengembangan tersebut menjadikan PIK Pulogadung dari sebuah kawasan industri dan pemukiman menjadi sebuah kawasan yang terpadu yang di dalamnya terdapat areal wisata belanja dan industri. Pengembangan tersebut menjadikan PIK Pulogadung tidak hanya sebagai satu-satunya kawasan industri dan pemukiman UKM tetapi juga sebagai kawasan industri, pemukiman dan wisata belanja. Pengembangan sektor industri kecil dan pemasaran produk industri kecil di PIK telah berlangsung secara positif dan terarah melalui pembinaan berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pengusaha industri kecil, seperti teknik produksi, desain, pengawasan mutu, pemasaran, manajemen dan lainnya yang dapat meningkatkan keterampilan usaha dan manajemen mereka. Berbagai produk industri kecil mampu memenuhi pasar lokal bahkan beberapa telah berhasil menembus pasar ekspor

Dewasa ini, kondisi PIK sudah banyak berubah. Awalnya, berfungsi untuk menampung industri kecil yang terdiri dari berbagai jenis kerajinan tangan barang logam, dan non-logam hingga pakaian jadi. Namun dewasa ini, hampir semuanya menjadi kawasan perdagangan pakaian jadi/garmen, dan alas kaki akibat produk-produk ini laku keras di pasar. Begitu pula, ruangan untuk memproduksi produk-produk logam seperti teralis besi yang tadinya ukuran ruangnya untuk bengkel relatif besar, kini semakin kecil sebab ruangan itu dipergunakan pula untuk tempat tinggal pemilik atau pegawainya, terutama saat pesanan atau order banyak.

Kondisi pasar pun bertambah buruk akibat menjamurnya swalayan dan mal-mal yang secara tidak langsung memukul pengusaha home industry di Jakarta. Salah satunya adalah pengusaha sepatu yang menjual produknya di blok B kawasan PIK di mana harga produk yang ditawarkan pengusaha kecil ini kalah bersaing dengan produk-produk yang disuguhkan di pasar swalayan ataupun mal. Kondisi ini membuat masa kejayaan pengusaha yang berusaha di PIK seperti pada tahun 80-90an tinggal kenangan. Namun kondisi ini agak berbeda dengan pengusaha konveksi yang sebaliknya bisa dikatakan panen order, khususnya menjelang lebaran dan/ atau tahun ajaran sekolah baru.. Masa kejayaan pengusaha kecil kaos atau t-shirt mencapai puncaknya saat pemilu 2004 dan 2009 di mana

partai-partai politik besar memesan hingga ribuan kaos dan bahan-bahan yang disablon untuk kepentingan kampanye partainya.

Para pengusaha sepatu kini sudah menaruh harga murah seperti harga sepatu wanita yang harganya dipatok antara Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu per pasang, sementara sepatu kantor formal untuk pria sekitar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per pasang. Namun harga murah ini belum bisa bersaing dengan produk pabrikan yang dijual di swalayan dan mal yang bertebaran di pelosok kota Jakarta, bahkan di pasar swalayan/mal yang berada di kawasan PIK sendiri akibat mutunya kalah bersaing dengan produk-produk pabrikan yang menyebabkan penghasilan para pedagang sepatu di kawasan PIK menurun drastis. Untuk mensiasatinya, para pedagang sepatu untuk tetap bisa eksis, mereka membeli label Adidas, Puma, Nike, dan merk sepatu buatan luar negeri terkenal lainnya untuk dipasang pada produknya sehingga sepatu buatannya itu, seolah asli, padahal palsu (aspal) supaya tidak sepi dari pembeli, terutama pembeli atau pedagang dari luar kota Jakarta.

Masalah para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung makin bertambah seperti halnya para pengusaha kecil menengah di seluruh Indonesia sejak di berlakukannya Asean-China Free Trade Agreement/ACFTA pada 1 Januari 2010 fakta menunjukkan aliran impor barang asal Tiongkok melonjak drastis sejak diberlakukannya ACFTA pada 1 Januari 2010. Posisi perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok bahkan mulai defisit di awal 2011 ini. Defisit disebabkan peran impor dari Cina meningkat pesat Defisit neraca perdagangan tahun 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Artinya bahwa daya saing produk Indonesia terhadap produk Cina menurun dapat kita lihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Neraca Perdagangan Indonesia Cina

No	Tahun	Ekspor ke Cina (USD Juta)	Impor dari Cina (USD Juta)	Neraca (USD Juta)
1	2004	4.604	4.101	503
2	2005	6.662	5.842	820
3	2006	8.343	6.636	1.707
4	2007	9.675	8.557	1.118
5	2008	11.636	15.247	- 3.661
6	2009	11.499	14.002	-2.503
7	2010	15.692	20.422	-4.732
8	2011 (Juli)	11.678	14.812	-3.134

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, hasil monitoring dari Kementerian Perindustrian terhadap lima sektor industri yang paling terkena dampak masuknya produk China yang dilakukan akhir 2010 untuk produk elektronik, furnitur, tekstil dan produk tekstil, logam dan produk logam, serta permesinan, semuanya menunjukkan ada penurunan produksi, penjualan, keuntungan, dan tenaga kerja. Untuk produksi bahkan bisa berkurang sampai 50%. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian ISEI pada 2010 dan Pusat Studi Asia Pasifik UGM pada 2007.

Pengusaha Indonesia, terutama UKM, adalah yang mengalami pukulan paling telak oleh banjirnya produk China. Jumlah UKM dalam lima tahun terakhir terus berkurang. Selain banjirnya produk China, juga masalah yang dihadapi masih sangat banyak. Sebagai gambaran, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa dampak liberalisasi perdagangan, terutama dengan China, telah memaksa beberapa industri mengurangi jumlah tenaga kerjanya karena turunnya produksi.

Contohnya industri alas kaki yang jumlah produksinya turun 20%, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 20% juga, di mana 300.000 orang dari 1,5 juta pekerja alas kaki di industri rumah tangga terpaksa diberhentikan gara-gara ACFTA. Padahal rata-rata penjualan industri alas kaki mencapai Rp27 triliun per tahun untuk pasar dalam negeri.

Sementara itu, masalah yang dihadapi dunia usaha Indonesia adalah masih banyak di antaranya tarif dasar listrik (TDL) yang dianggap mahal dan

kualitasnya buruk, masalah ketenagakerjaan, suku bunga yang tinggi, banyaknya pungutan, pajak, dan retribusi daerah yang besar, infrastruktur yang buruk. Belum lagi penyelundupan barang yang marak. Seperti diketahui, lebih murah barang-barang China dibanding barang hasil industri dalam negeri dikhawatirkan merebut pasar dalam negeri (umumnya barang-barang tekstil dan hasil produksinya), karena bukan hanya konsumen yang akan beralih pada produk China tapi juga para pedagang karena modal yang dikeluarkannya akan lebih sedikit. Dukungan dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan pembiayaan perbankan seperti memberikan kredit dengan bunga hanya 3% untuk pelaku industri atau pengusaha merupakan faktor utama pendorong kelancaran bergulirnya kegiatan industri, selain itu pemerintah China juga berusaha memposisikan diri sebagai pelayan yang menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana menyangkut kegiatan industri. Mulai dari pengurusan surat izin usaha yang dapat diperoleh dengan mudah, hingga penyediaan infrastruktur penunjang guna meningkatkan ekspor seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan ketersediaan tenaga listrik.

Sedangkan produk-produk dalam negeri lebih mahal dibanding produk China, penyebabnya antara lain: banyaknya pungutan liar (pungli) yang harus dibayar oleh para pengusaha, baik yang atas nama pemerintah ataupun tidak; sulitnya memperoleh pinjaman atau kredit untuk modal atau pengembangan usaha, di Indonesia pengusaha menengah-besar memperoleh kredit dengan bunga 12%, sementara pengusaha kecil justru mendapat bunga lebih besar, 15 %. Seharusnya semakin kecil usaha, semakin kecil juga bunga yang dikenakan, tapi lebih jauh, malah lebih banyak pengusaha kecil yang sama sekali ditolak dalam pengajuan kredit; infrastruktur yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang sulit diperoleh. Kesulitan dalam pengurusan surat izin usaha sudah menjadi ciri dari birokrasi di Indonesia, mekanismenya yang mengharuskan melewati lebih dari satu meja bukan hanya memperlambat waktu tapi juga lebih banyak uang yang dikeluarkan, lebih tepatnya berbelit dan korup ciri birokrasi disini. Kemudian infrastruktur yang belum memadai seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan listrik semua masih jauh dalam ketersediaanya dibanding China.

Dari data di atas jelaslah bahwa impor China ke Indonesia lebih besar dari eksportnya, sehingga terjadi defisit perdagangan. Jadi, kekhawatiran tersebut sangat beralasan. Tanpa pemberlakuan ACFTA pun impor China ke Indonesia sudah cukup tinggi, apalagi dengan dihapuskannya tarif bea masuk barang China ke Indonesia.

Indonesia memang masih jauh tertinggal dari China. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari perbandingan indikator makroekonomi antara Indonesia dengan China sebagaimana digambarkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perbandingan Sejumlah Indikator Indonesia-China Tahun 2009

<u>Indikator</u>	<u>Indonesia</u>	<u>China</u>	<u>Satuan</u>
Jumlah Penduduk	240,3	1 340,0	Juta Jiwa
Pertumbuhan Penduduk	1,14	0,66	Persen
PDB per Kapita	4 000	6 500	Dollar AS
Angkatan Kerja	113,3	812,7	Juta Jiwa
Tingkat Pengangguran	7,7	4,3	Persen
Inflasi	5,0	-0,8	Persen
Suku Bunga Kredit Bank Komersil	13,60	5,31	Persen
Pertumbuhan Produksi Industri	2,0	8,1	Persen
Panjang Jalan Raya	391 009	3 600 000	km
Panjang Jalan Tol	772	53 913	km
Produksi Listrik	134,4	3 451,0	Miliar kWh
Konsumsi Listrik	119,3	3 438,0	Miliar kWh

Sumber: Litbang Kompas, Kementerian Perhubungan dan CIA 2010 dalam Kompas 3 Februari 2010

Indikator-indikator diatas menjelaskan betapa China lebih unggul dari Indonesia. Suku bunga kredit bank komersil di China hanya sebesar 5,31 persen, sementara Indonesia jauh lebih tinggi yakni sebesar 13,6 persen. Inilah yang menyebabkan minimnya perkembangan pertumbuhan produksi industri Indonesia yang hanya 2 persen di tahun 2009 sementara China mencapai 8,1 persen. Dari data tersebut, infrastruktur Indonesia juga terlihat jauh tertinggal. Padahal infrastruktur yang baik akan menunjang dalam menciptakan biaya berproduksi murah yang selanjutnya akan menekan harga di tingkat konsumen. Infrastruktur

yang baik juga sangat membantu dalam perluasan pasar hingga mencapai skala perdagangan ekspor-impor yang pada akhirnya meningkatkan daya saing hal ini terlihat pada tabel 1.3 dimana daya saing Indonesia masih jauh di bawah China atau negara ASEAN

Tabel 1.3 Daya Saing Indonesia

NEGARA	PERINGKAT 2011	SKOR	PERINGKAT 2010	PERUBAHAN
Singapura	2	5.63	3	1
Malaysia	21	5.08	26	5
Thailand	39	4.52	38	-1
Indonesia	46	4.38	44	-2
Vietnam	65	4.24	59	-6
Filipina	75	4.08	85	10
Korea Selatan	24	5.02	22	-2
China	26	4.90	27	1
Afrika Selatan	50	4.34	54	4
Brazil	53	4.32	58	5
India	56	4.30	51	-5
Meksiko	58	4.29	66	8
Turki	59	4.28	61	2
Rusia	66	4.21	63	-3

Sumber: WEF (2011)

Berkaitan dengan lemahnya daya saing produk Indonesia. Menteri Perindustrian menjelaskan faktor-faktor penyebab lemahnya daya saing produk Indonesia dibandingkan dengan Cina (Kompas, 9 April 2010) yaitu:

1. Indonesia mengimpor mayoritas bahan baku kapas dari Cina di mana komoditas kapas merupakan bagian dari tanaman domestik Cina.

2. Jam kerja di Indonesia untuk kegiatan padat karya 40 jam per minggu dan 337 hari kerja per tahun, sementara itu di Cina jam kerja 44 sampai 48 jam per minggu dan 347 sampai 350 hari per tahun.
3. Pasokan listrik di Indonesia sering terganggu karena permesinan berusia di atas umur 20 tahun, sementara itu di Cina kurang dari 10 tahun dan telah diadakan peremajaan. Suku bunga di Indonesia 14% sampai 16% setahun sedangkan di Cina hanya 6%
4. Posisi daya saing produk Indonesia menurut Bank Dunia, berada pada peringkat 122 dari 186 negara.

Masalah ini juga dihadapi Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dan pintu masuk terbesar bagi barang impor terbesar di Indonesia mengakibatkan Industri, terutama UKM yang berada di Jakarta merupakan pihak yang langsung merasakan dampak dari ACFTA, terutama di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), serbuan produk-produk Cina berupa kain dan garmen sudah mulai dirasakan oleh pasar dalam negeri sejak awal berlakunya ACFTA. Ancaman ini dirasakan oleh industri tekstil besar maupun Industri Kecil Menengah karena masyarakat akan cenderung lebih memilih tekstil dari Cina yang harganya relatif murah. Selama ini produk kain dan garmen yang berasal dari Cina harganya lebih murah 15%-25% bila dibandingkan dengan produk dalam negeri. Selain itu, produk pakaian jadi impor asal Cina diakui sejumlah pedagang lebih diminati masyarakat karena kualitas dan modelnya yang lebih mengikuti tren (Karina dan Nova, 2010). Namun demikian, ada pula faktor lain seperti selera masyarakat, corak, dan kualitas bahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pembelian produk Cina ini.

Serbuan produk impor semakin besar sejak tahun lalu dengan diberlakukan era pasar bebas China dan Asean yang terus merambah pasar dalam negeri, khususnya di Jakarta. Ini menjadi ancaman yang sangat berat bagi UKM

Penetrasi pasar produk impor yang sangat kuat hingga menyulitkan UKM tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam kesepakatan China Free Trade Area (ACFTA) mengenai tarif bea masuk 0% untuk produk impor tertentu. Produk impor masuk dengan sangat mudah dan tarif bea masuknya 0%, sementara

produk lokal dan pengusahanya terus dibebani pajak dan retribusi yang menjadikan produknya semakin tidak bisa bersaing.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Beberapa kalangan menerima pemberlakuan ACFTA sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. Dalam ACFTA, kesempatan atau ancaman (Jiwayana, 2010) ditunjukkan bahwa bagi kalangan penerima, ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya obyek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk / pedagang Indonesia).

Bila kalangan penerima memandang ACFTA sebagai kesempatan, kalangan yang menolak memandang ACFTA sebagai ancaman dengan berbagai alasan. ACFTA, di antaranya, berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk China yang ditakutkan dan memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Produk dalam negeri yang bersaing ketat di pasar adalah industri kerajinan seperti properti dan furniture, industri hasil hutan yang selama ini menjadi unggulan Indonesia dalam pasar domestik maupun mancanegara, dan yang paling merasakan dampak langsung arus perdagangan bebas dengan Cina adalah industri

tekstil karena industri inilah yang paling diunggulkan di negeri tirai bambu tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri juga cukup menonjol dalam dunia perindustrian sektor tekstil, sehingga secara tidak langsung akan terjadi sebuah perang harga di pasaran dalam negeri. Apalagi produk tekstil Cina biasanya lebih murah daripada produk dalam negeri.

Di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) produk pakaian jadi impor asal Cina diakui sejumlah pedagang lebih diminati masyarakat karena kualitas dan modelnya yang lebih mengikuti tren (Karina dan Nova, 2010). Namun demikian, ada pula faktor lain seperti selera masyarakat, corak, dan kualitas bahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pembelian produk Cina ini.

Dalam menangani masalah UKM, terdapat sebuah pertanyaan ‘setelah mampu menciptakan produk-produk usaha kecil, lalu bagaimana cara yang tepat dalam memasarkannya? Pasalnya, produsen sekaligus pengrajin/pedagang PIK sebagian besar memasarkan produk-produknya bersifat menunggu yaitu, konsumen datang ke PIK, karena PIK adalah suatu kawasan yang ditetapkan pemerintah propinsi DKI Jakarta sebagai Pusat/Perkampungan Industri Kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sekunder seperti pakaian jadi, garmen, alas kaki, aksesoris, dan lainnya dengan harga yang bersaing dan kualitas yang cukup baik. Jadi para pengrajin/produsen PIK bersifat menunggu, bukan menjemput bola, seperti yang mereka lakukan sebelum direlokasi ke PIK.

Sejatinya, pembentukan PIK Pulogadung dibangun untuk sentralisasi industri kecil supaya tata ruang industri di DKI Jakarta dapat tertata dengan baik. Artinya, produk home industry tidak lagi diproduksi ditengah-tengah pemukiman. Hal ini didasarkan pada UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang di mana banyak pengusaha kecil dan industri rumahan (home industry) di wilayah ibukota Jakarta terancam bangkrut.

Namun sejauh ini, produk-produk home industry PIK masih mampu bersaing dengan produk-produk lain yang dijual di pasar modern, meski di kawasan PIK sendiri sudah banyak berdiri toko-toko modern yang menjual produk-produk buatan non-pengrajin PIK, dan produk-produk buatan Cina. Hal ini disebabkan harganya relatif lebih murah dan kualitasnya masih terjaga dengan baik.

Dalam perjalanannya, keberadaannya dan keberlanjutan PIK tidak berjalan dengan baik. Keberadaan PIK yang semula berfungsi untuk perkampungan atau relokasi industri kecil yang ditetapkan pemerintah propinsi DKI Jakarta sebagai Perkampungan barang-barang kebutuhan sekunder dengan harga murah dan berkualitas lebih banyak menunggu konsumen datang. Tidak ada usaha untuk memajukan usahanya seoptimal mungkin. Jiwa kewirausahaan atau menjemput bola guna meningkatkan usahanya tidak ada, karena mereka sangat tergantung pada Pemprop DKI Jakarta yang menjadi pihak berwenang dalam mengelola usahanya di kawasan PIK.

Kawasan PIK pun sudah berubah fungsi di mana keberadaan PIK yang semula berfungsi sebagai pusat atau perkampungan industri kecil tetapi dewasa ini lebih banyak terdapat pengrajin/ pedagang pakaian jadi, garmen dan sepatu di mana sebagian besar produk-produknya itu untuk pasokan pasar Tanah Abang. Artinya PIK sekarang lebih fokus pada perdagangan, bukan pada kerajinan tangan atau industri pengolahan berskala kecil sehingga tujuan pembentukan kawasan PIK sebagai pusat home industry masyarakat kecil Jakarta dinilai gagal. Terdapat juga kasus, produsen/ pengrajin yang tadinya memproduksi produk-produknya sendiri di bengkel-bengkel di kawasan PIK banyak yang beralih profesi menjadi pedagang (broker) untuk barang-barang-barang buatan Cina sebab dinilai lebih menguntungkan dari pada memproduksi sendiri akibat banyak hambatan bagi produsen.

Perubahan profesi dari produsen/ pengrajin menjadi broker atau pedagang di kawasan PIK perlu dibenahi sebab fungsi PIK pada awalnya menampung banyak pengrajin yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Begitu pula, telah terjadi perubahan fungsi kawasan PIK yang cenderung menjadi kawasan perdagangan, bukan lagi perkampungan berbagai jenis industri kecil bisa disebut gagal pula. Dengan kata lain, pembentukan kawasan PIK yang pada awalnya diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien namun sekarang memang masih dikatakan efektif tetapi tidak efisien. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemasaran IKM merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM, selain masalah capacity building, dalam hal ini SDM, teknologi dan permodalan, tetapi

masalah modal ini sudah banyak dikurirkan pemerintah dalam upaya memberdayakan UKM seperti KUR, KUK, BMT dan lainnya.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi, maka seharusnya pemerintah memperhatikan usaha kecil menengah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan potensi dari semua pihak. Di era otonomi daerah saat ini, dimana wewenang untuk mengembangkan usaha kecil menengah di daerahnya. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sangat menentukan kesuksesan perkembangan usaha kecil menengah. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM di kawasan PIK Pulogadung tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dari masalah penelitian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung Jakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung Jakarta

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini tersusunnya strategi pengembangan Kawasan PIK Pulogadung Jakarta dalam rangka peningkatan daya saing daerah. untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai antara lain :

1. Menganalisa kebijakan pengembangan Kawasan PIK Pulogadung Jakarta
2. Menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dan berkaitan dengan pengembangan Kawasan PIK Pulogadung Jakarta

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas :

A. Secara Akademis :

1. Merupakan media bagi upaya implementasi teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan buku-buku teks.
2. Pelengkap literatur yang membahas tema implementasi kebijakan publik dalam mendorong kemajuan ekonomi melalui pengembangan UKM.

B. Secara Praktis :

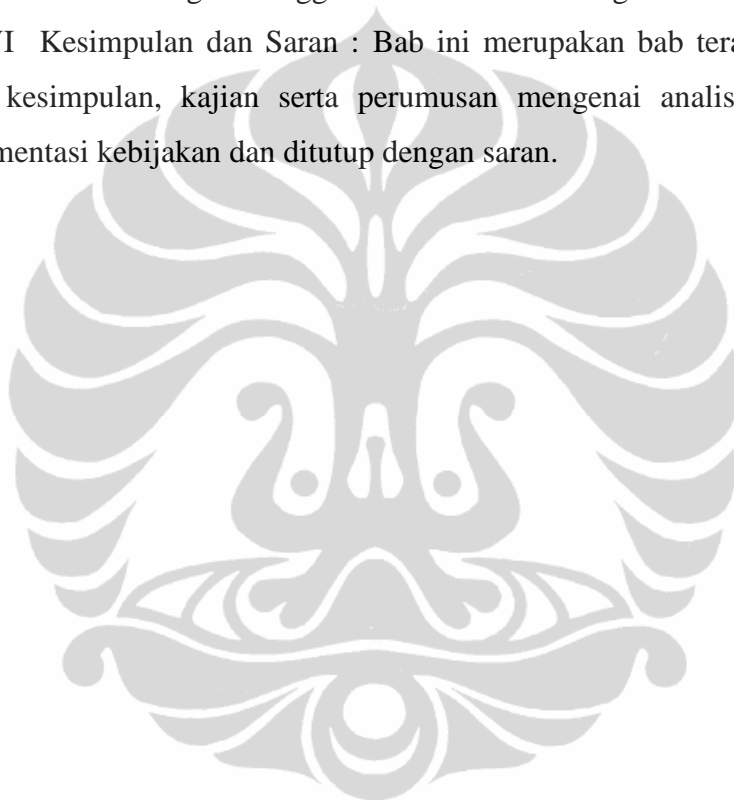
1. Memberikan masukan dan pertimbangan arahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan industri kecil khususnya kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Timur
2. Memberikan gambaran tentang kondisi yang mempengaruhi pengembangan Kawasan PIK Pulogadung Jakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, dengan deskripsi substansi sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.
- b. Bab II Tinjauan Literatur : Bab ini berisi berbagai konsep yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan kawasan, serta memberikan kerangka pemikiran yang menjadi arahan peneliti dalam melakukan penelitian.
- c. Bab III Metode Penelitian : Bab ini berisi tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis/tipe penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka sampel, operasionalisasi konsep, metode analisis data, model analisis, model analisis, lokasi penelitian serta keterbatasan penelitian.

- d. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian : Bab ini berisi gambaran umum wilayah studi kasus dari segi administratif, geografis, perekonomian dan infrastruktur serta karakteristik lainnya dari objek penelitian yang terkait dengan penelitian.
- e. Bab V Pembahasan Hasil Penelitian : Bab ini berisi analisis pengembangan Kawasan PIK Pulogadung Jakarta, terdiri dari analisis untuk tentang kondisi variabel implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri dengan menggunakan analisis rentang kriteria.
- f. Bab VI Kesimpulan dan Saran : Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan, kajian serta perumusan mengenai analisa terhadap implementasi kebijakan dan ditutup dengan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Pengembangan Klaster Untuk Daya Saing UKM Menghadapi ACFTA (I Wayan Dipta)

I Wayan Dipta membicarakan untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing adalah melalui pendekatan klaster/kelompok. Namun masih banyak klaster di Indonesia dalam kondisi pasif. Dalam pendekatan klaster, dukungan (baik teknis maupun keuangan) disalurkan kepada kelompok Usaha Kecil dan Menengah bukan per individu UKM. Pendekatan kelompok diyakini lebih baik karena UKM secara individual biasanya tidak sanggup menangkap peluang pasar dan Jaringan bisnis yang terbentuk terbukti efektif meningkatkan daya saing usaha karena dapat saling bersinergi.

Pengembangan UKM dalam kelompok berhasil meningkatkan kapasitas daya saing usaha UKM, mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UKM.

UKM seringkali mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam pembelian input (seperti peralatan dan bahan baku) dan akses jasa-jasa keuangan dan konsultasi. Ukuran kecil juga menjadi suatu hambatan yang signifikan untuk internalisasi beberapa fungsi pendukung penting seperti pelatihan, penelitian pasar, logistik dan inovasi teknologi; demikian pula dapat menghambat pembagian kerja antar perusahaan yang khusus dan efektif secara keseluruhan fungsi-fungsi tersebut merupakan inti dinamika perusahaan.

Beberapa contoh keuntungan yang dapat ditarik dari sebuah kerjasama dalam klaster adalah:

1. Melalui kerjasama horisontal, misalnya bersama UKM lain menempati posisi yang sama dalam mata rantai nilai (value chain) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil secara individual.

2. Melalui integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata rantai pasokan), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan diri ke bisnis intinya dan memberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal.

2.1.2 Kebijakan Pemerintah Untuk Mendukung UKM dan Koperasi Dalam Menghadapi ACFTA (Teuku Syarif dan Ethy Budiningsih)

Peran yang diharapkan dari pemerintah dalam menghadapi ACFTA adalah menempatkan UKM dan koperasi dalam posisi yang ideal, yaitu sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Reposisi kedudukan UKM dan koperasi tersebut dapat ditumbuhkan melalui perkuatan kondisi internal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UKM dan koperasi. Sedangkan keberhasilan peran pemerintah akan diindikasikan dari pengembangan produktivitas dan efisiensi yang berdampak peningkatan daya saing UKM, baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Peningkatan daya saing secara langsung akan memperbaiki kondisi kesejahteraan UKM, serta meningkatkan sumbangan UKM dan koperasi terhadap pendapatan negara. Aplikasi dari keinginan tersebut secara konkrit adalah dengan melakukan reformasi peraturan perundang-undangan yang mengatur peran UKM dan koperasi dalam rangka revitalisasi. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan adalah: (1) Pemberian kesempatan usaha yang lebih besar kepada UKM dan koperasi; (2) Peningkatan kualitas SDM, UKM dan Koperasi; serta (3) Perkuatan di bidang permodalan teknologi dan informasi.

Dari berbagai masalah tersebut di atas, disarankan agar ada kebijakan pemerintah yang secara lebih spesifik: (1) Menyediakan prasarana yang mampu membuka dan memanfaatkan peluang usaha bagi bagi UKM dan koperasi, (2) Mendorong perkembangan permodalan UKM dan koperasi; (3) Mengembangkan teknologi produksi dan informasi di kalangan UKM dan koperasi; serta (4) Meningkatkan akses UKM dan koperasi terhadap pasar. Selain dari pada itu untuk mengawasi pelaksanaan ACFTA pemerintah dan dunia perlu membentuk tim khusus yang akan memberi masukan tentang manfaat dan dampak dari implementasi ACFTA.

2.2 Kebijakan Publik

Definisi tentang kebijakan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan Negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan Negara, misalnya kebijakan Negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.

Menurut David Easton, mengemukakan bahwa "*policy is the authoritative allocation of value for the whole society*" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan – tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit.

Menurut Thomas R. Dye, Kebijakan publik adalah "*public policy is what ever government choose to do or not to do*", yaitu bahwa apapun pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan itulah yang merupakan *public policy* atau kebijakan pemerintah.

Menurut J. Friedrich, Carl Kebijaksanaan negara adalah suatu arah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Charles Lindblom, pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan itu agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulah yang selanjutnya membuah hasil yang disebut kebijakan.

Sedangkan menurut Amitai Etzioni, menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih

kabur dan abstrak sebagai mana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit.

Menurut Chief J.O. Udoji, merumuskan tentang kebijakan : "Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut kedalam sistem politik, pengupayaan penganan sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan kembali."

Ada tiga alasan mempelajari kebijakan negara menurut Anderson dan Thomas R. Dye ,yaitu:

a. Dilihat dari alasan ilmiah (Scientific reason)

Kebijakan negara dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan negara, berikut proses-proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat.

b. Dilihat dari alasan profesional (Profesional reason)

Maka studi kebijakan negara dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan negara guna memecahkan masalah sosial sehari-hari. Sehubungan dengan ini, terkandung sebuah pemikiran bahwa apabila kita mengetahui tentang faktor yang membentuk sebuah kebijakan negara, atau memberikan atau mengevaluasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran.

c. Dilihat dari alasan politis (Political reason)

Mempelajari kebijakan negara dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut:

a. Bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah;

- b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata;
- c. Kebijakan publik harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu;

Pada akhirnya segala proses yang ada diatas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah aktivitas menilai, mengukur, dan menimbang suatu tujuan atau manfaat dari sebuah kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi kebijakan publik seringkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan (Dwijowijoto, 2008:183-184). Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada analisis implementasi kebijakan pengembangan UMKM.

Menurut Dunn (2000:609) menyatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Kriteria evaluasi dari suatu kebijakan menurut Dunn (2000:610) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, dapat diketahui dengan pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisiensi, dapat diketahui dengan pertanyaan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Kecukupan, dengan pertanyaan sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Kesamaan, dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, dengan pertanyaan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, dengan pertanyaan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Dunn (2000;624-625) menyatakan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan untuk evaluasi serta teknik-tekniknya antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan evaluasi semu dengan teknik evaluasi yang dapat dilakukan melalui:
 - a. Sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks
 - b. Analisis seri waktu terinterupsi
 - c. Analisis seri terkontrol
 - d. Analisis diskontinyu regresi
2. Evaluasi formal, dengan teknik evaluasi:
 - a. Pemetaan sasaran
 - b. Klarifikasi nilai
 - c. Kritik nilai
 - d. Pemetaan hambatan
 - e. Analisis dampak silang
 - f. diskonting
3. Pendekatan valuasi keputusan teoritis, melalui teknik evaluasi berikut:
 - a. Brainstorming
 - b. Analisis argumentasi
 - c. Delphi kebijakan
 - d. Analisis survei pemakai

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat jika diimplementasikan. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan kebijakan. Proses implementasi merupakan proses kebijakan yang rumit, diwarnai dengan benturan antar aktor yang seperti administrator, petugas lapangan, atau kelompok sasaran.

Menurut Stoner, dkk (Dwijowitono, 2003:163) menyatakan bahwa secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan meliputi empat tahapan yaitu:

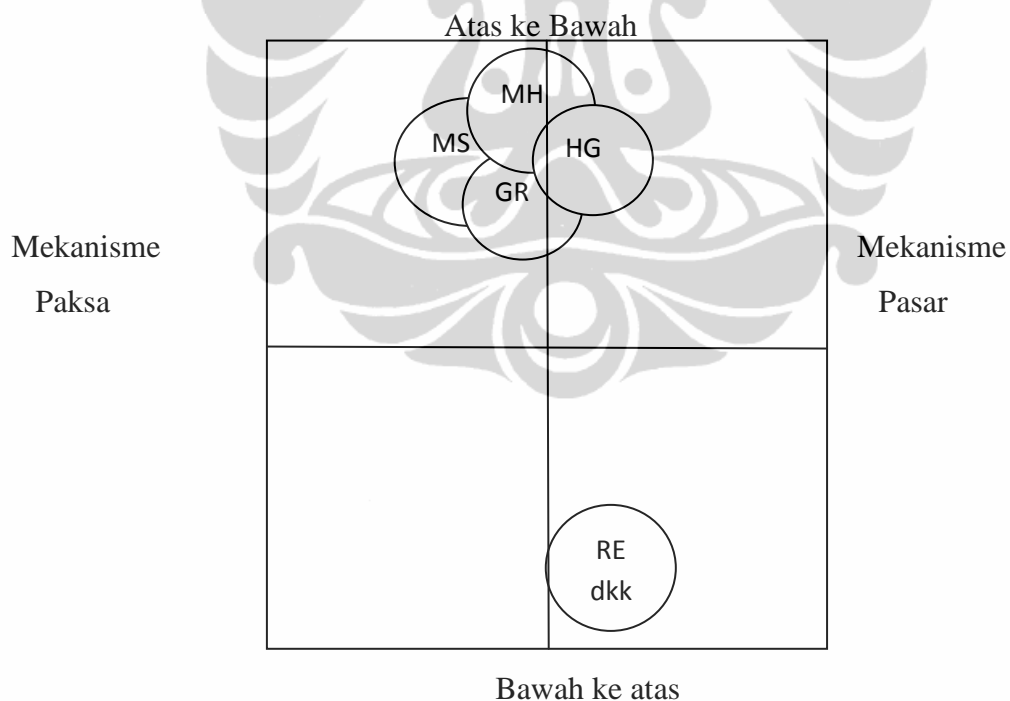
1. Pra implementasi, isu pentingnya antara lain:
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi
 - b. Melembagakan strategi
 - c. Mengoperasionalkan strategi
 - d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2. Pengorganisasian, isu pentingnya antara lain:
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
 - c. Integrasi dan koordinasi
 - d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
 - e. Hak, wewenang, dan kewajiban.
 - f. Pendelegasian
 - g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
3. Pengerakan dan kepemimpinan, isu pentingnya antara lain:
 - a. Efektivitas kepemimpinan
 - b. Motivasi
 - c. Etika
 - d. Mutu
 - e. Kerja sama tim
 - f. Komunikasi organisasi

- g. negosiasi
- 4. Pengendalian, isu pentingnya antara lain:
 - a. Desain pengendalian
 - b. Sistem informasi manajemen
 - c. Pengendalian anggaran / keuangan
 - d. Audit

2.4.1 Model Implementasi Kebijakan

Menurut Dwijowijoto (2003:163), pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis tehnik atau model implementasi kebijakan. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” versus dari “bawah ke atas”, dan pemilihan implementasi yang berpola paksa dan mekanisme pasar.

Gambar 2.1 Peta Model-model Implementasi Kebijakan



Sumber: Dwijowijoto (2003:166)

Model pertama adalah model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Dwijowito, 2003:167). Pemetaan model ini terletak pada terletak pada kuadran “puncak ke bawah” dan lebih berada “mekanisme paksa” daripada di “mekanisme pasar” (Label MH). Model ini mengendaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Model kedua adalah kerangka implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier (Dwijowito, 2003:169). Pemetaan model ini terletak pada kuadran “puncak ke bawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” daripada “mekanisme pasar” (Label MS).

Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (Dwijowito, 2003:170). Pemetaan model ini terletak pada kuadran “puncak ke bawah” dan berada di “mekanisme pasar: (Label HG).

Model keempat adalah model Merilee S. Grindle (Dwijowijoto, 2003:174). Pemetaan model ini terletak pada kuadran “puncak ke bawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” dan “mekanisme pasar” (Label GR). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Model kelima adalah model yang disusun oleh Richard (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hijern dan David O’Porter (1981) (dalam Dwijowijoto, 2003:177). Pemetaan model ini terletak pada kuadran “bawah ke puncak dan lebih berada di “mekanisme pasar” (Label RE, dkk). Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka mengenai tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki.

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Hogwood dan Gunn (1986:197) menyebutkan bahwa secara umum terdapat tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (bad policy). Sejak awalnya perumusannya kebijakan

tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati, informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan tidak lengkap, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya yang buruk (bad execution), misalnya karena kurangnya koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana, dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (bad luck).

Untuk keberhasilan suatu implemantasi kebijakan, menurut Hogwood dan Gunn (1986) ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dukungan positif dari kondisi eksternal
2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dan waktu yang memadai
3. Keterpaduan antara sumberdaya yang diperlukan
4. Kebijakan harus memenuhi persyaratan teoritis
5. Badan pelaksana harus mandiri
6. Adanya kesamaan visi dan tujuan terhadap kebijakan yang diimplentasikan
7. Pembagian tugas yang jelas dan rinci
8. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baikanya
9. Adanya prioritas yang pasti bagi pelaksana

Sementara itu Weimer dan Vining (1992:325) menyebutkan terapat tiga faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. Logika suatu kebijakan.
2. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. Adanya pelaku atau pelaksana yang mampu dan komit terhadap pelaksanaan kebijakan.

Goerge C. Edwards III (1980:9-10) menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel dasar. Dalam bukunya *Implementing Public Policy*, Edward III menyatakan:

“ we shall attempt to answer these important question by considering four critical factors or variabels in implementing public policy: comunication critical factors or variabels in implementing public policy: comunication, resources, distition or atitudes and bureacratic structure.”

” kita seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mempertimbangkan empat faktor atau variabel utama dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.”

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas oleh para ahli di atas, dapat dilihat bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, tetapi tidak semua faktor-faktor tersebut relevan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan. Wibawa, dkk (1994:18) menyatakan bahwa model implementasi tidak perlu diaplikasikan mentah-mentah, tetapi dapat disintesis sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penulis menarik sebuah asumsi bahwa dalam sebuah evaluasi implementasi kebijakan pengembangan UKM dalam menghadapi ACFTA pada kawasan PIK Pulogadung dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu: (1) sumberdaya. (2) komunikasi dan (3) kepatuhan.

1. Variabel Sumberdaya

Salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumberdaya (Edwards, 1980:10-11). Sumberdaya tersebut terdiri atas empat bagian, yaitu jumlah dan kemampuan pelaksana/staf, informasi, kewenangan, fasilitas-fasilitas (sarana dan prasarana), dan anggaran. Berdasarkan pendapat ini, maka untuk menganalisa variabel sumberdaya dalam penelitian ini difokuskan pada fasilitas-fasilitas (sarana dan prasarana).

Sarana dan prasarana merupakan salah satu jenis sumberdaya yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Para pelaksana harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan sebuah kebijakan atau program. Mengenai perlunya sarana dan prasarana, Edwards (1980:82) mengemukakan:

“A lack of essential buildings, equipment, supplies or land can hinder implementation as much as can inadequacies in the other resources we have examined”

“Kurangnya sarana dan prasarana yang penting dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan, sama seperti ketidakcukupan sumberdaya lain yang telah kami teliti.”

2. Variabel Komunikasi

Salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi (Edwards, 1980:9-10). Dalam hal komunikasi, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Untuk mengetahui dengan baik, maka perintah yang mereka terima baik yang dituangkan dalam keputusan-keputusan maupun dasar hukum lainnya haruslah jelas. Selain itu, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaannya harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Selain itu, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaannya harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Hal ini akan berhubungan dengan kemampuan para pelaksana.

Menurut Edwards III (1980:26), perintah kebijakan harus diterima dengan jelas. Perintah harus secara jelas menerangkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Perintah-perintah kebijakan harus konsisten agar penerapan suatu kebijakan efektif (Edwards, 1980:17-43). Semakin tinggi daya respon pelaksana terhadap pesan yang disampaikan, akan semakin baik implementasi dari suatu kebijakan. Untuk dapat menarik respon yang tinggi, diperlukan keakuratan dan kecepatan pesan yang akan disampaikan dan yang terpenting adalah pesan harus sampai.

Dalam penelitian ini, pertanyaan mengenai komunikasi didasarkan pada transparansi dan akses mendapatkan informasi baik. Menurut Santosa (2001:14), negara perlu memberikan jaminan terhadap lima hal, yaitu (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (2) hak untuk memperoleh informasi; (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (4) kebebasan berekspresi yang salah satunya terwujud dalam kebebasan pers; dan (5) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan hak-hak di atas.

Selain transparansi, penelitian ini juga menggali informasi mengenai kelancaran komunikasi.

Menurut Scott (Thoha,1990:127), kegagalan komunikasi dapat disebabkan (a) kelebihan beban komunikasi (*communication overload*), (b) ketepatan waktu yang dibutuhkan (*timing*), dan (c) bisa tidaknya memotong jalur komunikasi (*short circuiting*). Komunikasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap perilaku para pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi baik organisasi publik maupun privat. Kerjasama hanya dapat berlangsung jika ada kesatuan pendapat, interpretasi serta pemahaman yang jelas terhadap tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Interpretasi serta pemahaman yang sama akan mendorong orang untuk melakukan *action* atas kegiatan yang sama seperti apa yang diharapkan. Edwards (1980:17) menyatakan *Policy decision and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed.*

3. Variabel Kepatuhan

Kepatuhan dalam implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan banyak ditentukan oleh konsistensi dan ketaatan para pelaksana kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan serta daya tanggap untuk memenuhi kebutuhan publik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana aparat pelaksana mau dan mampu memahami tuntutan masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat dan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk dapat menciptakan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan kekuasaan, insentif atau uang. Untuk organisasi yang bersifat tidak mencari keuntungan, kepatuhan hendaknya ditumbuhkan dari kesadaran untuk menjalankan kegiatan dengan maksud menciptakan *belief* yang sudah terbentuk dengan baik di dalam diri para aktor. Jika *belief* belum terbentuk dengan baik, maka kepatuhan dapat ditumbuhkan melalui pemberian sanksi. Jika melanggar peraturan, maka diberikan sanksi yang dapat berupa pengenaan

denda berupa uang, atau pemberian reward berupa penghargaan maupun prestise jika mematuhi aturan.

Sanksi akan efektif jika dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan untuk melakukan pengawasan (kontrol).

Jadi, evaluasi implementasi kebijakan publik secara sederhana meliputi penilaian mengenai tujuan dan sasaran kebijakan publik, kegiatan dikaitkan dengan berbagai sumber daya dan dana, program yang dikembangkan, dampak yang timbul, dan kinerja yang dicapai sebagai hasil implementasi kebijakan. Selain dari pada itu, dalam evaluasi juga dilihat perubahan yang ditimbulkan serta kemajuan yang dicapai dari penerapan kebijakan tersebut.

2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah

Istilah industri kecil atau small scale industry memiliki banyak terjemahan. Mintzberg (Jannah, 2004:1) mendefinisikan sektor usaha kecil sebagai organisasi yang memiliki entrepreneurial organization dengan ciri-ciri antara lain struktur organisasi yang sederhana, krakter khas elaborasi, memiliki hirarki manajer kecil, aktivitasnya hanya sedikit diformalkan, sangat sedikit menggunakan proses perencanaan, dan jarang sekali mengadakan pelatihan karyawan dan manajer, sukar membedakan aset pribadi dan aset perusahaan, serta sistem akuntansi perusahaan yang kurang baik, bahkan tidak memiliki.

Menurut Thoha (Jannah, 2004:2), pendefinisian dan pengkriteriaan industri kecil di Indonesia masih berbeda antara satu institusi dengan institusi lain. Misalnya, Deperindag membatasi kriteria industri kecil pada investasi perusahaan sampai 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan harus milik WNI), dan Badan Pusat Statistik menggunakan kriteria jumlah tenaga kerja dan yang mengerjakan pekerja antara 1 sampai 19 orang. Ini pun kemudian digolongkan ke dalam dua sub kategori. Pertama, industri rumah tangga, yaitu unit usaha dengan pekerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Kedua, pabrik kecil, yaitu unit usaha dengan jumlah tenaga kerja anantara 5 sampai 19 orang.

Barney (Jannah,2004:5) menuliskan bahwa government policy as a barrier to entry. Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menyebabkan semakin maju atau semakin mundurnya berbagai bidang, termasuk bidang industri ketika sebuah regulasi dibuat untuk menghambat pengusaha kecil lain untuk masuk, maka kemungkinan yang terjadi adalah monopoli. Ketika keikutsertakan semua pihak dibebaskan, maka akan terjadi persaingan yang sehat. Namun demikian, hal ini tetap harus diatur pemerintah untuk mengawasi dan mengatur jalannya perekonomian yang ada terutama pembinaan sektor kecil.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto

(PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Kemampuan UKM Indonesia untuk menembus pasar global atau meningkatkan eksportnya atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh suatu kombinasi antara faktor keunggulan kompetitif. Inti dari paradigma keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dapat dijelaskan bahwa keunggulan suatu negara atau industri di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komperatif yang dimilikinya yang diperkuat dengan proteksi atau bantuan pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya (Tambunan, 2002:7)

Menurut Tambunan (Tiktik Sartika Partomo, Juni 2004, Working Paper Series No.9 hal: 6. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifat entrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empat bagian, yakni :

1. Livelihood Activities : UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar.
2. Micro enterprise : UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship (kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.
3. Small Dynamic Enterprises : UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu an dua. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor Fast Moving Enterprises : ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar.

Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkan perhatiannya pada UKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap materi pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UKM kategori tiga dan empat adalah untuk mengembangkan mereka menjadi usaha skala menengah. Secara konseptual penulis menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan UKM. Pertama, sumber daya manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua, manajemen, pengertian manajemen dalam praktek bisnis meliputi tiga aspek yakni berpikir, bertindak, dan pengawasan.

2.6 Kebijakan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah

Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami perubahan beberapa. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) ditetapkan program pokok pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai berikut:

1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.

Program ini bertujuan untuk membukakan kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya

PKMK. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksidan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan ekonomi.

2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses PKMK terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi.

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif.

Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas PKMK.

Sebelum dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi ditangani langsung oleh jajaran Departemen Koperasi dan UKM yang berada di daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya sekedar memfasilitasi, kalau tidak boleh dikatakan hanya sebagai penonton. Semua kebijakan dan pedoman pelaksanaannya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dari Pusat, sementara aparat di lapangan hanya sebagai pelaksana. Pembinaan yang diberikan tersebut cenderung dilakukan secara seragam terhadap seluruh Daerah dan lebih bersifat mobilisasi dibandingkan pemberdayaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi.

2.6.1 Pola Pembinaan UKM dalam Rangka Otonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil, menengah dan koperasi tersebut. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi perkembangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional dan nasional. Disamping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pengalaman pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang telah dilaksanakan selama ini.

Pola pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rangka Otonomi Daerah antara lain adalah :

1. Pelaksana program-program pokok pengembangan UKMK yang telah diatur di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang meliputi ; Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif, dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Pelaksanaan program-program pengembangan UKMK yang disusun dengan memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta kemampuan Daerah.
3. Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, lembaga keuangan, lembaga akademik dan sebagainya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
4. Pemberdayaan SDM aparatur Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi.
5. Pengembangan wilayah produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing.
6. Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu

memberikan kontribusi bagi pengembangan implementasi kebijakan Otonomi Daerah.

7. Sosialisasi tentang kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Cooperation) dan WTO (World Trade Organization) kepada seluruh kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi.

Akhirnya kita berharap melalui pola pembinaan yang dikembangkan tersebut didapat outcomes yang bersinergi antara kebijakan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga antara kebijakan Otonomi Daerah dengan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi terdapat simbiosis mutualisma. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah akan menentukan bagi keberhasilan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi serta sebaliknya pelaksanaan pembinaan UKM akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.7 Membangun Keunggulan Daya Saing Nasional

Daya saing nasional adalah tingkat sampai sejauh mana suatu negara dapat memenuhi permintaan pasar internasional dalam memproduksi barang dan jasa, sementara itu juga mempertahankan atau meningkatkan pendapatan riil penduduknya. Michael Porter (1990) menggunakan teori keunggulan kompetitif untuk menjelaskan pembangunan ekonomi bangsa-bangsa dan perbedaan-perbedaan nasional dalam pertumbuhan dan kekayaan. Ada empat tahapan dan ciri-ciri proses pengembangan menurut Porter, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tahap-Tahap dari Pembangunan kompetitif Nasional

Penggerak Pembangunan	Sumber Keunggulan Kompetitif	Contoh-Contoh
Kondisi- Kondisi Faktor	Faktor-faktor produksi dasar (seperti: SDA, lokasi geografis, tenaga kerja tidak terampil)	Kanada, Australia, Singapura, Korea Selatan sebelum tahun 1990
Investasi	Investasi dalam peralatan modal, dan transfer teknologi dari luar negeri , juga diperlukan adanya dan konsensus nasional yang lebih memilih investasi daripada konsumsi	Jepang selama tahun 1960-an. Korea Selatan selama tahun 1980-an.
Inovasi	Keempat determinan keunggulan nasional semuanya berinteraksi untuk menggerakkan penciptaan teknologi baru	Jepang sejak akhir tahun 1970-an; Italia sejak awal tahun 1970-an; Swedia dan Jerman selama kebanyakan periode pasca perang.
Kekayaan	Tekanan pada pengelolaan kekayaan yang ada menyebabkan berbaliknya dinamika berlian. Keunggulan kompetitif terkikis karena inovasi tertekan, investasi dalam faktor-faktor yang maju menjadi lamban, persaingan menurun, dan motivasi perorangan melemah.	Inggris selama periode pasca-perang, AS, Swiss, Swedia, dan Jerman sejak tahun 1980.

Sumber: Robert M. Grant, "Porter's 'Competitive Advantage of Nations': An Assessment," *Strategic Management Journal*, 12(1991), Table 1, p. 540.

Menurut pandangan Porter, kekayaan nasional terkait erat dengan "peningkatan" keunggulan kompetitif. Pada awalnya suatu bangsa mencoba mengeksploitasi kondisi-kondisi faktor-faktornya untuk mendorong laju pembangunannya. Pada tahap berikutnya bangsa tersebut mulai menarik teknologi asing dan mengadakan investasi dalam peralatan modal, sambil mendorong lebih banyak tabungan. Industri-industri yang padat karya dan padat sumber daya diganti oleh industri yang lebih intensif teknologi. Perusahaan yang paling berhasil mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi melalui diferensiasi produk dan jasa. Perusahaan-perusahaan ini memusatkan perhatiannya pada kegiatan ilmu pengetahuan di luar negeri.

Daya saing nasional ini tidak terlepas dari daya saing perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di dalam negara atau wilayah yang bersangkutan dalam berkompetisi dan menggerakkan kegiatan ekonominya. Kompetisi dalam suatu industri ditentukan oleh struktur dari masing-masing

industri. Struktur industri mengarah pada hubungan antara lima kekuatan yang mengendalikan perilaku perusahaan dalam berkompetisi di suatu industri. Bagaimana perusahaan berkompetisi dengan industri lainnya secara langsung berhubungan dengan lima kunci kekuatan yang dikembangkan oleh Michael Porter sebagai berikut:

a. Ancaman Pendatang Baru dalam Industri

Profitabilitas perusahaan cenderung tinggi ketika perusahaan lainnya terhalangi untuk memasuki industri. Oleh Karena itu, untuk mengurangi pendatang baru, perusahaan yang ada dapat membangun halangan untuk memasuki industri, yakni dalam bentuk : (1) persyaratan modal untuk masuk dalam industri, (2) skala ekonomi industri yang ada saat ini, (3) diferensiasi produk yang dilakukan oleh industri yang ada saat ini, (4) biaya pengganti untuk mempengaruhi pembeli beralih dari industri yang ada saat ini, (5) identitas merek dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang ada saat ini di benak konsumen, (6) Ketersediaan akses untuk saluran distribusi, (7) Keyakinan untuk mendapatkan kemanfaatan yang berlanjut dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen oleh industri yang ada saat ini.

b. Posisi Tawar Pelanggan

Pelanggan produk atau jasa suatu industri dapat menekan perusahaan yang ada untuk mendapatkan harga yang rendah atau pelayanan yang lebih baik dari penyedia (industri) apabila : (1) pelanggan memiliki pengetahuan yang baik tentang kualitas produk dan memiliki informasi yang cukup mengenai produk atau jasa yang ditawarkan sehingga dapat mengevaluasi produk atau jasa tersebut dengan penjual lainnya. (2) Ukuran pembelian yang dilakukan oleh pelanggan (banyaknya uang yang digunakan pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan), (3) kurang dirasakannya fungsi produk bagi pelanggan (kemanfaatan produk), (4) jumlah pelanggan lebih terkonsentrasi daripada jumlah penyedia produk atau jasa (oligopsoni).

c. Posisi Tawar Pemasok (supplier)

Pemasok dapat mempengaruhi posisi tawar apabila: (1) produk mereka krusial (penting) bagi pelanggan, (2) mereka dapat memasang harga tinggi untuk biaya penggantian (peralihan ke pemasok lain), (3) Mereka lebih terkonsentrasi daripada jumlah pelanggan.

d. Intensitas Persaingan Antara Perusahaan dalam Industri

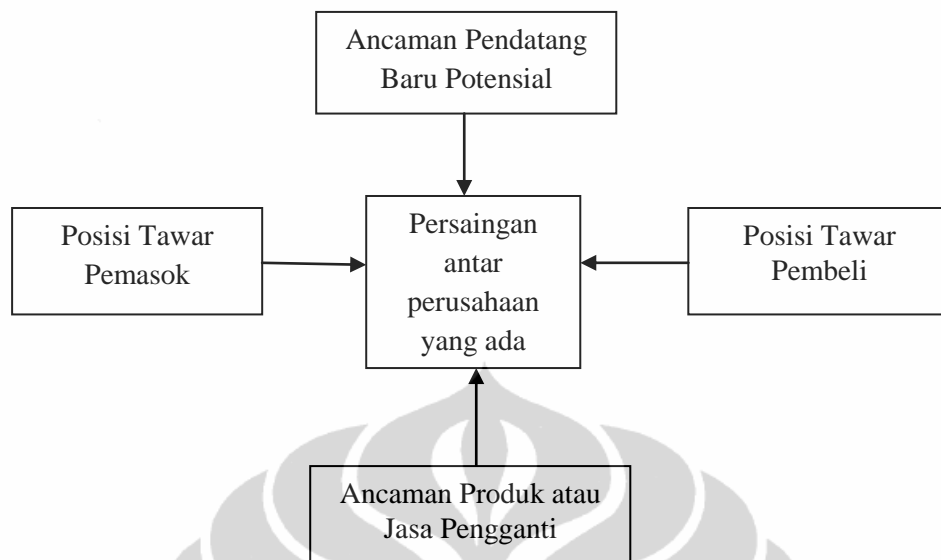
Intensitas persaingan dapat mempengaruhi biaya pasokan, distribusi dan ketertarikan pelanggan, dan kemudian secara langsung mempengaruhi profitabilitas. Persaingan antar perusahaan cenderung saling mematikan dan profitabilitas industri rendah apabila: (1) Tidak adanya pemimpin yang jelas dalam pasar (keseimbangan kekuatan antara perusahaan dalam pasar), sehingga dapat terjadinya perang harga antara industri yang satu dengan yang lainnya, (2) jumlah pesaing yang terlalu banyak, (3) Pesaing beroperasi dengan biaya tetap yang tinggi yang dapat memberikan motivasi untuk memaksimalkan kapasitas mereka dan cenderung memotong harga ketika mereka memiliki kelebihan kapasitas. (4) Sulitnya untuk keluar dari industri, (5) pesaing memiliki sedikit peluang untuk bisa melakukan diferensiasi produk, (6) Pertumbuhan penjualan yang rendah sehingga tingkat persaingan untuk merebut pasar sangat tinggi.

e. Potensi untuk Produk atau Jasa Pengganti

Produk atau jasa pengganti dapat mengancam profitabilitas perusahaan yang ada saat ini jika mereka dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh industri yang ada saat ini, atau memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga yang sama dengan yang ditawarkan oleh industri saat ini.

Model lima kekuatan Porter ini merupakan salah satu konsep yang paling efektif digunakan untuk menilai kondisi lingkungan yang kompetitif dan untuk menggambarkan sebuah struktur industri dalam suatu wilayah yang berdaya saing. Model lima kekuatan Porter ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.2 Model Ketertarikan Industri Lima Kekuatan Porter



Sumber: Cynthia A. Montgomery and Michael Porter. *Strategy Seeking and Securing Competitive Advantage*. (Boston: Harvard Business School Publishing, 1991). h. 141

2.8 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah mengandung arti yang luas, namun pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah telah diterapkan di berbagai negara melalui berbagai disiplin ilmu. Konsep-konsep yang telah pernah berkembang sebelumnya umumnya didominasi oleh ilmu ekonomi regional, walaupun sesungguhnya dalam penerapannya akan lebih banyak tergantung pada potensi pertumbuhan setiap wilayah yang akan berbeda dengan wilayah lainnya, baik potensi SDA, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan lainnya.

Beberapa pendekatan pengembangan wilayah berdasarkan karakter dan sumber daya daerah yang bersangkutan, antara lain dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya

Konsep ini menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut :

- a. Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia

Bagi wilayah yang memiliki SDM yang cukup banyak namun lahan dan SDA terbatas maka labor surplus strategy cukup relevan untuk diterapkan. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya dan mengupayakan ekspor tenaga kerja ke wilayah lain.

- b. Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam

Strategi ini mengupayakan berbagai SDA yang mengalami surplus yang dapat diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk bahan mentah maupun bahan setengah jadi. Hasil dari ekspor SDA ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di wilayah tersebut, misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi atau jasa.

- c. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen

Strategi pengembangan wilayah berdasarkan pengembangan lembaga keuangan yang kuat dan pengembangan sistem manajemen yang baik, yang dapat ditempuh oleh wilayah yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan manajemen tersebut.

- d. Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam

Wilayah dengan potensi-potensi pantai dan pemandangan yang indah, seni budaya yang menarik dan unik, dapat mengembangkan wilayahnya dengan cara membangun transportasi, perhotelan dan restoran, industri-industri kerajinan, pelayanan travel, dan lainnya yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan.

2. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan

Konsep ini menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat domestik maupun internasional.

3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi

Konsep ini menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan bidang-

bidang lain. Pembangunan ekonomi ini dilaksanakan dalam kerangka pasar bebas/pasar persaingan sempurna.

4. Pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan

Peranan setiap pelaku pembangunan menjadi fokus utama dalam pengembangan wilayah konsep ini. Pelaku pembangunan ekonomi tersebut dapat dipilah menjadi lima kelompok yaitu : usaha kecil/rumah tangga (household), usaha lembaga sosial (nonprofit institution), lembaga bukan keuangan (nonfinancial institution), lembaga keuangan (financial institution), dan pemerintah (government). Di Indonesia, di samping kelima pelaku tersebut, juga terdapat pelaku pembangunan ekonomi lain yaitu koperasi (UUD 1945).

Dengan demikian, pengembangan suatu wilayah atau kawasan harus didekati berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor kunci yang menjadi syarat perkembangan kawasan dari sisi internal adalah pada pola-pola pengembangan sumber daya manusia, informasi, sumber-sumber daya modal dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan pemerintahan, serta berbagai kerjasama dan kemitraan yang harus digalang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, faktor-faktor kunci yang menjadi syarat perkembangan kawasan dari sisi eksternal adalah perhatian pada masalah kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah; perdagangan bebas terutama masalah pengembangan produk dalam pasar bebas untuk meningkatkan daya saing seperti peningkatan kualitas unsur-unsur sumber daya manusia, pengembangan riset dan teknologi termasuk teknologi informasi, pengembangan sumber-sumber daya modal untuk membiayai investasi berbagai inovasi pengembangan produk; serta otonomi daerah dengan fokus berbagai kebijakan yang mendukung iklim usaha investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan produk antar berbagai pelaku, daerah, secara vertikal dan horisontal, serta pengembangan kemampuan kelembagaan pengelolaan ekonomi di daerah secara profesional.

Sebuah wilayah yang berdaya-saing adalah wilayah yang mampu mengalahkan dan memimpin pasar setelah melakukan penyesuaian strategis yang

tergantung kepada kekuatan pendorong, kapabilitas, serta kompetensi inti kawasan dan produk yang diunggulkan.

Strategi pembangunan ekonomi wilayah harus dapat mengarahkan secara efektif investasi dan subsidi sektor pemerintah dan swasta pada kawasan-kawasan strategis yang telah kuat dan mengakar di wilayah tersebut dan telah membentuk klaster-klaster industri . Pemerintah dapat mengarahkan sumber daya masyarakat yang terbatas menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dan menjadikan pertumbuhan industri yang tinggi pula. Hal ini ditandai dengan meningkatnya upah di kawasan-kawasan strategis yang secara signifikan memiliki tingkat perbedaan yang tinggi dibanding dengan upah rata-rata di wilayah tersebut.

2.8.1 Pemahaman Klaster

Menurut Porter (1998) Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi. Sedangkan menurut Schmitz (1997) klaster didefinisikan sebagai grup perusahaan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara Enright, M,J, 1992 mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang sejenis/sama atau yang saling berkaitan, berkumpul dalam suatu batasan geografis tertentu.

Pengertian klaster (JICA, 2004)⁵ juga dapat didefinisikan sebagai pemusatan geografis industri-industri terkait dan kelembagaan-kelembagaannya. Perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi telah mengurangi pentingnya kedekatan secara geografis, oleh karena itu batasan geografi menjadi fleksibel tergantung dari kepentingannya, yaitu:

- 1) Merujuk dari segi usaha (business), klaster diidentifikasi atas daerah yang luas di sepanjang pertalian-pertalian industri. Ini artinya bisa mencakup satu desa, kabupaten, provinsi bahkan lintas provinsi yang berkaitan

- 2) Sedangkan dipandang dari kepentingan pembangunan daerah, batasan geografis dipergunakan dalam konteks kontribusinya terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan penduduknya.

2.8.2. Jenis Klaster

Klaster adalah berkumpulnya industri dan lembaga yang saling berhubungan satu-sama lain yang membuat keterkaitan saling mendukung dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Kemampuan untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan akan menentukan daya saing suatu perusahaan, dan klaster industri sangat dikenal kondusif bagi berkembangnya kemampuan seperti itu. Lebih lanjut, Porter (1998) mengatakan bahwa klaster diliputi oleh suatu susunan industri terkait dan entitas lainnya yang penting untuk daya saing, termasuk instansi pemerintah dan lainnya seperti universitas, lembaga standar, pemikir, penyedia latihan ketrampilan, dan asosiasi perdagangan. Alasan mendasar bagi klaster adalah lokasi bersama perusahaan membangun eksternalitas positif untuk produktivitas. Sebagaimana Marshall (1890) katakan bahwa eksternalitas positif paling permanen terjadi ketika perusahaan saling berhubungan satu sama lain. Ketika paralel tetapi perusahaan tidak sejenis ada dalam lokasi bersama dalam suatu kawasan, maka mereka akan membuat beragam solusi untuk masalah yang sama, atas dasar informasi sama tetapi persepsi dan lingkup kompetensi berbeda.

Dari berbagai kajian yang ada bahwa industri klaster yang berkembang secara alami memberikan keuntungan tertentu yang membentuk dan mendorong terjadinya daya saing baik nasional maupun global. Keuntungan seperti ini sering disadari sebagai bentuk aglomerasi eksternalitas, sebagaimana ada tiga bentuk aglomerasi yang diklasifikasikan oleh Glaeser et al. (1992).

- 1) Tipe pertama adalah eksternalitas Marshall-Arrow-Romer, yang menekankan spesialisasi industri dalam kawasan. Eksternalitas seperti ini memungkinkan setiap perusahaan berpartisipasi dalam klaster industri mengurangi biaya investasi dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan spesialisasi dalam segmen yang kecil dari total rantai nilai tambah. Perusahaan yang lebih kecil dalam klaster mencari jalan

melakukan diferensiasi, menguasai ceruk pasar yang unik yang belum pernah dieksploitasi, dan secara bersama mengamankan kontrak yang besar yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh suatu perusahaan sendirian. Proses seperti ini mendorong daya saing, kolaborasi, dan inovasi, meningkatkan prospek sukses jangka panjang bagi usaha kecil yang menjadi bagian klaster dinamis.

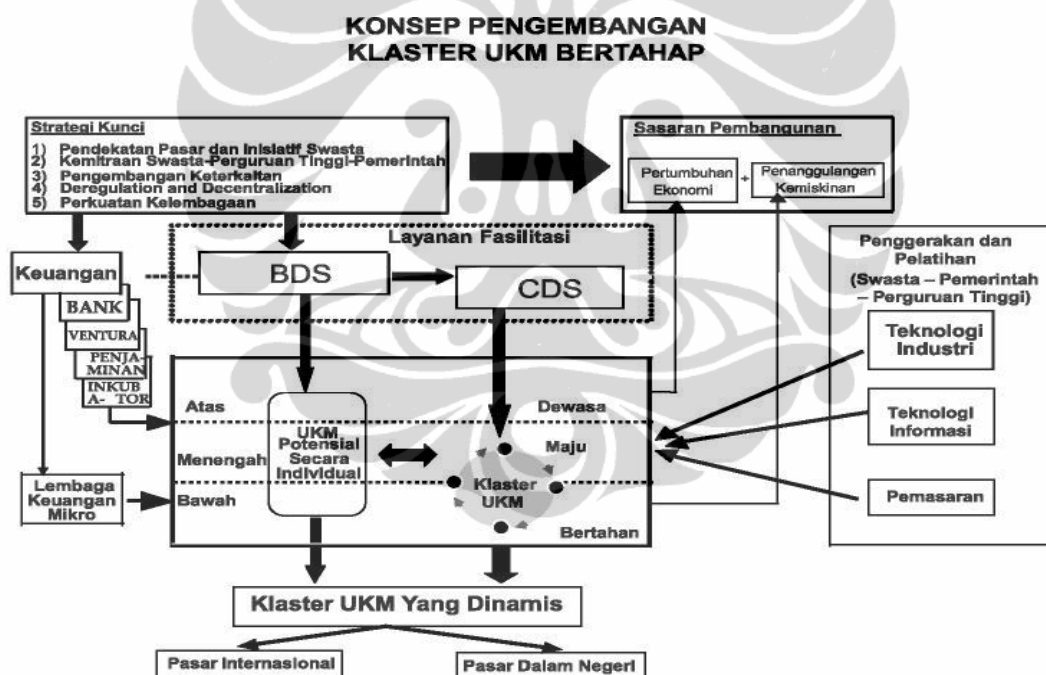
- 2) Tipe kedua dari eksternalitas adalah tipe Porter, yang muncul dari spesialisasi regional dan diferensiasi produk. Eksternalitas seperti ini biasanya berkembang terutama karena persaingan antar perusahaan setempat, yang selanjutnya mendorong terjadinya difusi ilmu pengetahuan secara cepat dan adopsi ide-ide yang baru. Lebih lanjut, pengembangan klaster industri mungkin mengarah pada kompetisi yang simultan dan kolaborasi dalam penyediaan produk dan jasa inovatif, dan berkembangnya secara berkelanjutan keuntungan kompetitif dalam bidang seperti teknologi, kualitas tenaga kerja, metode produksi, waktu pengiriman dan pengadaan sumberdaya produktif.
- 3) Tipe ketiga adalah eksternalitas beragam, yang berkembang karena pertukaran ide-ide antara pelaku usaha dalam kawasan. Sebagaimana dicatat oleh Jovanovic dan Rafael (1989), ide-ide ini biasanya berkembang dari keragaman pengetahuan antar perusahaan dan orang.

Ada banyak jenis klaster dalam hubungannya dengan pengembangan wilayah. Dua kategori yang paling umum ditemui adalah klaster regional dan klaster bisnis.

- 1) Klaster regional adalah kelompok perusahaan yang muncul dalam/dibentuk oleh satu batas wilayah perekonomian tertentu. Klaster ini memperoleh keunggulan dari interaksi antar perusahaan, penggunaan asset bersama, dan/atau penyediaan layanan bersama.
- 2) Klaster bisnis adalah sekelompok perusahaan yang kendati memiliki bisnis yang saling berbeda tetapi memiliki aktivitas yang saling berhubungan. Kemudian secara bersama-sama melakukan sinergi dan proses belajar yang saling menguntungkan.

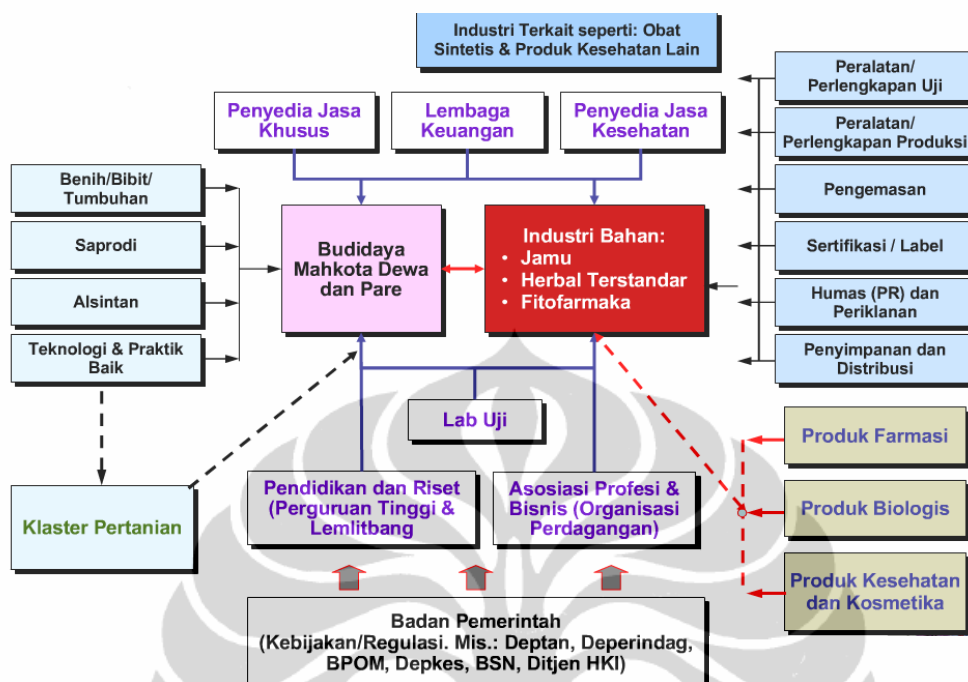
Klaster tidak bersifat sama. Beberapa klaster melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga nirlaba. Beberapa klaster bersifat urban, sedangkan yang lain menonjolkan karakter pertanian. Besar kecilnya skala klaster akan berdampak langsung pada karakter ekonomi wilayah. Keberhasilan suatu klaster, menurut Rosenfeld (1997), dapat dilihat pada beberapa faktor-faktor penentu kekuatan klaster tersebut, yaitu: (1) spesialisasi, (2) kapasitas penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kegiatan klaster wilayah, (3) pengetahuan dan keterampilan, (4) pengembangan sumber daya manusia, (5) jaringan kerjasama dan modal sosial, (6) kedekatan dengan pemasok, (7) ketersediaan modal, (8) jiwa kewirausahaan, serta (9) kepemimpinan dan visi bersama.

Gambar 2.3 Konsep Pengembangan UKM



Sumber: Dipta (2009) diambil dari hasil studi JICA (2002)

Gambar 2.4 Peta Potensi Klaster Industri



Sumber : Taufik (2004)

2.8.3 Contoh Kawasan Industri

Untuk memberikan gambaran berikut ini beberapa contoh sukses pengembangan klaster UMKM, seperti (1) Chinese Taipei's Hsinchu Science-based Industrial Park (HSIP), (2) Silicon Valley di Amerika Serikat, (3) Malaysia's Penang dan Lembah Kelang cluster, dan (4) Cluster Hamamatsu di Jepang. Contoh ini diperkenalkan untuk memperoleh pemahaman dan menarik beberapa pelajaran dari pengalaman pembangunan klaster UMKM.

1. Hsinchu Science-based Industrial Park (HSIP)

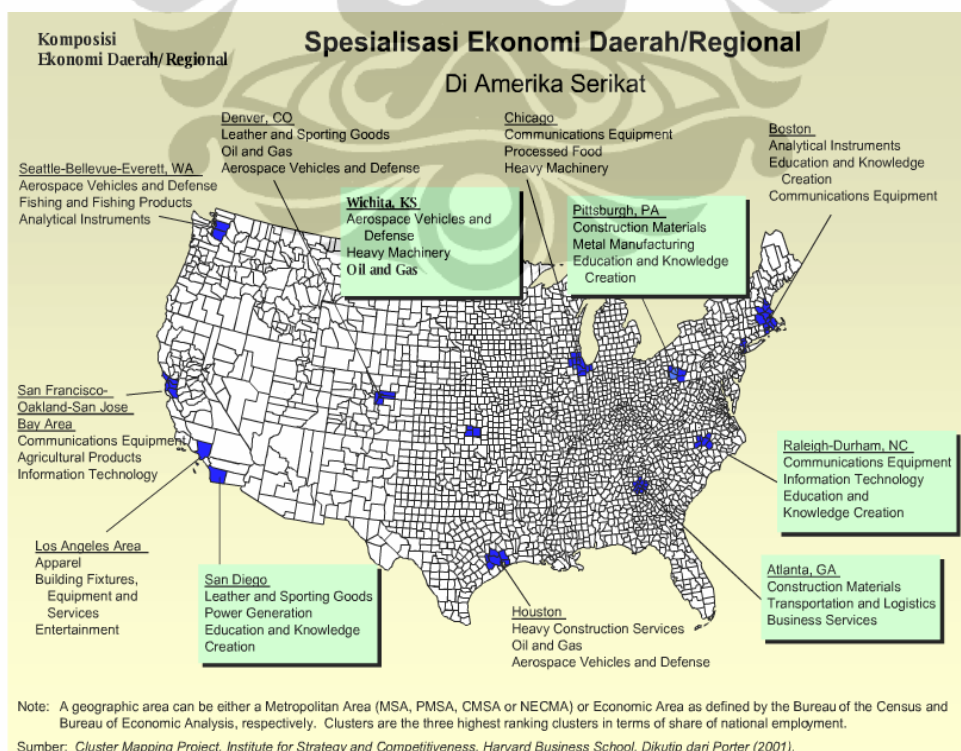
Setelah terjadinya krisis minyak pertama pada tahun 1973, pemerintah Chinese Taipei menyadari pembangunan industri yang dilakukan selama ini memiliki pondasi yang lemah, struktur padat karya, menentukan hancurnya ekonomi pada periode resesi berkepanjangan. Atas dasar tersebut, Chinese Taipei perlu mengejar kebijakan pengembangan hi-tech, nilai tambah tinggi, pengembangan industri, dan dalam rangka untuk menarik investasi dan transfer teknologi dari hi-tech industri, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang sesuai dan menarik.

Mereka akhirnya memutuskan untuk menciptakan kawasan industri berbasis ilmu pengetahuan mirip dengan contoh mapan Silicon Valley di California

2. Silicon Valley, U.S.A.

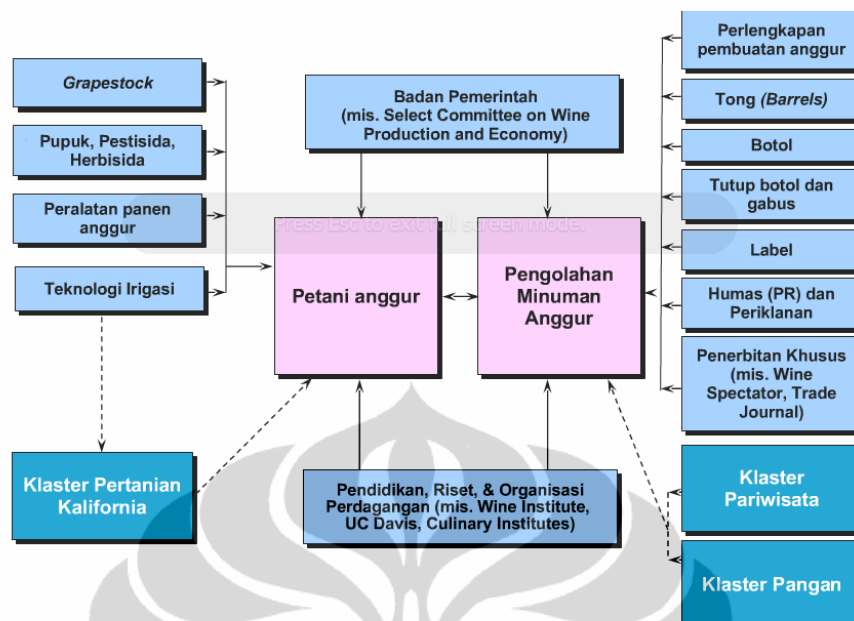
Wilayah Silicon Valley sekitar 30-mil X 10-kilometer dan berada antara kota-kota San Francisco dan San Jose di di California Utara. Wilayah ekonomi ini dimulai di bagian barat laut Silicon Valley di Palo Alto, di mana sebagian besar penelitian teoritis dan praktis dalam bidang teknologi dilakukan di Stanford University dan Stanford University Research Park. Kombinasi keunggulan daerah dan peristiwa yang kebetulan telah menghasilkan 'kawasan ilmu' terbesar di dunia, dan pengamat telah mengidentifikasi sejumlah keuntungan bagi daerah Silicon Valley, termasuk lembaga akademis kelas dunia (Stanford University dan University of California, Berkeley), ilmuwan brilian, pengadaan semikonduktor untuk militer, dan iklim yang menyenangkan California Utara.

Gambar 2.5 Peta Pengembangan Ekonomi Daerah USA



Sumber: Porter (2001)

Gambar 2.6 Kluster Anggur California



Sumber : Porter (2001)

3. Penang dan Lembah Kelang, Malaysia

Klaster industri di Penang dan Lembah Kelang di Malaysia telah menikmati operasi Multi National Corporation (MNC) kuat di manufaktur elektronik sejak awal 1970-an. Memang, perusahaan-perusahaan milik asing menyumbang 83% dari seluruh aktiva tetap dalam industri elektronik di Malaysia pada tahun 1998. Membandingkan kedua kelompok elektronik Malaysia dan sebagaimana hasil kajian Rasiah (2002).

2.9 Kerangka Pemikiran

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tetapi harus diawasi. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (Dwijpwijoto, 2003:183).

Sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan analisis terhadap publik berada pada domain implementasi kebijakan. Hal ini dapat dipahami karena

implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus benar-benar dilihat. Edward A. Suchman seperti dikutip Winarno (2002:169) mengemukakan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Mempelajari pelaksanaan kebijakan, deskripsi dan standarisasi kegiatan
3. Analisis terhadap masalah dan menemukan gap antara keadaan sebenarnya dengan yang diharapkan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Analisis data meliputi kegiatan mengolah data dan menyimpulkan informasi yang di dapat.

Terdapat berbagai macam model atau instrumen implementasi kebijakan, Wibawa, dkk (1994:18) berpendapat bahwa model implementasi kebijakan tidak perlu dipublikasikan sesuai apa adanya, tetapi dapat disintesis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Kerangka Pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.6.

Berdasarkan pemahaman model-model implementasi yang diuraikan maka penulis menarik asumsi bahwa dalam evaluasi implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung dipengaruhi oleh: (1) sumberdaya, (2) komunikasi, dan (3) kepatuhan.

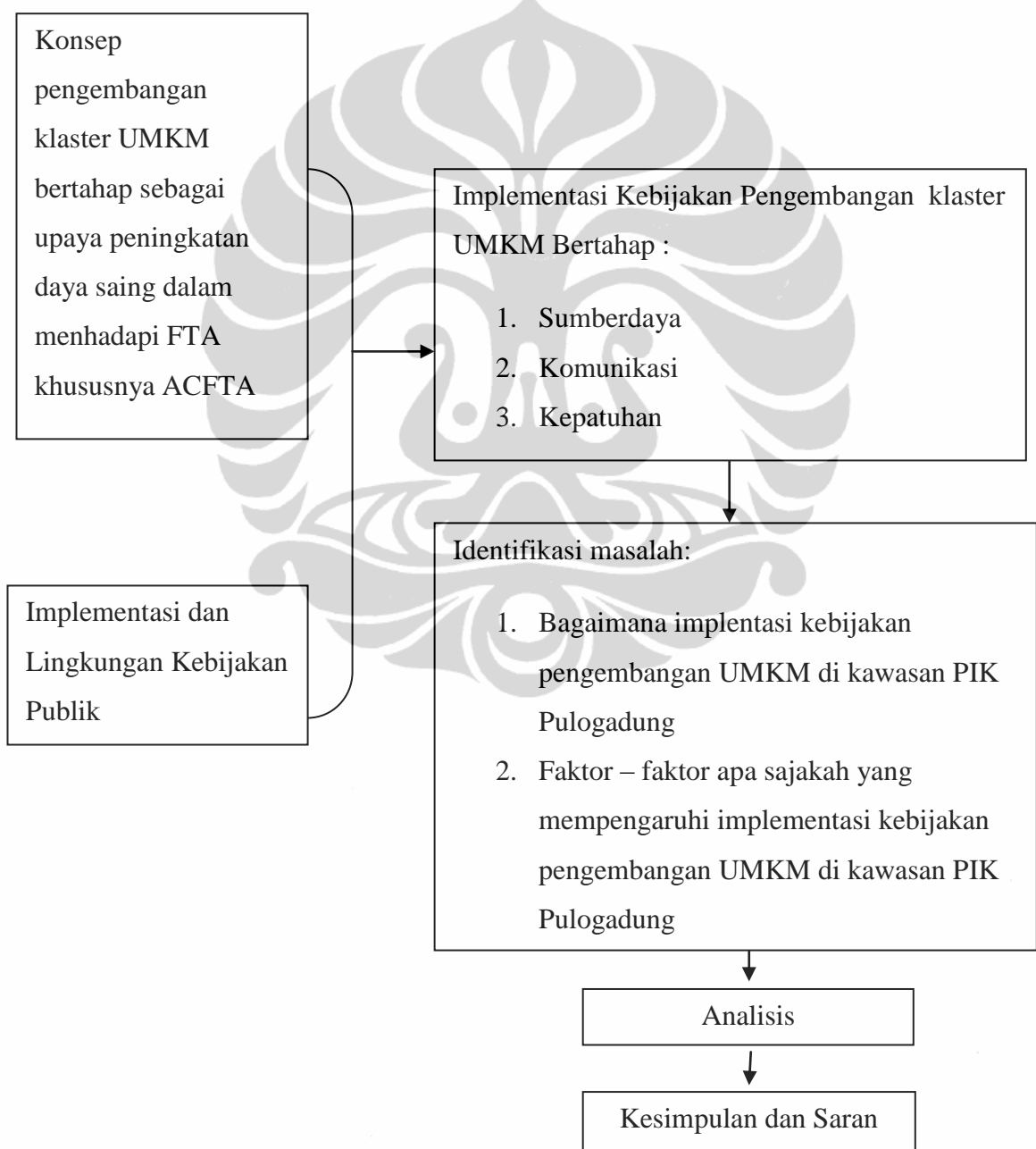
Sedangkan kriteria evaluasi dari suatu kebijakan menurut Dunn (2000:610) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, dapat diketahui dengan pernyataan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, dapat diketahui dengan pertanyaan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, dengan pertanyaan sejauh mana pencapain hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Kesamaan, dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda

5. Responsivitas, dengan pernyataan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu
6. Ketepatan, dengan pernyataan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Gambar 2.7

Kerangka Pemikiran Penelitian Analisa Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Menghadapi ACFTA dengan studi kasus Kawasan PIK Pulogadung



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (observational case studies) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif (persepsi manusia) dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua variable atau lebih.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Kepustakaan, bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori sebagai landasan penelitian, melalui penelaahan berbagai literatur, buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dokumen, perundang-undangan negara maupun peraturan pemerintah DKI Jakarta yang berkaitan dengan pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal.

2. Observasi atau penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Terdapat beberapa variabel penelitian yang berkenaan dengan observasi ini, yakni berkaitan dengan potensi wilayah, aspek internal usaha, institusi pendukung dan keterkaitan jaringan (kerjasama atau kemitraan).
3. Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pihak pembina pengembangan kawasan PIK Pulogadung Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, Dinas UKM dan Koperasi DKI Jakarta, serta ketua paguwuban pengusaha UKM di kawasan PIK Pulogadung Jakarta.
4. Kuesioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab dan diisi oleh responden sebagai sampel yang terpilih yaitu pengusaha UKM di kawasan PIK Pulogadung Jakarta .

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1993: 116). Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1992: 6). Dari pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro, kecil dan menengah di PIK Pulogadung tahun 2011/2012. Populasi berjumlah 495 pengusaha sebagai berikut:

1. Sentra Garment/konveksi sebanyak 273 UKM
2. Sentra Kulit sebanyak 72 UKM
3. Sentra Logam sebanyak 96 UKM
4. Sentra Furnitur/Kayu sebanyak 8 UKM

5. Sentra Aneka Komoditi lainnya sebanyak 46 UKM

3.5 Tehnik Pengambilan Sampel

Penarikan sampel pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara purposive sampling dengan mengacu pada penetapan macam sentra dan jenis kegiatan UKM. UKM dipilih secara random di dalam sentra bisnis yang terpilih. Referensi penyebaran sentra berdasar sektor usaha akan dapat membantu memberi gambaran proporsional dari macam sentra yang dikembangkan di kawasan PIK Pulogadung. Jadi jumlah sampe yang diambil adalah 100 UKM yang ada di kawasan PIK Pulogadung.

3.5.1 Kriteria sentra bisnis sebagai unit penarikan sampel :

UKM yang akan dipilih adalah UKM yang hasil produknya bersaing langsung dengan negara-negara CAFTA dan mengalami perubahan yang signifikan dalam hal penjualan produknya baik peningkatan maupun penurunan.

UKM yang akan dijadikan sampel dari masing-masing kluster adalah UKM yang pernah dan masih mendapatkan bantuan program perkuatan dari Departemen Koperasi dan UKM perkuatan non finansial yang diberikan oleh pemerintah selama melalui BDS dan dukungan perkuatan finansial masih sejak tahun 2000 sebagai usaha awal pemerintah memberikan bantuan sebagai implementasi kebijakan dukungan perkuatan pada sentra-sentra yang memiliki keunggulan guna peningkatan daya saing nasional.

3.6 Sumber dan Jenis Data

3.6.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal (Koentjaraningrat, 1993:173). Kuisisioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Kuisisioner disebarkan kepada para pimpinan UKM dan pengurus kawasan PIK Pulogadung Jakarta Timur.

2. Wawancara

Wawancara dengan responden yang dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam hal-hal yang berhubungan dengan yang diteliti. Oleh karena itu, informan dipilih dengan sengaja (purposive). Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002:90).

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Data sekunder diperoleh dari literatur – literatur, jurnal ilmiah, serta laporan hasil ilmiah terkait. Beberapa dokumen yang menjadi acuan dalam penelitian ini ditelaah sehingga dapat digunakan untuk pembahasan yang lebih baik.

3.7 Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data

3.7.1 Tehnik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kusioner kepada semua responden diolah berdasarkan ketentuan teknik analisis yang digunakan. Hal yang terpenting dalam pengolahan data ini adalah pemahaman tentang karakteristik data yang digunakan, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki unsur nominal. Irawan (1999:86) mengemukakan bahwa data kualitatif bisa dikuantifikasikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyebarkan kusioner yang disusun secara tertutup. Artinya, kusioner sudah diberi alternatif jawaban sehingga responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang dipandang mendekati kebenaran dengan masalah-masalah yang ditanyakan. Alternatif jawaban dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2004: 86).

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam lima kategori kualitas yang tergradasi dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Untuk lebih jelasnya, pemberian angka terhadap kualitas ini secara rinci disajikan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

Tabel 3.1
Pengolahan Data dengan Menggunakan Skala Likert untuk Variabel
Implementasi Kebijakan

No	Kualitas Pendapat	Skala Likert
1	Sangat Baik	1
2	Baik	2
3	Cukup Baik	3
4	Tidak Baik	4
5	Sangat Tidak Baik	5

Sumber: Riduwan (2004:87)

Tabel 3.2
Pengolahan Data dengan Menggunakan Skala Likert untuk Variabel (1)
Sumberdaya(2) Komunikasi; (3) dan Kepatuhan.

No	Kualitas Pendapat	Skala Likert
1	Sangat Baik	1
2	Baik	2
3	Cukup Baik	3
4	Tidak Baik	4
5	Sangat Tidak Baik	5

Sumber: Riduwan (2004:87)

Dengan diperolehnya skala dari kualitas pendapat yang diberikan responden, maka dapat diperoleh skor dari masing – masing responden dalam menanggapi suatu kondisi atau suatu kategori tertentu. Sebelum data dianalisa, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap butir skor (Sugiyono, 2005:106). Teknik yang digunakan dalam analisis item ini adalah korelasi Product Moment dari Pearson (r). Instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai signifikan kurang dari 0,05.

Uji realibilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (Reliabel). Tinggi rendahnya realibilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut Koefisien Reabilitas. Secara teoritis besarnya koefisien realibilitas berkisar antara 0,00 sampai 1,00.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode reliabilitas Alpha Cronbach. Hasil reabilitas Alpha Cronbach dikonsultasikan dengan nilai Tabel r Product Moment dengan $dk = N - 1$, dimana N adalah jumlah sampel, dengan signifikansi 5% (Riduwan, 2004:128).

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komputer Statistical Package for Social Sciences (SPSS for Windows versi 17.0)

3.7.2 Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan Analisis Rentang Kriteria. Analisis ini digunakan untuk melihat kondisi dari variabel dan indikator – indikator dari variabel bebas maupun variabel tak bebas sehingga bisa menjawab pertanyaan permasalahan

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung Jakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung Jakarta ?

Penggunaan alat analisis ini melalui beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Menentukan kriteria dari variabel yang dianalisis.

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah kondisi baik atau tidaknya suatu implentasi kebijakan yang dilihat dari setiap variabel atau indikator yang dianalisis.

2. Menentukan skor terendah (R) dan tertinggi (T) pada variabel atau indikator yang dianalisis.

Cara menentukan skor terendah dan tertinggi setiap variabel sebagai berikut:

- Skor terendah (R) dihitung berdasarkan ketentuan, yaitu jumlah responden dikalikan jumlah pertanyaan serta dikalikan skor terendah setiap jawaban.
 - Skor tertinggi (T) dihitung berdasarkan rumus ketentuan, yaitu jumlah responden dikalikan jumlah pertanyaan serta dikalikan skor tertinggi setiap jawaban.
3. Menentukan rentang skala (Rs) dari kriteria dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skala (Rs)} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Dimana:

n= jumlah responden yang dikalikan banyaknya perlakuan (pertanyaan)

m= jumlah alternatif pertanyaan

Rentang skala dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Rentang Skala

Rentang	Kriteria
R – R + Rs	Sangat Baik
R+Rs+1 – R + 2Rs	Baik
R+2Rs+1 – R + 3Rs	Cukup Baik
R+3Rs+1 – R + 4Rs	Tidak Baik
R+2Rs+1 – T	Sangat Tidak Baik

Sumber: Umar, H (1997:224)

4. Menentukan kriteria setiap variabel. Setelah rentang dapat disusun maka untuk memutuskan kriteria variabel maupun indikatornya dilakukan dengan cara menentukan keberadaan skor total dari pendapat seluruh responden dari variabel atau indikator pada rentang yang sesuai. Contohnya, jika jumlah skor suatu variabel berada pada rentang (R – R + Rs) maka sesuai tabel tentang kriteria di atas maka dapat dikatakan bahwa kriteria variabel tersebut “Sangat Baik”.

Selain itu, analisis data kualitatif juga dilakukan melalui membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber,

baik dari hasil wawancara, kuesioner maupun dokumen resmi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam menjawab masalah penelitian.



BAB IV
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH

4.1 Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah Nasional

4.1.1 Pendahuluan

Kebutuhan untuk segera tersusunnya RIP-UKM ini memang dirasakan sangat mendesak demi menyambut aspirasi dan tuntutan kebutuhan sebagian besar masyarakat akan lapangan kerja dan lapangan usaha, khususnya pada lapisan masyarakat yang penghidupannya terbatas atau dari tingkat pendapatan rendah dan menengah. Jiwa dan semangat ekonomi kerakyatan cukup kental mewarnai kebijakan dan program yang tertuang di RIP-UKM, karena segmen UKM merupakan wahana yang paling tepat bagi penerapan sistem ekonomi ini.

Pertimbangan yang melandasi penting dan mendesaknya penyusunan RIP-UKM adalah:

1. Tuntutan pasar perlu segera bangkitnya UKM sebagai tumpuan utama bagi penghidupan masyarakat luas, di lingkungan himpitan krisis ekonomi dan tantangan persaingan bebas di era globalisasi, dengan tetap mengacu kepada prinsip pembangunan berkelanjutan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Tuntutan kebutuhan dari sisi administrasi pembangunan di mana diperlukan hadirnya sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun aparat pembina pada awal era desentralisasi dan otonomi daerah.
3. Pentingnya adanya pola acuan umum penyusunan program bagi kepentingan pengalokasian sumber daya/ anggaran pembangunan maupun pembagian peran berbagai institusi terkait dalam ikut menunjang berhasilnya pengembangan UKM.

4.1.2 Kebijakan Pengembangan

Pengembangan UKM menempuh kebijakan yang pelaksanaannya akan didukung bersama oleh semua pihak/ instansi terkait, serta tersusun dari komponen-komponen yang universal yaitu:

1. Menggariskan prioritas sektoral pengembangan UKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas instansi, baik di pusat maupun daerah, dimana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang bersangkutan.
2. Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku UKM:
 - a. Mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, patriot (cinta produk dalam negeri), dan profesional
 - b. Mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha
 - c. Mampu mendayagunakan sumber daya produktif dan mengakses pasar (lokal, dalam negeri maupun ekspor)
 - d. Mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan keterampilan teknis/teknologis
 - e. Mampu membangun daya saing berwawasan efisiensi, produktifitas dan mutu, proaktif, kreatif serta inovatif

Pemberdayaan terhadap institusi yang berkaitan dengan pengembangan UKM juga dilakukan agar pelaku UKM:

- a. Mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan UKM yang diwujudkan dalam bentuk pemberian perhatian, alokasi sumber daya/dana, upaya dan waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan UKM
- b. Mempunyai wawasan konseptual untuk membuat program pengembangan UKM yang berdayaguna dan berhasil guna.
- c. Bersikap konsisten dalam semangat keterpaduan untuk secara bersama mendukung/melaksanakan program pengembangan UKM sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing.

3. Mengembangkan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pebisnis UKM untuk tumbuh berkembang maju. Komponen iklim usaha yang bersifat teknis utamanya adalah:
 - a. Kepastian hukum dan kejelasan/kesederhanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kondusif dan tidak membebani ekonomi.
 - b. Tersedianya prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi (investasi publik maupun swasta).
 - c. Sistem insentif yang secara efektif dapat merangsang keagairahan ekonomi melalui UKM.
 - d. Kebijakan makro ekonomi yang menunjang, khususnya dari segi ketersediaan dan kemudahan akses permodalan, suku bunga yang relatif rendah dan kestabilan nilai tukar valuta asing.
 - e. Bantuan teknis dan subsidi pemerintah untuk program prioritas.
 - f. Citra aparat pembina/fasilitator yang bersih.
4. Meningkatkan pemberian layanan prima (fasilitasi) kepada pelaku UKM, baik layanan administratif (perijinan/pencatatan/legalisasi/ ketepatan fasilitas/ rekomendasi, informasi kebijakan dan sebagainya)
5. Selalu mengembangkan program yang inovatif, realistis dan membumi (menyentuh kepentingan pelaku pasar disektor riil), mampu menjawab masalah aktual yang dihadapi sesuai kondisi nyata objek binaan di lapangan, misalnya antara lain:
 - a. Pengembangan Sentra Industri Kecil
 - b. Pengembangan Proyek Percontohan berupa inkubator bisnis
 - c. Pengembangan Business Development Services (BDS)
 - d. Pengembangan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
 - e. Pendayagunaan Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian (TFPP) secara optimal
 - f. Pengembangan Wirausaha Kecil/Menengah Pedesaan melalui Pesantren
 - g. Lomba Inovasi Desain dan Produk UKM

4.1.3 Strategi Pengembangan

4.1.3.1 Pendekatan Pengembangan

Strategi pengembangan yang ditempuh didasarkan kepada pola pendekatan logis dan komprehensif melalui dua langkah simultan yang saling sinergik. Sinergik tersebut digunakan dalam menangani setiap proyek ataupun objek pengembangan industri, baik yang bersifat pemecahan masalah maupun yang bersifat pengembangan ke depan. Adapun kedua strategi tersebut adalah:

1. Memperkuat daya tarik faktor-faktor penghela pada sisi permintaan terhadap produk-produk industri (Demand Pull Strategy) melalui berbagai bentuk upaya yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.
2. Memperkuat daya dukung faktor-faktor pendorong pada sisi kemampuan daya pasok (Supply Push Strategy) untuk memperlancar kegiatan produksi secara berdaya saing, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pendekatan upaya pengembangan melalui dua pendekatan tersebut dalam aspek-aspek yang secara umum memerlukan pemantapan dukungan. Dukungan ditujukan pada semua sektor/kelompok industri, ditempuh langkah-langkah yang dituangkan dalam program penunjang.

4.1.3.2 Perlakuan dan Mekanisme Koordinasi Pengembangan

Meskipun pendekatan pengembangan seperti di atas dapat diterapkan di semua skala satuan objek pembinaan dari level sektor ataupun kelompok/cabang industri ditingkat nasional/daerah secara makro, sampai tingkat sentra industrial unit usaha secara mikro. Jenis perlakuan yang diterapkan kepada objek pengembangan selalu spesifik yaitu disesuaikan dengan kondisi. Tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh UKM yang bersangkutan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) bertanggung jawab menjadi pengambil peran pemrakarsa dalam setiap program pengembangan UKM, mulai dari pembuatan kebijakan, pengaturan, penyusunan program sampai dengan implementasi dan evaluasi hasilnya. Setiap daerah didorong untuk melakukan:

- a. Identifikasi sentra-sentra UKM yang berpotensi dapat

ditumbuhkembangkan berdasarkan peluang pasar/regional dan nasional.

- b. Identifikasi peluang intervensi pemerintah, khususnya kelemahan dan hambatan yang mengganggu suksesnya pengembangan UKM di daerahnya.
- c. Identifikasi peluang investasi UKM yang mempunyai prospek layak usaha bekerja sama dengan BKPM untuk dipromosikan kepada calon investor khususnya dari kalangan pengusaha.

4.2 Kebijakan Pengembangan Klaster Bisnis UKM

Reformasi Pemerintahan melahirkan perubahan terus menerus dengan dinamika yang bersifat permanen dan sesaat. Meskipun pada saat krisis memuncak pada tahun 1998 ekonomi rakyat dihadirkan sebagai penyelamat dan ditugasi terlalu banyak hal, tetapi akibat negative dari penggelontoran fasilitas menimbulkan kekhawatiran baru, di samping perubahan fundamental reformasi politik di bidang perbankan mengharuskan perubahan. Sementara dampak krisis masih membebani masyarakat dan menyisakan kemunduran kelompok usaha menengah yang mempunyai kedudukan penting dalam menghela ekonomi akar rumput (*grass root economy*). Masih dalam suasana semacam itu lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan pengembangan UKM dipersempit statusnya menjadi Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada akhir tahun 1999. Oleh karena itu dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) untuk mengemban tugas operasional Departemen Koperasi dan PKM [Dirjen Koperasi (Bina Usaha) dan Dirjen PKM]. Badan baru ini dilengkapi dengan tiga pilar fungsi yaitu: Pengembangan Usaha (pengembangan bisnis dan pasar, *Business Development*); Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi (pembiayaan dan investasi termasuk restrukturisasi kredit, *Financial and Investment Facilitation*), dan Sumber Daya Manusia (pendidikan pelatihan, teknologi dan penelitian, dan penyuluhan dan peran serta masyarakat, *Technology and Trainings Supports*). Dalam forum koordinasi donor pembangunan Koperasi dan UKM BPS-KPKM dikenal sebagai SMECDA (*Small Medium Enterprise and Cooperative Development Agency*).

Dengan kesadaran akan perubahan, maka sejak awal Badan ini didirikan dan dalam waktu tiga tahun akan dievaluasi sesuai dengan arah reformasi yang masih akan berlanjut. Menghadapi tantangan ini maka harus ada scenario untuk mentransformasikan menjadi lembaga partnership antara pemerintah dan pelaku yang lebih ramah pasar. Paradigma pembinaan dan dukungan langsung harus ditransformasikan menjadi industri pemberdayaan yang secara perlahan menjadi bagian dari industri jasa perusahaan yang berdampingan dengan jasa keuangan dan jasa persewaan yang menjadi nyawa dari pengembangan usaha. Inilah paling tidak renungan kami ketika itu dalam menerima tugas transisional tapi harus melahirkan perubahan mendasar. Kesulitan Direktorat Jenderal Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Departemen Koperasi ketika itu adalah mengenali obyek binaan dan mencari entry yang berbeda dari Dirjen IK Departemen Perindustrian dan Dirjen Koperasi. Pembina koperasi meskipun dibatasi oleh wilayah dan pengelompokan kegiatan ekonomi tetapi mereka mempunyai identitas kelembagaan universal, yaitu Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, tetapi tidak demikian halnya dengan industri kecil, usaha kecil, dagang kecil dan sektor informal.

Menjawab kebutuhan tantangan kelembagaan dan program pengembangan yang berdampak jangka panjang dan perlu kecepatan pelaksanaan, maka pikiran yang dikembangkan ketika itu bahwa program itu harus memenuhi syarat: (1). melahirkan entry baru yang jelas, (2). mempunyai karakter unity, (3) ada kekuatan market driven, dan (4) melahirkan self governing (rolling) mechanism. Pendekatan yang mempunyai kemampuan memenuhi syarat ini tiada lain adalah pendekatan klaster dengan entri sentra yang sudah hadir di masyarakat. Dan sejak itu pendekatan klaster yang biasa digunakan dalam pendekatan manajemen industri diadopsi ke dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, karena pada dasarnya aglomerasi yang biasa dilakukan industri juga pada akhirnya tumbuh menjadi kesatuan dengan usaha pendukungnya, seperti sejarah klaster industri perkapalan di Norwegia lebih seabad yang lalu. Pengalaman ini memang dianjurkan oleh UNCTAD sebagai model tahapan pengembangan, meskipun kawasan itu kini sudah menjadi kawasan pelabuhan untuk rekreasi dan pusat perbankan.

Secara sepintas pendekatan klaster dalam pengembangan UKM, apapun basis kegiatannya, pivotnya adalah menjadikan total omzet dari hasil pengelompokan yang disertai dukungan ini harus tumbuh menjadi sebuah ekonomi yang kesemuanya dapat hidup dengan kekuatan pasar. Biasanya yang paling mudah adalah melihat kehadiran lembaga keuangan karena dia tidak akan hadir kalau tidak layak. Dalam mengembangkan tiga pilar penguatan diatas maka program pokoknya adalah memasukkankomponen jasa pengembangan usaha (Business Development Services) ke dalam klaster/sentra UKM dan memperkuat Lembaga Keuangan Mikro untuk melayani usaha mikro non formal dan tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan dan ditopang oleh pendidikan, pelatihan dan pengenalan telematika-informatika melalui BDS. Ke depan menjadikan mereka mitra Bank adalah keharusan oleh karena itu instrument penjaminan, asuransi dan instrument keuangan lainnya, termasuk restrukturisasi dikembangkan dan dikaitkan dengan fungsi BDS.

BPS-KPKM sendiri umurnya tidak sampai tiga tahun karena pada akhir tahun 2001 dihapuskan, tetapi pendekatan klaster dengan instrument BDS dan MAP-LKM sudah menjadi dokumen UU-PROPENAS (UU 25/2001) sebagai pengganti GBHN maka perjalanan program ini selamat sampai akhir sasaran pengembangan selama 4 tahun 2001-2004, dengan jumlah seribu entri (sentra) untuk dikembangkan menjadi klaster UKM. Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, terutama setelah tahun 2005 nyanyian tentang klaster, BDS dan lainnya memang redup dalam pendekatan pengembangan UKM. Tetapi juga belum ada konsep pengganti atau alternative strategi yang ditawarkan Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyangkut pengembangan UKM. Saksi hidup dari hasil pendekatan BPS-KPKM adalah masih adanya pegiat BDS dan hadirnya Asosiasi BDS, serta digunakanya komunikasi jalur maya SMECDA untuk komunikasi UKM. Evolusi BDS lebih jelas karena selain dikembangkan menjadi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), Lembaga Pendamping dalam program pemberdayaan pada program daerah dan kemudian PNPM, sampai pada pengenalan BDS secara eksplisit dalam pembangunan sektor, CSR Perusahaan Besar dan BUMN. Industri jasa perusahaan dalam perekonomian kita juga tumbuh pesat. Sementara pendekatan klaster secara eksplisit juga telah digunakan dalam

pembinaan usaha kelautan dan perikanan, program pembanguan daerah dan industri sendiri.

Jika dilihat dari evolusi jasa pengembangan usaha UKM dalam sejarah pembinaan usaha kecil di Indonesia dimulai dari tugas asistensi oleh Dinas, baik Pertanian maupun Perindustrian, dan kemudian lahir kesadaran akan fungsi Penyuluhan oleh Petugas Pemerintah sebagai transformasi dari Penerangan Pembangunan yang umum (penyadaran manusia/masyarakat). Tetapi khusus untuk industri tugas penyuluhan, bantuan teknis dan kepengusahaan dititipkan kepada industri pengolahan (lihat industri gula, tembakau, serat rami dan lain-lain).

Pada masa tumbuh kembangnya industri pupuk, obat-obatan dan pembibitan pertanian masing-masing perusahaan besar menyediakan tenaga penyuluh/pendamping mengikuti penyediaan detailer dalam industri obat-obatan, yang berarti penyediaan jasa pengembangan usaha oleh industri produsen input. Kekeliruan penyuluhan menjadikan pengerahan dan menghambat pengembangan mengundang LSM tampil dengan konsep Pendampingan yang lebih membuka kepada kemajuan dan alternative usaha yang luas, tetapi tidak kompetitif karena bergantung pada donor atau lembaga pendukung. Inilah alasan utama mengapa BDS tidak diambil sendiri peranya oleh BPS-KPKM tetapi diserahkan kepada pihak ketiga, karena yang ingin dikembangkan adalah industri pengembangan usaha yang tersedia melalui pasar untuk UKM. Pada tahap awal BDS direkrut dari tiga pilar yaitu: (1). Perguruan Tinggi (LPEM/LPM), (2). Konsultan UKM Swasta dan LSM, dan (3). Koperasi sendiri.

Pada masa berakhirnya program pengembangan Sentra/Klaster UKM tahun 2004 untuk mencapai sasaran 1000 sentra kegiatan UKM, Badan Pusat Statistik BPS diminta melakukan evaluasi dampak pemberian dukungan financial (LKM/MAP) dan dukungan non financial (BDS/Jasa Pengembangan Usaha) dan hasilnya melaporkan bahwa keduanya mendorong volume penjualan (25% mengalami peningkatan dan 33 persen bertahan dalam krisis/tetap), sementara keuntungan juga meningkat dengan kinerja yang hampir sama (BPS, 2004). Jika dilihat rata-rata masa implementasi pendekatan ini dalam praktek masih kurang dari dua tahun, tetapi separuh dari UKM mendapati layanan pasar yang tepat dapat membantu mereka mencari pemecahan pengembangan usaha mereka. Akan

lebih menarik lagi seandainya potret 2009 ditampilkan, karena akan menguji setelah pendekatan dimaksud dilepas selama lima tahun apakah telah menumbuhkan industri jasa perusahaan bagi UMK. Karena kinerja makro yang tumbuh pesat sangat boleh jadi karena permintaan jasa perusahaan dari usaha besar yang tumbuh pesat. Ingat jumlah unit usaha besar bertambah pesat, pangsa usaha besar juga menggeser usaha menengah, sehingga pada saat ini sedang terjadi kembali gejala konsentrasi usaha.

4.3 Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan UKM di Kawasan PIK Pulogadung

4.3.1 Maksud Dan Tujuan Pembangunan PIK Pulo Gadung

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PEMDA DKI) menempati areal seluas lebih kurang 44 Ha lengkap dengan sarana dan prasarana berikut fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya di areal Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung tersebut di lakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PEMDA DKI.

Adapun tujuan dari pembangunan PIK Pulo Gadung adalah :

- a) Untuk menampung (merelokasi) pengusaha/pengrajin ekonomi lemah yang bergerak di bidang industri kecil yang tersebar diberbagai tempat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b) Membina dan membimbing para pengrajin/pengusaha ekonomi lemah atau pengusaha kecil supaya dapat dapat dikembangkan menjadi pengrajin inlpengusaha menengah, selanj utnya jika pengusaha ekonomi lemah tersebut sudah berkembang menjadi pengusaha menengah harus keluar dari Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, dan diganti oleh pengusaha ekonomi lemah atau pengusaha kecil lainnya.
- c) Melalui program dengan pola PIK yang dilakukan oleh PEMDA DKI diharapkan dapat membawa manfaat yang positif bagi para

pengrajin atau pengusaha kecil dan juga pemerintah DKI. Bagi Para pengrajin, program ini dapat menjadi jawaban atas beberapa permasalahan pokok yang dihadapi seperti tempat hunian yang layak, lapangan pekerjaan, pembinaan untuk mengembangkan usaha dan bantuan modal usaha. Sedangkan bagi pemerintah daerah PIK dapat menjadi salah satu sumber yang dapat mengangkat perekonomian warganya yang pada akhirnya dapat mendatangkan pemasukan bagi keuangan daerah.



BAB V

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan UKM Untuk Menghadapi ACFTA di Kawasan PIK Pulogadung

5.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk memperoleh instrumen penelitian yang valid diperlukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data yang ada. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Jika instrumen penelitian valid, maka alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data adalah valid. Artinya, instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Reliabilitas alat ukur berhubungan dengan sejauh mana skor pengukuran terbebas dari kesalahan pengukuran.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan piranti lunak program SPSS 17, diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 5.1. Data pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa semua butir alat ukur dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95 %, Jadi, untuk variabel sumberdaya, komunikasi dan kepatuhan 17 butir alat ukur dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Reliabilitas merupakan salah satu atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran dengan metode Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil pengolahan data variable sumberdaya untuk instrument butir no. 1 sampai dengan no. 9 dengan menggunakan Program SPSS 17 diperoleh hasil Alpha Cronbach sebesar 0.825. Jika nilai 0.825 dikonsultasikan dengan nilai Tabel r Product Moment dengan $dk = N - 1 = 100 - 1 = 99$, signifikansi 5 % maka diperoleh r-tabel = 0.196. Nilai Alpha Cronbach = 0.825 lebih besar dari r-tabel = 0.196 maka semua data yang dianalisa dengan metode Alpha adalah reliabel. Secara keseluruhan alat ukur telah memiliki

konsistensi internal yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, instrumen No. 1 sampai dengan No. 9 dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Untuk variabel komunikasi, menunjukkan bahwa semua butir alat ukur dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95 %. Oleh karena itu, seluruh instrumen untuk variabel komunikasi dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji reliabilitas, berdasarkan hasil pengolahan data untuk instrumen No. 10, 11, 12, dan 13 dengan menggunakan Program SPSS 17 diperoleh hasil Alpha Cronbach sebesar 0.653. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliabel karena hasil Alpha Cronbach = 0.653 lebih besar dari r -tabel = 0.196. Oleh karena itu, seluruh butir instrumen dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Empat butir instrumen variabel kepatuhan adalah valid dengan tingkat kepercayaan 95 %. Empat butir instrumen tersebut adalah No. 14, 15, 16, dan 17. Jadi, untuk variabel kepatuhan, empat butir alat ukur dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Untuk uji reliabilitas, berdasarkan hasil pengolahan data untuk instrumen No. 14, 15, 16, dan 17 dengan menggunakan Program SPSS 17 diperoleh hasil Alpha Cronbach sebesar 0.633. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliabel karena hasil Alpha Cronbach = 0.633 lebih besar dari r -tabel = 0.196. Oleh karena itu, seluruh butir instrumen dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Variabel implementasi kebijakan, yaitu instrumen No. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah valid dengan tingkat kepercayaan 95 %. Oleh karena itu, seluruh instrumen variabel implementasi kebijakan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Untuk uji reliabilitas, berdasarkan hasil pengolahan data untuk enam butir instrumen implementasi kebijakan, dengan menggunakan Program SPSS 17 diperoleh hasil Alpha Cronbach sebesar 0.725. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliabel karena hasil Alpha Cronbach = 0.725 lebih besar dari r -tabel = 0.196. Secara keseluruhan alat ukur telah memiliki konsistensi internal yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, seluruh butir instrumen variabel implementasi kebijakan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas

VARIABEL	NOMOR BUTIR INSTRUMEN	KOEFISIEN KORELASI	KETERANGAN
Sumberdaya	1	0.493	Valid
	2	0.551	Valid
	3	0.641	Valid
	4	0.295	Valid
	5	0.312	Valid
	6	0.806	Valid
	7	0.465	Valid
	8	0.768	Valid
	9	0.487	Valid
Komunikasi	10	0.353	Valid
	11	0.525	Valid
	12	0.334	Valid
	13	0.545	Valid
Kepatuhan	14	0.339	Valid
	15	0.521	Valid
	16	0.413	Valid
	17	0.404	Valid
Evaluasi Kebijakan	1	0.508	Valid
	2	0.561	Valid
	3	0.337	Valid
	4	0.529	Valid
	5	0.226	Valid
	6	0.642	Valid

5.1.2 Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM dalam menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) di kawasan PIK Pulogadung

5.1.2.1 Evaluasi Terhadap Indikator Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

a. Ketepatan

Butir 1: Bagaimana manfaat kebijakan pengembangan UKM selama ini dapat menciptakan iklim usaha yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh melalui peningkatan kemampuan SDM, pemasaran, permodalan dan penguasaan teknologi dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA? Jawaban responden terhadap ketepatan implementasi kebijakan pengembangan UKM dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Ketepatan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Skala Likert	Nilai Jawaban (2)	Frekuensi (3)	Presentase (4)	Skor (2) x (3)
Sangat Baik	1	5	5	5
Baik	2	12	12	24
Cukup Baik	3	33	33	99
Tidak Baik	4	25	25	100
Sangat Tidak Baik	5	25	25	125
Total			100	353

Responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik" sebanyak 25 responden atau 25%, yang menjawab "Tidak Baik" sebanyak 25 responden atau 25%. Responden yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 33 responden atau 33%, yang menjawab "Baik" sebanyak 12 responden atau 12%, dan responden yang menjawab "Sangat baik" sebanyak 5 orang atau 5%.

Sebagai pedoman untuk mengetahui kondisi ketepatan implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 5.3 yang disusun

berdasarkan skor terendah sampai tertinggi. Skor terendah adalah 100 (100×1), yang menunjukkan semua jawaban atas butir 1 dari 100 responden adalah 1; sedangkan skor tertinggi adalah 500 (100×5), yang menunjukkan semua jawaban atas butir 1 dari 100 responden adalah 5. Mengacu pada rumus rentang skala pada Bab III, maka diperoleh nilai R_s sebesar 80. Berdasarkan rentang skala pada Tabel 3.2, maka penulis menyusun rentang skala untuk menjawab kondisi tiap instrumen dan dapat dilihat pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel. 5.3 Rentang Skala Ketepatan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Rentang	Kriteria
100 - 180	Sangat Baik
181 - 260	Baik
261 - 340	Cukup Baik
341 - 420	Tidak Baik
421 - 500	Sangat Tidak Baik

Dari Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa untuk instrumen butir 1 implementasi kebijakan, yaitu bagaimana manfaat kebijakan pengembangan UKM selama ini dapat menciptakan iklim usaha yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh melalui peningkatan kemampuan SDM, pemasaran, permodalan dan penguasaan teknologi menghasilkan skor sebesar 353. Mengacu pada Tabel 5.3, skor ini berada pada rentang 4 (empat) yang menunjukkan bahwa ketepatan implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM adalah "Tidak Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung selama ini masih "Tidak Baik" dalam hal pengembangan dan pembinaan usaha yang diinginkan oleh UKM dalam menciptakan iklim usaha yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh melalui peningkatan kemampuan SDM, pemasaran, permodalan dan penguasaan teknologi.

Kondisi yang masih "Tidak Baik" untuk ketepatan implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM didukung oleh pendapat responden bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh

pemerintah belum bisa membantu mereka dalam permasalahan dalam mengembangkan usahanya :

1. Penerapan sistem manajemen perusahaan yang kurang baik
2. Kurangnya dalam membaca peluang pasar
3. Penerapan strategi pemasaran yang kurang efektif
4. Kurangnya modal kerja untuk menunjang strategi perusahaan
5. Sistem produksi yang masih belum memenuhi standar

Para pengusaha sering dihadapkan pada berbagai permasalahan – permasalahan. Namun kita harus melihat inti dari permasalahan tersebut, apakah masalah tersebut terdapat di faktor internal (sistem dan strategi) ataukah di faktor eksternal (Pasar).

Secara teori, keseimbangan antara faktor internal dan faktor eksternal haruslah terjaga agar perusahaan dapat lebih berkembang. Walaupun sistem dan strategi perusahaan itu sangat baik, namun jika tidak didukung dengan pembacaan peluang pasar dan perilaku konsumen maka perusahaan tidak akan dapat menjaga pasarnya.

Dalam penelitian ini, responden menyatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung tidak bisa membantu mereka dalam hal nasib pedagang lokal di Jakarta pun kini kian terjepit.

Kita bisa ambil contoh Pengusaha tas di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, hanya bisa menarik napas perih prospek produknya saat ini di tengah membanjirnya produk China di negeri ini.

Pengakuan pengusaha yang satu ini setidaknya menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi produk lokal di tengah kian mengguritanya produk dari China, apalagi pasca-perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan ASEAN dengan China atau China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) pada 1 Januari 2010 lalu. Kini tidak ada satu sudut pun di pusat perdagangan Ibu Kota Jakarta yang bebas dari produk China. Mulai dari produk cendera mata, tas, baju, sepatu, mainan anak hingga alat elektronik seperti ponsel terlihat terpajang rapi di setiap toko.

Saat ini cukup sulit menemukan produk perajin dalam negeri yang “mejang” di etalase toko. Banjirnya produk dari China membuat industri dalam negeri makin terpuruk, lantaran persaingan harga yang sulit mereka imbangi. Akibatnya, produk lokal kini menjadi “tamu” di negerinya sendiri.

Saat ini omzet usahanya menurun drastis bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Saat ini pengunjung sangat sepi, dan akhirnya kami hanya melayani pesanan tas dari perusahaan atau organisasi,” jelas pengusaha industri tas “Tantia Tas” di PIK Jalan Penggilingan Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dia mengaku, sejak dua tahun terakhir omzetnya menurun sampai 60 persen, karena pesanan tidak datang setiap bulan.

b. Kecukupan

Butir 2: Bagaimana pencapaian hasil produksi baik secara kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh UKM setelah ada program pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Jawaban responden terhadap kecukupan implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung kemitraan dapat dilihat pada Tabel 5.4. Pada tabel 5.4 terlihat bahwa 48% responden menyatakan bahwa pencapaian hasil produksi dan pengembangan usaha yang diinginkan belum dapat dipenuhi oleh aparat sesuai dengan keinginan UKM adalah "Tidak Baik", 29% responden menyatakan "Sangat Tidak Baik", 16% responden menyatakan "Cukup Baik", hanya 6% responden yang menyatakan "Sangat Baik", dan hanya 1% yang menyatakan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan oleh UKM pada implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan "Baik".

Tabel 5.4 Kecukupan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Skala Likert	Nilai Jawaban (2)	Frekuensi (3)	Presentase (4)	Skor (2) x (3)
Sangat Baik	1	6	6	6
Baik	2	1	1	2
Cukup Baik	3	16	16	48
Tidak Baik	4	48	48	192
Sangat Tidak Baik	5	29	29	145
Total			100	393

Sebagai pedoman untuk mengetahui kondisi implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval seperti yang tertera pada Tabel 5.3 yang disusun berdasarkan skor terendah sampai tertinggi. Skor terendah adalah 100 (100×1), yang menunjukkan semua jawaban atas butir 1 dari 100 responden adalah 1; sedangkan skor tertinggi adalah 500 (100×5), yang menunjukkan semua jawaban atas butir 1 dari 100 responden adalah 5. Mengacu pada rumus rentang skala pada Bab III, maka diperoleh nilai R_s sebesar 80. Berdasarkan rentang skala pada Tabel 3.2, maka penulis menyusun rentang skala untuk menjawab kondisi tiap instrumen dan dapat dilihat pada Tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel. 5.5 Rentang Skala Kecukupan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Rentang	Kriteria
100 - 180	Sangat Baik
181 - 260	Baik
261 - 340	Cukup Baik
341 - 420	Tidak Baik
421 - 500	Sangat Tidak Baik

Dari Tabel 5.4 di atas terlihat bahwa untuk instrumen butir 2 implementasi kebijakan, yaitu bagaimana pencapaian hasil produksi dan pengembangan usaha yang diinginkan oleh UKM dapat dipenuhi setelah adanya implementasi kebijakan

pengembangan dan pembinaan menghasilkan skor sebesar 131. Mengacu pada Tabel 5.5, skor ini berada pada rentang 4 (empat) yang menunjukkan bahwa kecukupan implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan adalah "Tidak Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung selama ini telah memberikan pencapaian hasil yang "Tidak Baik" dalam hal produksi dan pengembangan usaha yang diinginkan oleh UKM setelah implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan oleh aparat yang terkait.

Kondisi yang masih "Tidak Baik" untuk kecukupan implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung didukung oleh pendapat responden bahwa selama ini pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa membantu pengusaha dalam mengatasi masalah internal yang dihadapi oleh pengusaha khususnya dalam bidang produksi baik masalah kuantitas maupun kualitas.

Ketua Koperasi Industri Kecil PIK Pulogadung Kita Giat Napitupulu mengatakan, saat ini jumlah tenaga kerja yang diserap oleh 495 usaha di PIK hanya empat ribu orang. "Padahal, pada tahun 1997 sebanyak 10.000 orang bekerja di PIK.

Produk China bisa membanjiri Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah karena dukungan pemerintahnya. Giat mencontohkan, pemerintah China berani menurunkan suku bunga bank hingga enam persen setahun bagi para pelaku industri, sementara pemerintah Indonesia terus menaikkan suku bunga hingga 17 persen setahun bagi para pelaku industri. Selain itu, upah tenaga kerja di China juga jauh lebih rendah daripada di Indonesia.

Saat ini, menurut Giat, PIK Pulo Gadung memiliki lima sentra industri yang meliputi industri kerajinan kulit, konveksi, logam, mebel, dan aneka komoditas lainnya, seperti makanan, minuman, percetakan, dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah lebih senang bekerja sama dengan pihak China ketimbang menghidupi pelaku industri kecil di Tanah Air, padahal industri kecil di PIK sudah sangat lengkap.

Kita Giat Napitupulu mencontohkan, kebijakan pembelian kompor gas saat dilakukan konversi minyak tanah ke gas beberapa tahun silam. Saat itu

pemerintah memilih membeli tabung dan kompor gas ke negeri China, dengan harga Rp 50.000 setiap unitnya. “Bila pesan di PIK harga yang kami tawarkan lebih mahal sedikit, yaitu Rp 75.000. Dan bila pesan kepada kami, tentu saja pemerintah akan menghidupkan 80 industri logam yang ada di sini,” jelasnya.

Keberadaan barang-barang China sudah sangat menggurita di pasar Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang di Jakarta kebanyakan adalah buatan China.

c. Efisiensi

Butir 3: Bagaimana manfaat baik secara finansial terutama kemudahan dalam memperoleh modal setelah UKM mendapatkan program pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Jawaban responden terhadap efisiensi implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan dapat dilihat pada Tabel 5.6. Responden yang menyatakan bahwa manfaat finansial yang didapat UKM dalam pengembangan dan pembinaan adalah "Tidak Baik" sebesar 38%, responden yang menyatakan "Cukup Baik" sebesar 10 %, responden yang menyatakan "Sangat Tidak Baik" sebesar 26%, responden menyatakan "Baik" sebesar 23 %, dan menyatakan bahwa bantuan pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam masalah finansial “Sangat Baik” sebesar 3%.

Tabel 5.6

Efisiensi Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Skala Likert	Nilai Jawaban (2)	Frekuensi (3)	Presentase (4)	Skor (2) x (3)
Sangat Baik	1	3	3	3
Baik	2	23	23	46
Cukup Baik	3	10	10	30
Tidak Baik	4	38	38	152
Sangat Tidak Baik	5	26	26	130
Total			100	361

Dari Tabel 5.7 Jawaban Responden terhadap efisiensi implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan terlihat bahwa instrumen butir 3, yaitu Bagaimana manfaat baik secara finansial terutama kemudahan dalam memperoleh modal setelah UKM mendapatkan program pengembangan dan pembinaan menghasilkan 361. Mengacu pada tabel 5.7 skor ini berada pada rentang 4 (empat) yang menunjukkan bahwa efisiensi implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan adalah "Tidak Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM dikawasan PIK Pulogadung belum bisa secara baik memberikan manfaat finansial bagi UKM di kawasan PIK Pulogadung.

Tabel 5.7
Rentang Skala Efisiensi Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Rentang	Kriteria
100 - 180	Sangat Baik
181 - 260	Baik
261 - 340	Cukup Baik
341 - 420	Tidak Baik
421 - 500	Sangat Tidak Baik

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri,

masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

d. Keadilan

Butir 4 : Bagaimana rasa keadilan yang diterima oleh UKM dalam pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Responden yang menyatakan bahwa rasa keadilan yang diterima UKM dalam pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung "Tidak Baik" sebesar 37 %, responden yang menyatakan bahwa rasa keadilan yang diterima UKM adalah "Sangat Tidak Baik" sebesar 33%, responden yang menyatakan bahwa rasa keadilan yang diterima UKM " Baik" adalah sebesar 15 %, dan responden yang menyatakan bahwa rasa keadilan yang diterima UKM dalam pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan adalah sebesar 12% menyatakan "Cukup Baik" dan sebesar 3% menyatakan "Sangat Baik"

Tabel 5.8 Keadilan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Skala Likert	Nilai Jawaban (2)	Frekuensi (3)	Presentase (4)	Skor (2) x (3)
Sangat Baik	1	3	3	3
Baik	2	15	15	30
Cukup Baik	3	12	12	36
Tidak Baik	4	37	37	148
Sangat Tidak Baik	5	33	33	165
Total			100	382

Tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa instrumen butir 4, yaitu bagaimana rasa keadilan yang diterima oleh UKM dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan menghasilkan skor 382 dan berada pada kondisi "Tidak Baik". Mengacu pada Tabel 5.9, skor ini mengindikasikan bahwa rasa keadilan yang diterima UKM dalam program pengembangan dan pembinaan adalah "Tidak Baik". Menurut responden, hal ini disebabkan kebijakan pembinaan dapat berlaku bagi semua UKM tetapi dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Usaha.

Tabel. 5.9 Rentang Skala Keadilan Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Rentang	Kriteria
100 - 180	Sangat Baik
181 - 260	Baik
261 - 340	Cukup Baik
341 - 420	Tidak Baik
421 - 500	Sangat Tidak Baik

Responden merasa pemerintah harus mengembangkan Kerjasama yang Setara. Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam mengembangkan UKM, meskipun terus diperbaiki, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

e. **Responsivitas**

Butir 5: Sejauhmana kebijakan pengembangan dan pembinaan dapat memenuhi kebutuhan kemudahan pemasaran, pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi bagi UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Responden yang menyatakan bahwa kebijakan pengembangan dan pembinaan dapat memenuhi kebutuhan kemudahan pemasaran, pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi bagi UKM adalah “Tidak Baik” sebesar 32%. Responden yang menyatakan “Cukup Baik” sebesar 25%, responden sebesar 21% yang menyatakan “Sangat Tidak Baik” , dan responden yang

menyatakan “Baik” hanya 18%. Ada responden yang menyatakan “Sangat Baik” sebesar 4%.

Tabel 5.10

Responsivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Skala Likert	Nilai Jawaban (2)	Frekuensi (3)	Presentase (4)	Skor (2) x (3)
Sangat Baik	1	4	4	4
Baik	2	18	18	36
Cukup Baik	3	25	25	75
Tidak Baik	4	32	32	128
Sangat Tidak Baik	5	21	21	105
Total			100	348

Tabel 5.10 di atas menunjukkan bahwa instrumen 5, yaitu sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan kemudahan pemasaran, pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi bagi UKM menghasil 348 dan mengacu pada tabel 5.11, skor tersebut berada pada kondisi “Tidak Baik”. Hal ini didukung oleh pernyataan responden mengenai manfaat kebijakan pengembangan dan pembinaan yang dapat dilihat pada Tabel 5.11 di bawah ini.

Tabel. 5.11

Rentang Skala Responsivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Rentang	Kriteria
100 - 180	Sangat Baik
181 - 260	Baik
261 - 340	Cukup Baik
341 - 420	Tidak Baik
421 - 500	Sangat Tidak Baik

Penilaian yang “Tidak Baik” terhadap responsivitas implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung dirasa belum bisa mengakomodir kebutuhan kemudahan pemasaran, pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi bagi UKM

Masalah permodalan UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

Dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang

disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

f. Efektivitas

Butir 6 : Sejauhmana kebijakan pengembangan dan pembinaan dapat memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Jawaban responden terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung pada Tabel 5.12 di bawah ini

Table 5.12 Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Skala Likert	Nilai Jawaban (2)	Frekuensi (3)	Presentase (4)	Skor (2) x (3)
Sangat Baik	1	0	0	0
Baik	2	22	22	44
Cukup Baik	3	27	27	81
Tidak Baik	4	29	29	116
Sangat Tidak Baik	5	22	22	110
Total			100	351

Pada Tabel 5.12 terlihat bahwa 29% responden menyatakan bahwa kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung masih “Tidak Baik” dalam memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang 27% responden “Cukup Baik”, 22% menyatakan “Baik” dan “Sangat Tidak Baik”, dan tidak ada responden yang menganggap kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung sudah efektif.

Tabel. 5.13

Rentang Skala Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM

Rentang	Kriteria
100 - 180	Sangat Baik
181 - 260	Baik
261 - 340	Cukup Baik
341 - 420	Tidak Baik
421 - 500	Sangat Tidak Baik

Data pada Tabel 5.13 menunjukkan bahwa untuk instrumen butir 6, yaitu sejauh mana kebijakan pembinaan dapat memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat mempunyai skor 351, Mengacu pada Tabel 5.13, skor ini berada pada kondisi “Tidak Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan Pulogadung sudah “Tidak Baik”.

Para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung perlu dikembangkan BDSP atau Lembaga Penyedia Jasa Pengembangan Usaha dan KKMB atau konsultan Keuangan Mitra Bank yang akan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UKM dalam pengembangan usaha dan dalam mengakses permodalan melalui kredit bank. Diharapkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kawasan PIK Pulogadung turut peduli pada pemberdayaan UKM dengan menjadi BDSP (lembaga penyedia jasa pengembangan usaha) dan KKMB atau konsultan Keuangan Mitra Bank.

Pengembangan UKM memerlukan regulasi Pemerintah Kota yang berpihak pada UKM khususnya dalam :

- (1) Membentuk sentra-sentra pengembangan UKM atau klaster-klaster UKM yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber daya dalam pengembangan UKM
- (2) Program pengembangan kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan daya saing UKM
- (3) Pengembangan ekonomi kreatif yang menciptakan lapangan kerja
- (4) Peningkatan kemitraan dan jejaring kerja UKM melalui klaster UKM
- (5) Memberikan prioritas dan meningkatkan efektivitas pengalokasian APBD untuk pemberdayaan UKM.
- (6) Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendukung usaha UKM, mulai dari Lembaga keuangan alternative, Pusat Layanan Bisnis/BDSP, incubator, Trading House dan lembaga pendukung lainnya.
- (7) Meningkatkan akses pasar UKM melalui promosi dengan sering mengikutsertakan UKM pada pameran di tingkat regional, nasional dan internasional dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis produk yang dipamerkan dan lokasi pameran serta calon pembeli (*buyer*).
- (8) Perbankan agar lebih gencar dan agresif dalam menyalurkan KUR sehingga kinerja dan target penyaluran KUR dapat terpenuhi. Perbankan juga agar lebih aktif melakukan upaya pembinaan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi manajemen dan teknis melalui

pembentukan unit layanan konsultasi UKM bagi mitra binaan/debiturnya.

5.1.2.2 Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKM dalam Menghadapi ACFTA

A. Variabel Sumberdaya

Menurut Edwards (1980:10-11), salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada fasilitas-fasilitas (sarana dan prasarana). Sarana dan prasarana merupakan salah satu jenis sumberdaya yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Para pelaksana harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan sebuah kebijakan atau program.

Variabel sumberdaya terdiri dan 9 instrumen, yaitu instrumen No. 1 sampai dengan No. 9. Distribusi frekuensi variabel sumberdaya dapat dilihat pada Tabel 5.14 di bawah ini.

Tabel 5.14 Distribusi Frekuensi Variabel Sumberdaya

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Skor
		1	2	3	4	5	Total
		SB	B	CB	TB	STB	
1	Selama ini UKM mendapat bimbingan dan bantuan pihak pemerintah dalam mengatasi kesulitan tehnik seperti masalah produksi, permodalan dan pemasaran dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	4	7	13	37	39	400
2	Materi pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah selama	2	0	21	39	38	411

	ini sesuai dengan kebutuhan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA						
3	Dalam program pengembangan dan pembinaan pemerintah memberikan program khusus atau pembinaan sesuai dengan kluster atau kelompok usaha masing-masing yang ada dikawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	0	11	4	38	47	421
4	Dengan program pengembangan dan pembinaan para pengusaha mendapat peningkatan kemampuan baik dari segi permodalan, pemasaran, kemampuan SDM, dan tehnik produksi serta informasi dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	2	3	33	40	22	377
5	Selama ini UKM memperoleh sarana dan prasarana dari pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	1	6	17	48	28	396
6	Selama ini UKM diberikan kesempatan dan informasi yang	0	8	15	49	28	397

	seluas-luasnya oleh pemerintah yang sesuai untuk memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA						
7	UKM selama ini memperoleh bantuan berupa perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi dari pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	2	6	28	36	28	382
8	UKM selama ini memperoleh bantuan berupa perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi dari pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	0	6	22	44	28	394
9	Selama ini UKM memperoleh pelayanan dan kemudahan pendanaan dari lembaga pembiayaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA.	2	14	33	31	20	334
							3512

Sebagai pedoman untuk mengetahui kondisi variable Sumberdaya, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval. Skor terendah adalah 900 (100 x 9 x 1). Yang menunjukkan semua jawaban dari 9 butir

instrument variable kepatuhan dari 100 responden adalah 1; sedangkan skor tertinggi adalah 4500 (100 x 9 x 5), yang menunjukkan semua jawaban dari 6 butir instrument variable sumberdaya dari 100 responden adalah 5.

Berdasarkan rentang skala pada Tabel 3.2, maka penulis menyusun rentang skala untuk menjawab kondisi variabel sumberdaya dan dapat dilihat pada Tabel 5.15 di bawah ini.

Tabel 5.15 Rentang Kriteria Untuk Variabel Sumberdaya

Rentang	Kriteria
900 - 1620	Sangat Baik
1621 - 2340	Baik
2341 - 3060	Cukup Baik
3061 - 3780	Tidak Baik
3781 - 4500	Sangat Tidak Baik

Data pada Tabel 5.14 menunjukkan bahwa untuk variabel sumberdaya instrumen butir 1 sampai 9, yaitu sejauh mana kebijakan pembinaan dapat memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat mempunyai skor 3512, Mengacu pada Tabel 5.15, skor ini berada pada kondisi “Tidak Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel sumberdaya pada implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung adalah “Tidak Baik”.

Van Mater dan Van Horn (1974:465) dalam Widodo (2001:201) mengemukakan sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Kurangnya atau terbatasnya sumber daya dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, tidak mempunyai kemampuan (skill) untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Dengan demikian, faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung adalah:

a) Sumber Daya Manusia (Aparat)

Kebijakan pengembangan UKM ini melibatkan setiap elemen pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi sampai kepada pemerintah kota. Dengan demikian, pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah memiliki peranan dalam implementasi kebijakan yang telah dirumuskan untuk memajukan sektor UKM yang selama ini bisa menjadi potensi bagi penopang perekonomian. Demikian halnya di kawasan PIK Pulogadung, pembinaan dan pengembangan UKM tidak terlepas dari peranan aparat pemerintah daerah.

Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UKM ini didukung oleh kekuatan sumber daya manusia (selanjutnya di sebut aparat). Dalam konteks ini setiap aparat harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari pimpinan.

Selain dari kuantitas, kelayakan dan ketepatan atau kualitas aparat yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Dengan kata lain, kualitas aparat turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung.

Dengan melihat kualitas aparat yang didasarkan pada pendidikan terakhir dan kompetensi yang tidak sesuai penempatan ataupun kewenangannya, maka implementasi kebijakan ini sedikit terhambat. Keterbatasan kemampuan (skill) dan kewenangan aparat tersebut membuat pembinaan teknis dan manajemen yang diberikan belum mencapai hasil yang optimal.

Kualitas aparat tidak hanya ditunjang oleh pendidikan formal, akan tetapi juga oleh pendidikan non formal pada aparat,

mengingat kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan informal dalam bentuk pelatihan-pelatihan khususnya di bidang industri kecil dan menengah baik teknis dan manajemen. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, diketahui kualitas aparat yang bertanggung jawab pada program pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal aparat yang menangani bidang industri kecil dan menengah masih sangat terbatas dan belum menyeluruh.

Dari segi kuantitas, juga dapat dilihat aparat yang memiliki wewenang dalam pembinaan UKM ini juga sangat kurang karena tidak seimbang dengan jumlah UKM dan kebutuhan untuk terus berkembang makin hari makin meningkat, kekurangan jumlah aparat menimbulkan tidak efektifnya kebijakan tersebut dijalankan.

Dengan demikian, sumber daya manusia aparat baik secara kuantitas maupun kualitas akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan pelaksana dari kebijakan tersebut.

b) Sumber Daya Manusia UKM

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia UKM (yang selanjutnya disebut SDM UKM). Dalam implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung terlihat masih ada keengganan disebagian pengusaha UKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural dan tingkat pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya program pengembangan dan langkah pembinaan yang dilakukan berjalan kurang maksimal.

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM tidak akan dapat berjalan lancar dan baik jika pengusaha itu sendiri tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk berkembang. Program pengembangan dan pembinaan yang

pemerintah buat baru bisa berjalan jika para pengusaha mau tanggap terhadap program yang dibuat.

Pendidikan pengusaha UKM juga mempengaruhi pemahaman pengusaha UKM juga mempengaruhi pemahaman UKM terhadap kebijakan pemerintah tentang pengembangan dan pembinaan UKM yang ada di kawasan PIK Pulogadung. Dari pengamatan peneliti, ditemukan lebih dari 50% pengusaha UKM yang ada tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal yang memadai. Rata-rata tingkat pendidikan pendidikan pengusaha UKM hanya sampai pendidikan dasar atau lanjutan pertama. Hal ini membuat pengusaha UKM tidak mudah memahami apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah yang telah diperuntukkan untuk perkembangan UKM yang ada di kawasan PIK Pulogadung.

Kondisi seperti ini peneliti temukan di sentra furniter, pengusaha di sentra ini sebanyak 8 UKM mengaku bahwa usaha ini adalah usaha turun temurun, sehingga apa yang mereka jalankan dalam usaha hanya mengalami sedikit perubahan dalam bentuk maupun kualitas. Pendidikan mereka rata-rata hanya sampai sekolah menengah pertama saja, mereka juga merasa dengan pendidikan seperti ini mereka kurang dapat berkembang baik secara ekonomi terutama untuk mendapat tambahan modal dan penguasaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas produksi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Subdin Industri Kecil Menengah DKI Jakarta bahwa selain keterbatasan aparat dilapangan, kendala yang juga kami hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UKM adalah kesedian pengusaha UKM untuk menerima perubahan dan pembinaan dari aparat, penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan dan kemampuan pengusaha UKM itu sendiri.

Seharusnya pemerintah juga memperhatikan tingkat pendidikan pengusaha UKM yang ada dalam merumuskan,

menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan UKM. Hal ini mengingat masih banyaknya pengusaha UKM yang masih berpendidikan rendah. Dengan lebih memperhatikan tingkat pendidikan pengusaha UKM maka sosialisasi atau implemetasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat diterima dan dipahami oleh pengusaha UKM yang ada.

Jadi, dengan demikian pendidikan dan skill pengusaha UKM merupakan faktor yang juga tidak kalah pentingnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan UKM yang telah digariskan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan pendidikan dan skill pengusaha UKM ini, maka semua program dapat dijalankan dengan optimal.

B: Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi terdiri dari 4 instrumen, yaitu instrumen No. 10 sampai dengan No. 13. Distribusi frekuensi variabel komunikasi dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Total Skor
		1	2	3	4	5	
		SB	B	CB	TB	STB	
10.	UKM mendapatkan informasi dalam bentuk pembinaan yang jelas dan tepat sasaran oleh pemerintah dalam peningkatan SDM, pemasaran, permodalan dan penguasaan teknologi terbaru dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi guna peningkatan daya saing	3	12	33	25	23	353

	dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA						
11.	Program pembinaan yang dilakukan selalu mengikuti perkembangan dari bidang IPTEK terutama dalam pengembangan SDM dan penguasaan teknologi terbaru dalam produksi serta sistem informasi pemasaran dengan adanya BDS atau pusat informasi bisnis terpadu dikawasan ini dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	6	1	16	48	29	393
12.	Komunikasi antara UKM dengan pemerintah selama ini tidak mengalami hambatan sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA.	3	22	10	38	26	359
13.	Petugas pemerintah dan pihak lain yang terlibat selalu menyamakan persepsi dengan para pengusaha guna berjalannya program pengembangan dan pembinaan secara efektif dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus	3	15	12	37	33	382

	ACFTA						
							1487

Sebagai pedoman untuk mengetahui kondisi variable komunikasi, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval. Skor terendah adalah 400 ($100 \times 4 \times 1$). Yang menunjukkan semua jawaban dari 4 butir instrument variable kepatuhan dari 100 responden adalah 1; sedangkan skor tertinggi adalah 2000 ($100 \times 4 \times 5$), yang menunjukkan semua jawaban dari 4 butir instrument variable sumberdaya dari 100 responden adalah 5. Berdasarkan rumus rentang skala pada Bab III, diperoleh nilai Rs sebesar 320.

Tabel 5.17 Rentang Kriteria Untuk Variabel Komunikasi

Rentang	Kriteria
400 - 720	Sangat Baik
721 - 1040	Baik
1041 - 1360	Cukup Baik
1361 - 1680	Tidak Baik
1681 - 2000	Sangat Tidak Baik

Data pada Tabel 5.17 menunjukkan bahwa untuk variabel komunikasi instrumen butir 10 sampai 13, yaitu sejauh mana kebijakan pembinaan dapat memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat mempunyai skor 1487, Mengacu pada Tabel 5.18, skor ini berada pada kondisi “Tidak Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel komunikasi pada implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung adalah “Tidak Baik”.

Menurut Edward III (1980:17) komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai penting tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi policy maker. Implementasi yang efektif, para pembuat kebijakan dalam meminta para pelaksana tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, yaitu aruh komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas. Dengan kata lain, agar dicapai

implementasi yang efektif apabila para pelaksana mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan komunikasi yang baik, maka koordinasi yang efektif juga dapat dicapai (Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Reynalda Madjid, hasil wawancara tanggal 5 Desember 2011).

Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan UKM diperlukan adanya koordinasi antar dinas yang terkait. Dalam hal ini komunikasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program-program pengembangan UKM yang diberikan kepada pelaku usaha UKM. Dari hasil wawancara bisa disimpulkan komunikasi dan koordinasi antara Dinas Propinsi dengan Kotamadya sangat lemah.

Komunikasi lintas sektor belum berjalan baik serta koordinasi dengan aparat Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota mengalami hambatan karena tidak ada lagi garis komando. Masih seringnya terjadi keterlambatan dalam penyampaian data/informasi dari Kotamada berakibat terhambatnya analisis pencapaian hasil dan terhadap masalah yang timbul di daerah dan hal ini disebabkan masih melakukan pembenahan intern sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dalam rangka otonomi daerah.

Selanjutnya komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha UKM merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan yang dibuat. Komunikasi kebijakan pengembangan dan pembinaan yang dibuat. Komunikasi merupakan faktor penting agar program-program yang dibuat pemerintah akan sampai ke pengusaha UKM. Demikian juga sebaliknya, dengan adanya komunikasi pelaku UKM juga dapat menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi kepada pemerintah, sehingga permasalahan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan selanjutnya oleh pemerintah. Komunikasi yang kurang harmonis dan belum berjalan dengan baik antara pemerintah dengan pengusaha UKM membuat kebijakan yang telah dibuat menjadi tidak bermanfaat bagi pihak-pihak yang dijadikan sasaran penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Dengan komunikasi dari implementor kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di DKI Jakarta khususnya di kawasan PIK Pulogadung

diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang manfaat dari kebijakan tersebut untuk mewujudkan pengembangan industri berupa:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah yang dihasilkan.
2. Terwujudnya struktur UKM yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara UKM dengan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri.
3. Semakin banyaknya UKM yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis UKM.
4. Meningkatnya ekspor produk UKM, baik dalam nilai, dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang bernilai tinggi atau berteknologi dan berpangsa ekspor nasional.
5. Terwujud upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya utamanya yang berciri khas daerah dan mempunyai nilai sejarah maupun ilai seni yang tinggi, sehingga kekayaan seni dan budaya nasional tersebut sekaligus dapat berkembang karena dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Esensi regulasi atau kebijakan adalah menciptakan keteraturan, kepastian hukum dan komitmen yang jelas dalam pengembangan UKM. Bila urusan-urusan ekonomi lainnya diregulasi oleh Pemerintah Daerah, maka perangkat hukum atau program tentang pembinaan pelaku ekonomi kecil atau UKM perlu dibuat. Hal ini sangat penting, terutama bagi pengusaha UKM untuk menuntut dan mengontrol pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan UKM.

Demikian juga kondisi yang seharusnya diciptakan di DKI Jakarta khususnya dikawasan PIK Pulogadung.

Para pengusaha UKM di kawasan PIK Pulogadung masih merasa bahwa aparat kurang memperhatikan perkembangan usaha mereka, selama ini kebanyakan dari mereka merasa bahwa usaha mereka sepertinya jalan ditempat, tanpa adanya pembinaan dari pemerintah setempat. Sedangkan pihak aparat malah merasakan bahwa para pengusaha UKM di kawasan PIK kurang menanggapi undangan pemerintah khususnya aparat di lapangan untuk mensosialisasikan program yang dibuat, sehingga seringkali terjadi beda pendapat antara para aparat dengan pengusaha di kawasan PIK Pulogadung menandakan program-program yang dibuat pemerintah daerah setempat tidak sampai kepada pelaku ekonomi.

Usaha Kecil Mengengah sangat membutuhkan peran (campur tangan) pemerintah dalam peningkatan kemampuan bersaing dan menghadapi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UKM, yaitu modal, sumber daya manusia, pemasaran dan bahan baku. Selain dari pada itu, pemerintah dalam meningkatkan usaha mereka untuk menopang perekonomian setempat. Tetapi peneliti menemukan fakta lain di lapangan, para pengusaha UKM hanya diberikan bantuan sebatas bimbingan dan penyuluhan tanpa ada tindak lanjut.

Dengan demikian, kebijakan dan strategi pengembangan tersebut di atas. Implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan PIK Pulogadung dirasa belum dapat optimal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan berupa program yang telah dirumuskan dalam rencana pengembangan UKM yang bertujuan untuk megembangkan kegiatan usaha UKM belum sepenuhnya dapat terealisasi khususnya program-program yang berkaitan dengan permasalahan modal, sumber daya manusia, pemasaran, bahan baku serta penguasaan teknologi yang berkaitan dengan segala kegiatan UKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung. Mengingat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan banyak stakeholder yang memiliki kompetensi dan kepentingan masing-masing yang terlibat. Namun, kenyataannya komunikasi dan koordinasi antara dinas propinsi, dinas kotamadya dan pengusaha

UKM belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilakukan agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan adalah melalui sosialisasi yang terus menerus tentang kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung.

C. Variabel Kepatuhan

Variabel kepatuhan terdiri dari 4 instrumen, yaitu instrumen No. 14 sampai dengan No. 17. Distribusi frekuensi variabel komunikasi dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Kepatuhan dalam implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan banyak ditentukan oleh konsistensi dan ketaatan para pelaksana kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan serta daya tanggap untuk memenuhi kebutuhan publik. Distribusi frekuensi variabel kepatuhan dapat dilihat pada label 5.18.

Tabel 5.18 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan

NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
		SB	B	CB	TB	STB	
14.	Selama ini usaha besar selalu menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur pemerintah memberikan informasi yang cukup guna mempersiapkan para pengusaha dalam melaksanakan program pengembangan dan pembinaan yang telah dipersiapkan dalam menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	3	20	42	18	17	326
15.	Pihak-pihak yang terkait	0	11	6	48	35	407

	bersatu pada serta sejalan dalam program pengembangan dan pembinaan UKM dikawasan ini seperti aparat pemerintah, para pengusaha, pihak yang melakukan kemitraan dengan UKM, para pengusaha ritel dan lembaga keuangan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA						
16.	Dukungan dari aparat pemerintah dalam program pengembangan dan pembinaan UKM dirasa cukup dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	0	17	24	33	26	368
17.	Aparat yang bertanggung jawab dalam program pengembangan dan pembinaan mempunyai kemampuan yang baik dalam menyampaikan program dan membantu pengusaha dalam mengaplikasikannya dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA	10	9	0	56	25	377
							1478

Sebagai pedoman untuk mengetahui kondisi variabel kepatuhan, digunakan pedoman interpretasi yang merujuk pada 5 (lima) interval. Skor

terendah adalah 400 ($100 \times 4 \times 1$). Yang menunjukkan semua jawaban dari 4 butir instrument variable kepatuhan dari 100 responden adalah 1; sedangkan skor tertinggi adalah 2000 ($100 \times 4 \times 5$), yang menunjukkan semua jawaban dari 4 butir instrument variabel kepatuhan dari 100 responden adalah 5. Berdasarkan rumus rentang skala pada Bab III, diperoleh nilai Rs sebesar 320.

Tabel 5.19 Rentang Kriteria Untuk Variabel Kepatuhan

Rentang	Kriteria
400 - 720	Sangat Baik
721 - 1040	Baik
1041 - 1360	Cukup Baik
1361 - 1680	Tidak Baik
1681 - 2000	Sangat Tidak Baik

Data pada Tabel 5.18 menunjukkan bahwa untuk variabel kepatuhan instrumen butir 14 sampai 17, yaitu sejauh mana kebijakan pembinaan dapat memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat mempunyai skor 1478, Mengacu pada Tabel 5.19, skor ini berada pada kondisi “Tidak Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kepatuhan pada implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung adalah “Tidak Baik”.

Kepatuhan dalam implementasi kebijakan publik bisa diidentikkan dengan disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan (Edward III dalam Widodo, 2001:203). Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif atau efisien maka pelaksana harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung juga dipengaruhi oleh kecenderungan sikap atau pandangan aparat birokrasi terhadap kebijakan tersebut. Menurut peneliti, tidak semua aparat yang berwenang

dengan kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung menganggap bahwa tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

Para pengusaha UKM juga menganggap bahwa selama ini tidak ada perhatian dari dinas terkait. Pelaku usaha merasa tidak pernah adanya pembinaan dari pemerintah. Sehingga pelaku usaha hanya menjalankan usaha mereka menurut kemauan dan kemampuan sendiri. Pengusaha merasa bahwa pemerintah hanya menekankan bahwa mereka harus bisa memberikan kontribusi perekonomian bagi ekonomi daerah tanpa adanya perhatian terhadap usaha mereka.

Sumbangan para pengusaha UKM terhadap perekonomian daerah tidak dibarengi dengan dengan binaan yang sangat diharapkan dari pemerintah. Para pengusaha merasa pemerintah terkadang tidak mau mengerti atau pura-pura tidak mengerti kalau kewajiban mereka dalam melakukan pembinaan terhadap sektor usaha kecil menengah.

Kondisi ini sangat ironis karena mengingat UKM mempunyai potensi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap aparat pemerintah menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan terutama kepatuhan mereka melaksanakan tugas mereka dalam melakukan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung.

5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan UKM Dalam Menghadapi ACFTA di Kawasan PIK Pulogadung

Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung.

Namun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan pelaku ekonomi kecil yang tangguh adalah pemilihan dan penetapan strategi (program) untuk dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang dimaksud adalah: (1) mengembangkan pelaku UKM yang sudah ada supaya menjadi tangguh, atau (2) mengembangkan wirausaha baru yang tangguh.

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam pengimplementasian kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung, berikut dapat diuraikan berbagai faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pengembangan UKM adalah sebagai berikut:

A. Komunikasi

Menurut Edward III (1980:17) komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai penting tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi policy maker. Implementasi yang efektif, para pembuat kebijakan dalam meminta para pelaksana tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, yaitu aruh komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas. Dengan kata lain, agar dicapai implementasi yang efektif apabila para pelaksana mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan komunikasi yang baik, maka koordinasi yang efektif juga dapat dicapai (Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Reynalda Madjid, hasil wawancara tanggal 5 Desember 2011).

Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan UKM diperlukan adanya koordinasi antar dinas yang terkait. Dalam hal ini komunikasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program-program pengembangan UMKM yang diberikan kepada pelaku usaha UKM. Dari hasil wawancara bisa disimpulkan komunikasi dan koordinasi antara Dinas Propinsi dengan Kotamadya sangat lemah.

Komunikasi lintas sektor belum berjalan baik serta koordinasi dengan aparat Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota mengalami hambatan karena tidak ada lagi garis komando. Masih seringnya terjadi keterlambatan dalam penyampaian data/informasi dari Kotamada berakibat terhambatnya analisis pencapaian hasil dan terhadap masalah yang timbul di daerah dan hal ini disebabkan masih melakukan pembenahan intern sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dalam rangka otonomi daerah.

Selanjutnya komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha UKM merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pengembangan dan

pembinaan yang dibuat. Komunikasi kebijakan pengembangan dan pembinaan yang dibuat. Komunikasi merupakan faktor penting agar program-program yang dibuat pemerintah akan sampai ke pengusaha UKM. Demikian juga sebaliknya, dengan adanya komunikasi pelaku UKM juga dapat menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi kepada pemerintah, sehingga permasalahan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan selanjutnya oleh pemerintah. Komunikasi yang kurang harmonis dan belum berjalan dengan baik antara pemerintah dengan pengusaha UKM membuat kebijakan yang telah dibuat menjadi tidak bermanfaat bagi pihak-pihak yang dijadikan sasaran penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pengusaha PIK Pulogadung semuanya mengatakan tidak pernah diperhatikan dan dibina oleh pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan daya saing dan sudah mensosialisasikan era pasar global termasuk ACFTA. Bahkan pengusaha UKM tersebut tidak mengetahui adanya program pemerintah yang diperuntukkan untuk pengembangan UKM. Kondisi tersebut dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut ini:

Pengusaha UKM pada Sentra Furniter (28 November 2011):

“Sejak otonomi daerah, kami tidak pernah memperoleh pembinaan dari pemda. Selama ini pemuda hanya melakukan pendataan dan mendengarkan keluhan kami. Tapi dari itu hanya sebatas saat itu saja, tanpa tindak lanjut dari keluhan kami. Dari sejak zaman krisis dan dimulainya masa perdagangan bebas hingga yang paling akhir ini ACFTA, kami pun tidak tahu sebenarnya apa itu ACFTA yang kami tahu hanya makin banyaknya produk China yang masuk ke pasaran dan makin terpuruknya para pengusaha tetapi pemerintah tidak coba membantu para pengusaha malah berpihak pada barang-barang impor yang makin merajai pasar.”

Pengusaha UKM pada sentra kulit (28 November 2011):

“Selama ini pemda hanya melakukan pendataan dan mendengarkan keluhan kami. Tapi itu hanya sebatas saat itu saja, tanpa adanya tindak

lanjut dari keluhan kami. Usaha kami sama sekali tidak diperhatikan, terlebih lagi setelah adanya perjanjian perdagangan bebas. Dan mengenai ACFTA kamipun tidak pernah tahu apa itu yang kami tahu produk cina makin banyak di pasaran dan pemerintah seperti tutup mata melihat keadaan kami yang tercekik”

Pengusaha UKM pada sentra garmen dan konveksi (28 November 2011):

“Selama ini pemda hanya melakukan pendataan dan mendengarkan keluhan kami. Tapi itu hanya sebatas saat itu saja, tanpa ada tindak lanjut dari keluhan kami. Pendataan terhadap usaha kami tidak diikuti dengan pemberian pembinaan dan perhatian yang lebih serius terhadap usaha kami apalagi untuk melindungi kami dari produk serbuan produk Cina, dan kami tidak tahu kalau ada perjanjian yang membebaskan pajak masuk.”

Dari ilustrasi wawancara dengan para pengusaha dari 3 sentra dikawasan PIK Pulogadung penulis menyimpulkan sebagian besar pengusaha UKM di kawasan PIK Pulogadung yang berjumlah 495 tidak mengetahui dengan jelas kebijakan pengembangan UKM apa yang dilaksanakan dalam menghadapi pasar bebas khususnya ACFTA dan bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui apa hakekat dari ACFTA itu sendiri, yang mereka tahu saja perdagangan bebas makin memperburuk kondisi usaha mereka.

Implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan PIK Pulogadung dalam rangka meningkatkan daya saing dan sudah mensosialisasikan era pasar global termasuk ACFTA dirasa belum dapat optimal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan berupa program yang telah dirumuskan dalam rencana pengembangan UKM yang bertujuan untuk megembangkan kegiatan usaha UKM belum sepenuhnya dapat terealisasi khususnya program-program yang berkaitan dengan permasalahan modal, sumber daya manusia, pemasaran, bahan baku serta penguasaan teknologi yang berkaitan dengan segala kegiatan UKM.

Para pengusaha UKM di kawasan PIK Pulogadung masih merasa bahwa aparat kurang memperhatikan perkembangan usaha mereka, selama ini kebanyakan dari mereka merasa bahwa usaha mereka sepertinya jalan ditempat, tanpa adanya pembinaan dari pemerintah setempat. Sedangkan pihak aparat malah merasakan bahwa para pengusaha UKM di kawasan PIK kurang menanggapi undangan pemerintah khususnya aparat di lapangan untuk mensosialisasikan program yang dibuat, sehingga seringkali terjadi beda pendapat antara para aparat dengan pengusaha di kawasan PIK Pulogadung menandakan program-program yang dibuat pemerintah daerah setempat tidak sampai kepada pelaku ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing dan sudah mensosialisasikan era pasar global termasuk ACFTA.

Usaha Kecil Mengengah sangat membutuhkan peran (campur tangan) pemerintah dalam peningkatan kemampuan bersaing dan menghadapi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UKM, yaitu modal, sumber daya manusia, pemasaran dan bahan baku. Selain dari pada itu, pemerintah dalam meningkatkan usaha mereka untuk menopang perekonomian setempat. Tetapi peneliti menemukan fakta lain di lapangan, para pengusaha UKM hanya diberikan bantuan sebatas bimbingan dan penyuluhan tanpa ada tindak lanjut.

Komunikasi yang terjalin antara aparat pembina dan para pengusaha belum maksimal dan tidak baik. Para pengusaha belum merasa kalau para aparat pembina yang bertugas di PIK Pulogadung pun belum memberikan informasi yang memadai baik berupa program-program apa saja yang diberikan untuk pembinaan dan pengembangan UKM dan Pola pembinaan terhadap UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menghadapi ACFTA dan bahkan sosialisasi tentang kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era pasar bebas sebelumnya seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Cooperation) dan WTO (World Trade Organization) kepada seluruh kelompok UKM dan koperasi tidak pernah disampaikan oleh mereka. Hal ini terlihat dari wawancara penulis dengan pengusaha di sentra aneka komoditi

Pengusaha UKM pada sentra aneka komoditi (28 November 2011):

“Selama ini pemda tidak pernah bicara soal program pembinaan, apalagi bicara soal produk unggulan dan peningkatan daya saing. Pemerintah

juga tidak pernah bicara soal program menghadapi perdagangan bebas apalagi ACFTA, yang kami tahu karena bebasnya barang China masuk ke Indonesia omset kami yang sudah kecil makin kecil saja. “

Pernyataan para pengusaha ini berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi DKI Jakarta bahwa aparat dilapangan sudah mensosialisasikan mengenai pelaksanaan program-program pengembangan UKM yang disusun dengan memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta kemampuan Daerah. Program pengembangan ini sudah termasuk pengembangan perwilayan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan UKM di PIK Pulogadung dalam rangka meningkatkan daya saing dan sudah mensosialisasikan era pasar global termasuk ACFTA. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Industri, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta (hasil wawancara 30 November 2011):

“ Setiap program dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM sudah kami sosialisasikan ke lapangan seperti program Pengembangan pewayalahan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi UKM dan koperasi dalama rangka meningkatkan daya saing, kami juga sudah mensosialisasikan tentang kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trae Area), APEC (Asia Pacific Cooperation) dan WTO (World Trade Organization), hingga yang terbaru ACFTA kepada seluruh kelompok UKM yang ada di PIK Pulogadung”

Pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan publik atas informasi yang dibutuhkan, misalnya informasi pasar, informasi produk, harga. Lembaga-lembaga penyedia informasi sangat diperlukan bagi pengembangan dan dinamika UKM. perkembangan dan dinamika usaha sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap informasi, termasuk penguasaan atas teknologi informasi. penyuluhan tanpa ada tindak lanjut. Agar esensi regulasi atau kebijakan untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum dan komitmen yang jelas dalam pengembangan UKM. Bila urusan-urusan ekonomi lainnya diregulasi oleh Pemerintah Daerah, maka perangkat hukum atau program tentang pembinaan pelaku ekonomi kecil

atau UKM perlu dibuat. Hal ini sangat penting, terutama bagi pengusaha UKM untuk menuntut dan mengontrol pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan UKM. Demikian juga kondisi yang seharusnya diciptakan di DKI Jakarta khususnya dikawasan PIK Pulogadung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung. Mengingat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan banyak stakeholder yang memiliki kompetensi dan kepentingan masing-masing yang terlibat. Namun, kenyataannya komunikasi dan koordinasi antara dinas propinsi, dinas kotamadya dan pengusaha UKM belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilakukan agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan adalah melalui sosialisasi yang terus menerus tentang kebijakan pengembangan dan pembinaan UMKM di kawasan PIK Pulogadung.

Saran dari para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung komunikasi yang ideal dalam implementasi kebijakan pembinaan UKM seharusnya dengan komunikasi yang baik dari implementor kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di DKI Jakarta khususnya di kawasan PIK Pulogadung diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang manfaat dari kebijakan tersebut untuk mewujudkan pengembangan industri berupa:

- a) Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah yang dihasilkan.
- b) Terwujudnya stuktur UKM yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara UKM dengan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri.
- c) Semakin banyaknya UKM yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan meluasnya

penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis UKM.

- d) Meningkatnya ekspor produk UKM, baik dalam nilai, dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang bernilai tinggi atau berteknologi dan berpangsa ekspor nasional.
- e) Terwujud upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya utamanya yang berciri khas daerah dan mempunyai nilai sejarah maupun ilai seni yang tinggi, sehingga kekayaan seni dan budaya nasional tersebut sekaligus dapat berkembang karena dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

B. Sumber Daya

Van Mater dan Van Horn (1974:465) dalam Widodo (2001:201) mengemukakan sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Kurangnya atau terbatasnya sumber daya dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, tidak mempunyai kemampuan (skill) untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UKM, responden menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Responden menyatakan bahwa pemerintah selama ini belum melakukan pembinaan kepada UKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta menyatakan bahwa jumlah UKM di kawasan PIK Pulogadung belum sebanding dengan personil pembinaan dari pemerintah. Tetapi, dapat juga terjadi juga terjadi overlapping pembinaan, terutama

dalam menghadapi ACFTA dimana masih banyak masalah yang di hadapi UKM dalam meningkatkan daya saing mereka dalam menghapi barang-barang impor khusus barang-barang dari China yang makin merajai pasar dalam negeri khususnya pasar di DKI Jakarta.

Dengan demikian, faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung adalah:

a) Sumber Daya Manusia (Aparat)

Kebijakan pengembangan UKM ini melibatkan setiap elemen pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi sampai kepada pemerintah kota. Dengan demikian, pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah memiliki peranan dalam implementasi kebijakan yang telah dirumuskan untuk memajukan sektor UKM yang selama ini bisa menjadi potensi bagi penopang perekonomian. Demikian halnya di kawasan PIK Pulogadung, pembinaan dan pengembangan UKM tidak terlepas dari peranan aparat pemerintah daerah.

Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UKM ini didukung oleh kekuatan sumber daya manusia (selanjutnya di sebut aparat). Dalam konteks ini setiap aparat harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari pimpinan.

Selain dari kuantitas, kelayakan dan ketepatan atau kualitas aparat yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Dengan kata lain, kualitas aparat turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung.

Dengan melihat kualitas aparat yang didasarkan pada pendidikan tekakhir dan kompetensi yang tidak sesuai penempatan ataupun kewenangannya, maka implementasi kebijakan ini sedikit terhambat. Keterbatasan kemampuan (skill) dan kewenangan aparat tersebut

membuat pembinaan teknis dan manajemen yang diberikan belum mencapai hasil yang optimal. Aparat yang dimiliki oleh Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta berdasarkan pendidikan terakhirnya saat ini adalah sebanyak (hasil wawancara tanggal 30 November 2011 dengan Kepala Dinas Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta):

- a. S2 : 10 orang
- b. S1 : 250 orang
- c. D3 : 17 orang
- d. SMU : 10 orang

Yang melaksanakan program pembinaan di kawasan PIK Pulogadung sejumlah 25 orang yang membina UKM sejumlah 495 UKM.

Sumber: Daftar Rekapitulasi PNS Peningkat Pendidikan Unit Kerja Dinas Industri, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi keadaan Agustus 2011

Kualitas aparat tidak hanya ditunjang oleh pendidikan formal, akan tetapi juga oleh pendidikan non formal pada aparat, mengingat kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan informal dalam bentuk pelatihan-pelatihan khususnya di bidang industri kecil dan menengah baik teknis dan manajemen. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, diketahui kualitas aparat yang bertanggung jawab pada program pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal aparat yang menangani bidang industri kecil dan menengah masih sangat terbatas dan belum menyeluruh.

Dari segi kuantitas, juga dapat dilihat aparat yang memiliki wewenang dalam pembinaan UKM ini juga sangat kurang karena tidak seimbang dengan jumlah UKM dan kebutuhan untuk terus berkembang makin hari makin meningkat, kekurangan jumlah aparat menimbulkan tidak efektifnya kebijakan tersebut dijalankan.

Dengan demikian, sumber daya manusia aparat baik secara kuantitas maupun kualitas akan mempengaruhi implementasi suatu

kebijakan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan pelaksana dari kebijakan tersebut.

b) Sumber Daya Manusia UKM

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia UKM (yang selanjutnya disebut SDM UKM). Dalam implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung terlihat masih ada keengganan disebagian pengusaha UKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural dan tingkat pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya program pengembangan dan langkah pembinaan yang dilakukan berjalan kurang maksimal.

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM tidak akan dapat berjalan lancar dan baik jika pengusaha itu sendiri tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk berkembang. Program pengembangan dan pembinaan yang pemerintah buat baru bisa berjalan jika para pengusaha mau tanggap terhadap program yang dibuat. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Industri, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta (hasil wawancara 30 November 2011):

“ Setiap program dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM tidak akan dapat berjalan dengan baik jika pengusaha itu sendiri tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk berkembang. Program yang kita buat baru bisa berjalan jika para pengusaha mau tanggap terhadap program yang kita buat. Toh semua ini juga untuk kepentingan pengembangan UKM”

Pendidikan pengusaha UKM juga mempengaruhi pemahaman pengusaha UKM juga mempengaruhi pemahaman UKM terhadap kebijakan pemerintah tentang pengembangan dan pembinaan UKM yang ada di kawasan PIK Pulogadung. Dari pengamatan peneliti, ditemukan lebih dari 50% pengusaha UKM yang ada tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal yang memadai. Rata-rata tingkat

pendidikan pendidikan pengusaha UKM hanya sampai pendidikan dasar atau lanjutan pertama. Hal ini membuat pengusaha UKM tidak mudah memahami apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah yang telah diperuntukkan untuk perkembangan UKM yang ada di kawasan PIK Pulogadung. Hal ini membuat pengusaha UKM tidak mudah memahami apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah yang diperuntukkan untuk perkembangan UKM yang ada di kawasan PIK Pulogadung. Kondisi diatas juga tergambar saat peneliti berada di kawasan Pulogadung, seperti kutipan berikut (hasil wawancara tanggal 29 november 2011 dengan pengusaha di sentra aneka komoditi):

“Kami selama ini berusaha secara turun temurun, sehingga yang kami jalankan ini tidak ada perubahan, baik dalam bentuk maupun kualitas. Pendidikan kami saja hanya sampai tamat SD, jadi kami sulit untuk bisa berkembang secara ekonomi. Kami hanya berjalan sesuai tradisi yang telah kami peroleh dan bagi kami, tidak perlu merubah apa yang telah menjadi tradisi secara turun temurun.”

Kondisi seperti ini peneliti temukan di sentra furniter, pengusaha di sentra ini sebanyak 8 UKM mengaku bahwa usah ini adalah usaha turun temurun, sehingga apa yang mereka jalankan dalam usaha hanya mengalami sedikit perubahan dalam bentuk maupun kualitas. Pendidikan mereka rata-rata hanya sampai sekolah menengah pertama saja, mereka juga merasa dengan pendidikan seperti ini mereka kurang dapat berkembang baik secara ekonomi terutama untuk mendapat tambahan modal dan penguasaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas produksi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Subdin Industri Kecil Menengah DKI Jakarta bahwa selain keterbatasan aparat dilapangan, kendala yang juga kami hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UKM adalah kesedian pengusaha UKM untuk menerima perubahan dan pembinaan dari aparat, penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan dan kemampuan pengusaha UKM itu

sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari hasil kutipan wawancara berikut (hasil wawancara tanggal 30 November 2011):

“Selain keterbatasan kemampuan aparat kami, kendala yang juga kami hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan menerima perubahan dan pembinaan kami. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat pendidikan dan kemampuan pengusaha UKM itu sendiri, karena tingkat pendidikan mereka tidak tinggi rata-rata hanya tamatan pendidikan dasar dan lanjutan pertama”

Seharusnya pemerintah juga memperhatikan tingkat pendidikan pengusaha UKM yang ada dalam merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan UKM. Hal ini mengingat masih banyaknya pengusaha UKM yang masih berpendidikan rendah. Dengan lebih memperhatikan tingkat pendidikan pengusaha UKM maka sosialisasi atau implemetasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat diterima dan dipahami oleh pengusaha UKM yang ada.

Jadi, dengan demikian pendidikan dan skill pengusaha UKM merupakan faktor yang juga tidak kalah pentingnya dalam keberhasilan implentasi kebijakan pengembangan UKM yang telah digariskan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan pendidikan dan skill pengusaha UKM ini, maka semua program dapat dijalankan dengan optimal.

C. Kepatuhan

Kepatuhan dalam implentasi kebijakan publik bisa diidentikkan dengan disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan (Edward III dalam Widodo, 2001:203). Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif atau efisien maka pelaksana harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan

tersebut terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Dinas Pendutrian, UKM dan Koperasi DKI Jakarta merasa bahwa mereka sebagai *avant garde* (ujung tombak) dalam pembinaan koperasi dan UKM di PIK Pulogadung sudah mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, akan memberikan amanah yang sangat besar kepada stakeholder ini. Pada saat sekarang dinas tidak bisa lagi bertumpu pada petunjuk dari instansi di atasnya. Segala sesuatunya tergantung pada inovasi dan kreatifitas masing-masing dinas di daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, dinas UKM dan koperasi tetap harus berpegangan pada unsur pemberdayaan masyarakat, pemerintah hanya akan memainkan peran sebagai fasilitator yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kompetensi inti lokal (*local core competency*) yang dapat diolah menjadi produk barang dan jasa dan juga informasi pasar. Dalam beberapa temu muka dengan anggota koperasi dan UKM ditemukan semacam keragaman keluhan yakni masih birokratisnya proses untuk mendapatkan jasa ini dan juga validitas data dan informasi yang sering sudah usang.

Implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung juga dipengaruhi oleh kecenderungan sikap atau pandangan aparat birokrasi terhadap kebijakan tersebut. Menurut peneliti, tidak semua aparat yang berwenang dengan kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung menganggap bahwa tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Subdin Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta sebagai berikut (hasil wawancara 29 November 2011):

“Selama ini kita berusaha untuk terus meningkatkan dan terus mengembangkan keberadaan UKM di kawasan PIK Pulogadung. Akan tetapi kita menghadapi kendala, yaitu tidak semua aparat kita mampu memahami apa yang menjadi kewajibannya.”

Para pengusaha UKM juga menganggap bahwa selama ini tidak ada perhatian dari dinas terkait. Pelaku usaha merasa tidak pernah adanya pembinaan

dari pemerintah. Sehingga pelaku usaha hanya menjalankan usaha mereka menurut kemauan dan kemampuan sendiri. Pengusaha merasa bahwa pemerintah hanya menekankan bahwa mereka harus bisa memberikan kontribusi perekonomian bagi ekonomi daerah tanpa adanya perhatian terhadap usaha mereka. Seperti apa yang terungkap dalam hasil wawancara berikut ini:

UKM sentra garmen dan konveksi (tanggal 28 November 2011):

“Kawasan PIK Pulogadung terkenal dengan sentra kecilnya. Akan tetapi kami tidak merasakan pembinaan dari Dinas Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DKI Jakarta ataupun dari Dinas UKM dan Koperasi Jakarta Timur. Mereka hanya ingin kami memberikan kontribusi terhadap perekonomian kota tanpa adanya perhatian terhadap usaha kami”

Para pengusaha UKM di PIK Pulogadung merasa bahwa mereka tidak merasakan bahwa Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi tidak melaksanakan program pembinaan seperti semestinya menurut program pengembangan UKM dan Koperasi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sebagai kerangka dasar dan perda yang di buat oleh Pemda DKI Jakarta sebagai aturan lanjutannya. Seperti yang terungkap dalam wawancara berikut ini:

UKM Sentra Aneka Komoditi yaitu Pengusaha Tas dan Sepatu (tanggal 28 November 2011):

“Sumbangan kami terhadap perekonomian daerah tidak diikuti dengan binaan yang sangat kami harapkan dari pemerintah. Kadangkala mereka tidak mengerti dengan kewajiban mereka dalam melakukan pembinaan terhadap sektor usaha kecil.”

Sumbangan para pengusaha UKM terhadap perekonomian daerah tidak dibarengi dengan dengan binaan yang sangat diharapkan dari pemerintah. Para pengusaha merasa pemerintah terkadang tidak mau mengerti atau pura-pura tidak mengerti kalau kewajiban mereka dalam melakukan pembinaan terhadap sektor usaha kecil menengah.

Kondisi ini sangat ironis karena mengingat UKM mempunyai potensi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap aparat pemerintah menjadi faktor penting untuk

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan terutama kepatuhan mereka melaksanakan tugas mereka dalam melakukan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan “Tidak baik”. Analisis dilakukan melalui evaluasi terhadap indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan, efisiensi dalam implementasi kebijakan pembinaan UKM di kawasan Pulogadung memiliki kriteria “Tidak Baik” menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung dilihat dari indikator komunikasi. Hal ini disebabkan karena:
 - a. Jumlah industri kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung yang sangat banyak dan makin berkurang karena ketidakmampuan UKM untuk meningkatkan daya saing untuk menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA. Hal ini terjadi karena UKM tidak di dukung dengan kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung.
 - b. Masih sering ditemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kecil terutama industri kecil menengah dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas terkait antara lain: dukungan sumberdaya, prasarana/sarana penunjang, bantuan teknik, insentif dan perlakuan kemudahan (fasilitas)
 - c. Belum efektifnya mekanisme bawah-atas dilapangan (*bottom-up*) di lapangan. Banyak pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik objek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen.

- d. Pada kawasan PIK Pulogadung peneliti menemukan banyaknya program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari objek binaan di lapangan. Intervensi pemerintah, termasuk sistem insentif yang ada sering kali kurang menyentuh kebutuhan sektor riil. Pengembangan sistem insentif baru sering terkendala oleh cara pandang sempit dan kepentingan jangka pendek, serta kekhawatiran akan penyalah-gunaan karena lemahnya aspek pengawasan.
 - e. Masih adanya keengganan di sebagian pengusaha UKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural dan tingkat pendidikan terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas seperti ACFTA.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah sebagai berikut:
- a. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi policy maker. Implementasi akan berjalan efektif apabila para pelaksana mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan komunikasi yang baik, maka koordinasi yang efektif akan dicapai. Kemampuan komunikasi aparat di lapangan dalam implementasi kebijakan untuk menjelaskan jenis manfaat yang akan dinikmati oleh kelompok sasaran pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Suatu kebijakan akan dirasakan manfaatnya jika diarahkan kepada pokok permasalahan yang dihadapi oleh dunia UKM. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Pengusaha UKM di kawasan PIK Pulogadung merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Banyak

pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik di kawasan PIK Pulogadung.

- b. Faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah: sumber daya manusia (aparatur) serta sumber daya manusia UKM. Implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Hal ini terjadi karena implementasi kebijakan pembinaan tidak didukung dengan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung. Peneliti juga menemukan adanya program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari objek binaan di lapangan.
- c. Faktor kepatuhan diperlukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk mengembangkan dan membina kegiatan ekonomi kecil terutama industri kecil menengah dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas

terkait antara lain: dukungan sumber daya, prasarana/sarana penunjang, bantuan tehnik dan pemberlakuan kemudahan (fasilitasi).

6.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia agar tidak ragu-ragu dalam menjalankan usahanya sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan aktifitasnya. Pembinaan terhadap dunia usaha UKM harus mampu merubah pola pikir pengusaha UKM yang bersangkutan. Selain itu akan diupayakan permodalan melalui pola kemitraan, baik yang memanfaatkan skim-skim kredit bunga rendah maupun dana bergulir.
2. Diharapkan pemerintah setempat memberikan bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pengusaha. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari program pengembangan dan pembinaan UKM mampu berjalan sebagaimana mestinya.
3. Peningkatan kemampuan aparat pembina perlu dilakukan dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat teknis dan manajemen serta dukungan sarana penunjang.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, S (1993). *Prosedur Penelitian Sosial Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Anderson, Gary. (1994). *Industry clustering for economic development*. EconomicDevelopment Review. New York: Springer.
- Boar, Bernhard H. (1993). *Thale art of strategic planning for information technology, crafting strategy for the 90s*. New York: Johaln Wiley & Sons, Inc.
- Doz, Yves L. & Prahalad, C.K. (1987). *The multinational mission*. New York: the Free Press.
- Dunn, W.N. (2000). *Public Policy Analysis: An introduction, second ed (terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- Dwijowijoto, R.N. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Kumputindo
- Dye, T.R. (1976.) *Policys Analysis: What Governments Do, Why They Do It, and What Difference It Makes*. Alabama : The University of Alabama Press
- Edwars III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc
- Freeman, Christopher, & Lundvall, Bength Ake. (1988). *Small countries facing the technological revolution*. New York: Printer Publisher.
- Grant, Robert M. (1991). *Porter's 'competitive advantage of nations': An assessment*. Strategic Management Journal, 12
- Grindle, M.S., (ed). (1980). *Politics and A policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princetown University Press
- Hogwood, B.W., and Gunn, LA. 1986. *Policy analysis for Real World*. London : Oxford University Press
- Hutasoit, Donal. (2005). *Strategi pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan*. Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- M. Irfan Islamy. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Jones, C.O.(1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : STIA LAN Press
- Jones, Peter T. & Teece, David J. (1988). *What we know and what we don't know about competitiveness*. Dalam Antonio Furino (Ed.). *Cooperation and competition in the global economy* .Cambridge, MA: Ballinger Publishing.
- Kaynak, Erdener. (1986). *Marketing and Economic Development*. New York: Praeger
- Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. (2005). *Kajian strategi dan arah kebijakan untuk memaksimalkan potensi daya saing daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Kerlinger, Fred N. (1990). *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (edisi 3). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kotler, Philip., Jatusripitak, Somvid., dan Maesincee, Suvit. (1997). *The marketing of nations*. New York: The Free Press A Division Simon & Schuster Inc.
- Krugman, Paul R. (1987). Targeting industrial policies: Theory and evidence. Dalam Dominick Salvatore (Ed.). *The new protectionist threat to world welfare*. New York: North Holland.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosda Karya
- Mustopadidjaja, A.R. (2002) *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Pinchalemel. (1985). *Aspek-aspek geografi dalam manajemen pengembangan wilayah*. Paris.
- Pitts, Robert A., & Lei, David. (2000). *Strategi management: building and sustaining competitive advantage*. USA: South-Western College.
- Porter, Michael. (1993). *Keunggulan bersaing: Menciptakan dan mempertahankan kinerja unggul*. Jakarta: Binarupa Aksara.

- _____ (1998). *On competition*. Boston: Harvard Business School Publishing.
- Riduwan. (2004). *Metode dan Tehnik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Singarimbun, M & Sofian E. (1982). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: ICEL
- Sugiyono, (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Hukum dan Kebijakan Publik, Insan Cendikia*, Jakarta
- Teubal, Morris. (1987). *Innovation, performance, learning and government policy*. Madison WI: University of Wisconsin Press.
- _____, (2005). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, M (1990). *Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____, 2002. *Dimensi-dimensi Prima: Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada
- Umar H, (1997). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, Solichin Abdul, (2004). *Analisa Kebijakan dari formulasi ke Implementasi kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Weimer, L.D. and Vining R. (1992). *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey:Printice Hall, Inc
- Wibawa, S Yuyun P dan Agus P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal, Artikel, dan Laporan

- Aaron, C. L. Keword, K. Bird, M. Desai, H. Aswicajhono, C.M. Basri, C. Tubagus. 2004. Strategic Approach to Job Creation and Employment in Indonesia. A Report. USAID. February.

- Agung Nur Fajar. 2007. Integrasi Program Pembangunan UKM. Makalah Seminar Isue- Isue Strategis. Jakarta 20 November 2007.
- Antal Szabo. Information and Knowledge-based Society and SMEs. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Approach.
- Anonymous. 2003. Medium Enterprise Dynamics: The Barriers Constraining On The Development of Medium-Size Enterprises. Study Report. Supported by The Asia Foundation.
- Anonymous. 2002. Strategi Pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah. Jurnal Ekonomi UNTAR, Volume 7 Nomor 1. Jakarta.
- Anonymous. 2010. Pemberlakuan CAFTA; Beban UKM Harus Dihilangkan. Koran Suara Karya 23 Februari.
- Amir M.S. 2000. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. PT. Pustaka. Binaman Pressindo. Jakarta.
- Anwar, Affendi. 1987. Optimalisasi Distribusi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Bidang Keahlian Perencanaan Pembangunan Regional dan Desa (PWD) Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Amir M.S. 2000. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. PPM, Jakarta. Bank Indonesia. 2005. Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta.
- Asian Development Bank. 2002. Mid Term Action Plan for SME Development: Strategy and Recommendations. Project Report. ADB MSE Development Technical Assistant. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2006. Perhitungan Kinerja UMK Ditinjau dari Aspek Kontribusi Terhadap Berbagai Indikator Makro Ekonomi Serta Survei Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) UKM. BPS, Jakarta.
- Bisnis Indonesia. 2010. Renegosiasi Terancam Gagal; Pemerintah akan Optimalkan Instrumen Perdagangan Hadapi ACFTA. Bisnis Indonesia 18 Februari.
- Burhanuddin. 2008. Tinjauan Prospek Koperasi Indonesia Dari Perspektif Disiplin Ilmu Manajemen Bisnis. Infokop Volume 16 September. Cooke, P. 2002.

- Biotechnology Clusters as Regional, Sectoral Innovation Systems. *International Regional Science Review* 25(1).
- Cooke, P. 2003. Biotechnology Clusters; Big Pharma' and the Knowledge-Driven Economy. *International Journal of Technology Management* 25(1/2),
- Dahlman, C. J. 1979. The Problem of Externality. *Journal of Law and Economics* 22
- Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. (2003). *Model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan*. Jakarta: Bappenas.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. (2004). *Tata cara pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. (2004). *Kajian strategi pengembangan kawasan dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Dipta, I. Wayan. 2008. Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Pola CSR. *Infokop* Volume 16 September.
- Dipta, I Wayan. 2010. Pengembangan Klaster Untuk Daya Saing UMKM Menghadapi ACFTA. *Infokop*
- Dumais, G., G. Ellison, and E. Glaeser. 1997. Geographic Concentration as a Dynamic Process. NBER working paper #6270.
- Edwards III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*, Washington DC, Congressional Quarterly, Press
- Ernst, D. 2003. Global Production Networks and Upgrading Prospects in Asia's Electronics Industries. Mimeo, Hawaii, East West Center.
- Glaeser E., H. Kallal, J. Scheinkman, and A. Shleifer. 1992. Growth in Cities. *Journal of Political Economy* 100
- Jovanovic, B. and R. Rafael. 1989. The Growth and Diffusion of Knowledge. *Review of Economic Studies* 56(4)

- Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2006. Data Statistik Perkoperasian. Deputi Bidang pengkajian Sumberdaya UMKM dan Koperasi, Jakarta
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2004. Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2003. Seri Kebijakan: Pengembangan Sentra UKM, BDS dan MAP, Jakarta
- Khalid Nadvi, 1995. *Industrial Clusters and Networks: Case Studies of SME Growth and Innovation*. UNIDO.
- Lundvall, B. A. 1998. Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to the National Systems of Innovation,” in G. Dosi (ed.) *Technological Change and Economic Theory*, London: Printer Publisher.
- Mai, C-C. and S-K. Peng, 1999, “Cooperation vs. Competition in a Spatial Model,” *Regional Science and Urban Economics* 29.
- Mai, C-C. 1996. *Agglomeration Economies and Spatial Competition: Comments on the Establishment of Hsin-Chu Science-based Industrial Park*. Paper presented at the Conference in Memory of Liu Ta-Chung. Taipei: Liu Ta-Chung Educational and Cultural Foundation (in Chinese).
- Marshall, A. 1890. *Principles of Economics*, London: Macmillan (for the Royal Economic Society).
- Meter, Donal S. Van and Carl E Van Horn, 1978. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework Administration & Society*, Sage Publication
- Orlando, M. 2000. On the Importance of Geographic and Technological Proximity for R & D Spillovers: An Empirical Investigation. Federal Reserve Bank of Kansas City, Research Division, working paper.
- Porter, Michael E. (1998). *Clusters and New Economics of Competition*. Harvard Business Review. Boston
- Rasiah, R. 2002. *Systemic Coordination and Human Capital Development: Knowledge Flows in Malaysia’s MNC-Driven Electronics Clusters*. INTEC Discussion Paper Series, #2002-7, The United Nations University.

- Rowen, H. and M. Toyoda. 2002. Japan Has Few High-Tech Startups: Does It Matter? Can It Be Changed? Working paper. Hoover Institution Stanford University, America.
- Santoro, M. and A. Chaknabarti. 2002. Firm Size and Technology Centrality in Industry. *University Interactions. Research Policy* 31(7)
- Saxenian, A. 1994. *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*, Cambridge, Massachusetts, and London. Harvard University Press, England
- Syarif, Teuku dan Ethy Budiningsih. 2010. Kebijakan Pemerintah Untuk Mendukung UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi ACFTA. *Infokop Volume Juli 2010*
- Situmorang, Johnny. 2008. Peringkat Propinsi Dalam Membangun Ekonomi Koperasi, Analisis Berdasarkan Indeks PEKR. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Volume 3 September*.
- Situmorang, Jannes. 2008. Strategi UMKM Dalam Menghadapi Iklim Usaha Yang Tidak Kondusif. *Infokop Volume 16 September*.
- SME Cluster Development, Principle and Practices. 2004. UNIDO.
- Subagio. 2010. *Harian Suara Karya* 27 Februari.
- Syariffudin Hassan. 2010. *Harian Bisnis Indonesia* 7 Maret.
- Takeuchi, H. 2002. *Hamamatsu Kigyo Tsuyosa no Himitsu (The Secret Strength of Hamamatsu Enterprises)*. Tokyo: Toyo Keizai Shinpo Sha.
- Wallsten, S. 2001. An Empirical Test of Geographic Knowledge Spillovers Using Geographic Information Systems and Firm-level Data. *Regional Science and Urban Economics* 31

PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Suarja AR, Wayan. 2007. Kebijakan Kominfo Newsroom. 2010. ACFTA Peluang Perbesar Produksi Bagi UKM. www.kominfonewsroom.com, diakses 22 Februari.
- Lawson, C. 1997. Territorial Clustering and High-Technology Innovation. From Industrial Districts to Innovative Milieux. Working Paper 54, ESRC Center for Business Research. University of Cambridge, UK.

Pemberdayaan UKM dan Koperasi guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan.

[http:// openpdf.com/ebook/ekonomi-koperasi-pdf.html](http://openpdf.com/ebook/ekonomi-koperasi-pdf.html), diakses tanggal 1 Maret 2010.

<http://dkukm.tanjabarkab.go.id/Program%20Kerja%20Koperasi.htm>

<http://smecda.com/deputi7/BERITA%20KUKM/get8.asp?id=2351>

http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2025/pengemb_ukm.pdf

WEF (2011), The Global Competitiveness Report 2011-2012

WEF (2010), The Global Competitiveness Report 2010-2011

Peraturan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sekretariat DPR Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

KUESIONER

A. Hubungan Variabel Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan, dan Lingkungan Terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan UKM Dalam Menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat dan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia dari nomor 1 sampai 5 masing-masing tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu dari Sangat Baik (SB)/No. 1 sampai Sangat Tidak Baik (STB)/No.5 dari pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.

Variabel Sumberdaya

NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Selama ini UKM mendapat bimbingan dan bantuan pihak pemerintah dalam mengatasi kesulitan tehnik seperti masalah produksi, permodalan dan pemasaran dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
2	Materi pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah selama ini sesuai dengan kebutuhan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
3	Dalam program pengembangan dan pembinaan pemerintah memberikan program khusus atau pembinaan sesuai dengan kluster atau kelompok usaha masing-masing yang ada dikawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					

4	Dengan program pengembangan dan pembinaan para pengusaha mendapat peningkatan kemampuan baik dari segi permodalan, pemasaran, kemampuan SDM, dan teknik produksi serta informasi dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
5	Selama ini UKM memperoleh sarana dan prasarana dari pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
6	Selama ini UKM diberikan kesempatan dan informasi yang seluas-luasnya oleh pemerintah yang sesuai untuk memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
7	UKM selama ini memperoleh bantuan berupa perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi dari pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
8	UKM selama ini memperoleh bantuan berupa perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi dari pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
9	Selama ini UKM memperoleh pelayanan dan kemudahan pendanaan dari lembaga pembiayaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA.					

Variabel Komunikasi

NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
10	UKM mendapatkan informasi dalam bentuk pembinaan yang jelas dan tepat sasaran oleh pemerintah dalam peningkatan SDM, pemasaran, permodalan dan penguasaan teknologi terbaru dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi guna peningkatan daya saing dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
11	Program pembinaan yang dilakukan selalu mengikuti perkembangan dari bidang IPTEK terutama dalam pengembangan SDM dan penguasaan teknologi terbaru dalam produksi serta sistem informasi pemasaran dengan adanya BDS atau pusat informasi bisnis terpadu dikawasan ini dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
12	Komunikasi antara UKM dengan pemerintah selama ini tidak mengalami hambatan sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA.					
13	Petugas pemerintah dan pihak lain yang terlibat selalu menyamakan persepsi dengan para pengusaha guna berjalannya program pengembangan dan pembinaan secara efektif dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					

Variabel Kepatuhan

NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
14	Selama ini usaha besar selalu menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur pemerintah memberikan informasi yang cukup guna mempersiapkan para pengusaha dalam melaksanakan program pengembangan dan pembinaan yang telah dipersiapkan dalam menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
15	Pihak-pihak yang terkait bersatu pada serta sejalan dalam program pengembangan dan pembinaan UKM dikawasan ini seperti aparat pemerintah, para pengusaha, pihak yang melakukan kemitraan dengan UKM, para pengusaha ritel dan lembaga keuangan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
16	Dukungan dari aparat pemerintah dalam program pengembangan dan pembinaan UKM dirasa cukup dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					
17	Aparat yang bertanggung jawab dalam program pengembangan dan pembinaan mempunyai kemampuan yang baik dalam menyampaikan program dan membantu pengusaha dalam mengaplikasikannya dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA					

B. Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat dan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia dari nomor 1 sampai 5 masing-masing tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu dari Sangat baik (SB)/No.1 sampai Sangat Tidak Baik (STB)/No.5 dari pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.

NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Bagaimana manfaat kebijakan pengembangan UKM selama ini dapat menciptakan iklim usaha yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh melalui peningkatan kemampuan SDM, pemasaran, permodalan dan penguasaan teknologi dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?					
2	Bagaimana pencapaian hasil produksi baik secara kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh UKM setelah ada program pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?					
3	Bagaimana manfaat baik secara finansial terutama kemudahan dalam memperoleh modal setelah UKM mendapatkan program pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?					
4	Bagaimana rasa keadilan yang diterima oleh UKM dalam pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?					
5	Sejauhmana kebijakan pengembangan dan pembinaan					

	dapat memenuhi kebutuhan kemudahan pemasaran, pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi bagi UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?					
6	Sejauhmana kebijakan pengembangan dan pembinaan dapat memberdayakan UKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?					



Pertanyaan Tambahan Mengenai Pendapat Responden Mengenai Kebijakan Pengembangan UKM Dalam Menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA):

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Cooperation) dan WTO (World Trade Organization), hingga yang terbaru ACFTA?

.....
.....
.....

2. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bahwa di setiap perjanjian perdagangan bebas khusus ACFTA ada barang atau biaya yang dibebaskan?

Bila Ya, sebutkan:

.....
.....
.....
.....

3. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui setiap program dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Bila Ya, sebutkan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui seperti program Pengembangan pelayan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi UKM dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Bila Ya, sebutkan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah kebijakan pengembangan dan pembinaan sangat diperlukan bagi pengembangan usaha Bapak/Ibu/Saudara dalam kemudahan pemasaran, pengembangan SDM dan manajemen, kemudahan permodalan dan penguasaan teknologi bagi UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

Dampak Positif:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dampak Negatif:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Aspek-aspek lingkungan internal dan eksternal apakah yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pengembangan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

.....
.....
.....
.....
.....

8. Strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan Kawasan PIK Pulogadung dalam rangka peningkatan daya saing dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah UU Pengembangan Kawasan Klaster perlu dikeluarkan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

10. Apakah saran Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

11. Jika terdapat hal-hal yang ingin Bapak/Ibu/Saudara sampaikan tentang kebijakan, dapat dituangkan dibawah ini.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

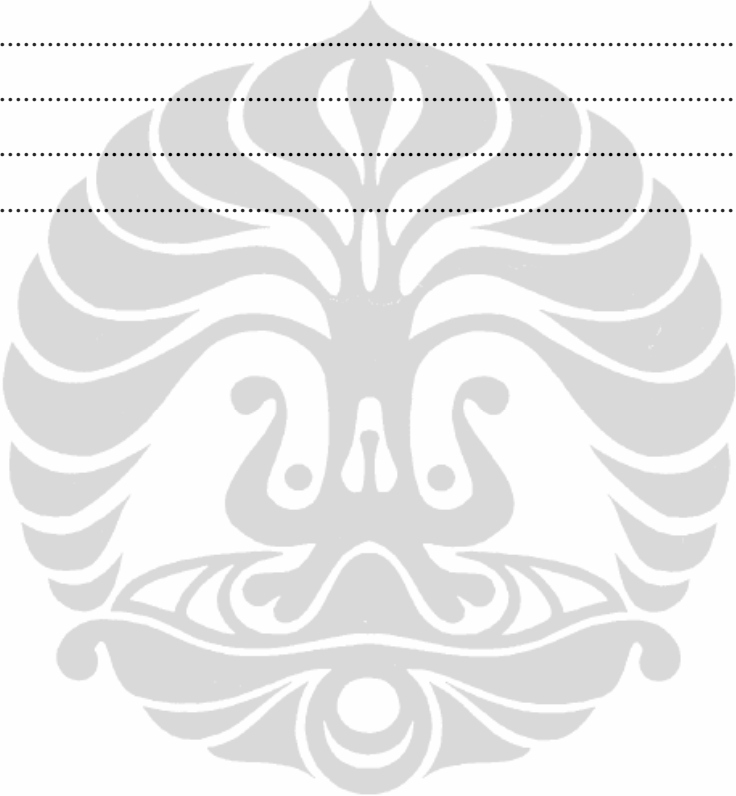
.....

.....

.....

.....

.....



PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA MENGENAI PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA):

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui setiap program dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
2. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui seperti program Pengembangan wilayah produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi UKM dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
3. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Cooperation) dan WTO (World Trade Organization), hingga yang terbaru ACFTA?
4. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bahwa di setiap perjanjian perdagangan bebas khusus ACFTA ada barang atau biaya yang dibebaskan?
5. Menurut pendapat Bapak, apakah kebijakan tentang pengembangan dan pembinaan UKM sangat diperlukan bagi pengembangan usaha di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan:

.....

.....

.....

.....

6. Tujuan dan manfaat kebijakan pengembangan dan pembinaan bagi kegiatan usaha baik disisi pemasaran, pengembangan SDM dan manajemen serta kemudahan dalam permodalan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

7. Menurut pendapat Bapak, apakah dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan pengembangan dan pembinaan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
8. Bagaimana peranan UKM sebelum dan setelah ada kebijakan pengembangan dan pembinaan dalam peningkatan daya saing usaha guna peningkatan daya saing daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
9. Bagaimana komitmen pemerintah sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
10. Upaya-upaya apa yang dilaksanakan pemerintah untuk mencanangkan kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung guna pengembangan kawasan kluster secara bertahap dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
11. Apakah pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan memberikan informasi khususnya dalam pengembangan pemasaran, pengembangan SDM dan manajemen, permodalan dan penguasaan teknologi guna peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
12. Bagaimana kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan yang telah diterapkan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
13. Bagaimana peranan sumberdaya (pelaksana kebijakan, dukungan anggaran, dan sarana dan prasarana) dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
14. Bagaimana komunikasi kelompok sasaran dan pemerintah dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

15. Apakah permasalahan dan kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM ini dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
16. Sejauhmana kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM ini dapat memecahkan masalah bagi kegiatan produksi UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
17. Apakah kementerian memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan UKM bagi terselenggaranya program pengembangan UKM khususnya kebijakan pengembangan kawasan klaster bertahap dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
18. Bagaimana peran lembaga pendukung terhadap kebijakan pengembangan dan pembinaan UKM ini dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
19. Bagaimana peran pemerintah dan kalangan akademisi sebagai pembina UKM dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
20. Apakah pemerintah melakukan pembinaan kepada UKM untuk mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA dalam satu atau lebih aspek:
 - a. Pemasaran
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya
 - c. Permodalan
 - d. Manajemen
 - e. Teknologi
21. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah kebijakan khusus pengembangan kawasan secara klaster bertahap perlu dikeluarkan dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Alasan:

.....
.....

22. Apa saran Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberhasilan implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan UKM khususnya di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?
23. Apakah hal-hal lain yang ingin Bapak/Ibu/Saudara sampaikan tentang Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan UKM khususnya di kawasan PIK Pulogadung dalam mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas khusus ACFTA?

